

INDEKS KELOLA

KINERJA DAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN APBD



**65 DAERAH
PILIHAN**

Kabupaten/kota yang berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah, sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan.

65 DAERAH PILIHAN

Kabupaten/kota yang berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah, sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan.

TIM PENYUSUN

PENASIHAT

Metta Dharmasaputra

TIM AHLI

Mulya Amri, Ph.D

Heri Susanto

Stevanny Limuria

METODOLOGI

Dr. Elan Satriawan, MEC

Dr. Rimawan Pradiptyo M.Sc

Gumilang Aryo Sahadewo,

S.E., M.A., Ph.D

DATA & RISET

Jamalianuri

Agus Dwi Darmawan

Risanti Delphia

Hanif Gusman

STATISTICIAN

Nazmi Haddiyat Tamara

Lulu Mahdiyah

Puspa Indah

DESAIN

Lambok E. Martin Hutabarat

Muhamad Yana

Wahyu Risyanto

PROFIL TIM PENYUSUN



Mulya Amri, Ph. D,

merupakan Research Director di Katadata Insight Center. Mulya adalah spesialis senior kebijakan

publik dan pembangunan perkotaan dengan 20 tahun pengalaman bekerja bersama pejabat pemerintah, bisnis, dan kelompok masyarakat sipil di berbagai negara. Mulya memiliki gelar Ph. D Kebijakan Publik dari National University of Singapore.



Heri Susanto

menjabat sebagai Chief Content Officer Katadata, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai

jurnalis di bidang ekonomi dan bisnis. Heri memulai karir di bidang riset dengan bekerja di sebuah firma riset bisnis dari Singapura, dan Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI) sebelum mendirikan Katadata.



Stevanny Limuria

memiliki berbagai pengalaman di berbagai perusahaan publik dan lembaga penelitian selama

lebih dari 10 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Tarumanegara, serta berpengalaman dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah perusahaan, serta menganalisis model keuangan dan proyeksi keuangan.



Jamalianuri

merupakan Analis Riset di Katadata Insight Center. Ia terlibat dalam berbagai penelitian

multidisiplin dengan topik kebijakan publik dan isu pembangunan. Jamalianuri meraih gelar M.Sc Manajemen dan Pembangunan Perkotaan dari IHS Erasmus University Rotterdam dan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia.



Nazmi Haddiyat Tamara

adalah Analis Data di Katadata Insight Center. Ia memiliki pengalaman dalam

penelitian dan analisis di berbagai sektor dan topik ditunjang dengan keahlian dalam Visualisasi Data. Nazmi memiliki gelar sarjana Statistika dengan keahlian khusus pada Matematika Keuangan dan Pasar Modal dari IPB University.



Lulu Mahdiyah S.

adalah Analis Data di Katadata Insight Center. Lulu memiliki pengalaman menganalisis data

di berbagai bidang, terutama data survei serta data pemerintah. Lulu sangat tertarik dan sedang mendalami bidang pengolahan Big Data. Lulu meraih gelar sarjana Statistika di IPB University.

Hak cipta dilindungi undang-undang — © Katadata, 2020

PT Katadata Indonesia

Permata Senayan Blok D No. 31

Jln. Tentara Pelajar, Jakarta, Indonesia, 12210

Telepon: +6221 5794 0835,

Email: info@katadata.co.id, Web: katadata.co.id

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
RINGKASAN	VIII
PENDAHULUAN	IX
KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN	3
Kota Madiun	4
Kota Solok	5
Kota Blitar	6
Kota Karanganyar	7
Kota Agam	8
Kabupaten Blitar	9
Kabupaten Pulang Pisau	10
Kabupaten Kepulauan Talaud	11
Kabupaten Buton	12
Kota Gunung Sitoli	13
Kabupaten Majalengka	14
Kabupaten Blora	15
PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN	17
Kabupaten Mimika	18
Kabupaten Jayapura	19
Kabupaten Biak Numfor	20
Kota Jayapura	21
Kabupaten Maluku Tengah	22
Kota Kotamobagu	23
Kabupaten Nabire	24
Kabupaten Puncak Jaya	25
Kabupaten Sarmi	26
Kabupaten Flores Timur	27
Kabupaten Alor	28
Kabupaten Jeneponto	29
KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN	31
Kota Mojokerto	32
Kabupaten Biak Numfor	33
Kabupaten Aceh Barat	34
Kota Banjar	35
Kota Kotamobagu	36
Kota Dumai	37
Kabupaten Pulau Morotai	38
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	39
Kabupaten Paniai	40
Kota Tanjung Balai	41
Kabupaten Bantaeng	42
Kabupaten Sikka	43

PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN	45
Kabupaten Sumbawa Barat	46
Kabupaten Bone Bolango	47
Kota Sibolga	48
Kota Kupang	49
Kota Sorong	50
Kabupaten Sidenreng Rappang	51
Kabupaten Sabu Raijua	52
Kabupaten Asmat	53
Kabupaten Banggai Kepulauan	54
Kabupaten Pohuwato	55
Kabupaten Toli Toli	56
Kabupaten Buol	57
KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI	59
Kabupaten Konawe	60
Kabupaten Morowali	61
Kota Sibolga	62
Kabupaten Bantul	63
Kota Salatiga	64
Kabupaten Indragiri Hulu	65
Kabupaten Asmat	66
Kabupaten Aceh Barat Daya	67
Kabupaten Supiori	68
Kabupaten Way Kanan	69
Kabupaten Alor	70
Kabupaten Buol	71
PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN	73
Kabupaten Badung	74
Kota Bontang	75
Kabupaten Malinau	76
Kabupaten Banggai	78
Kota Pangkal Pinang	79
Kabupaten Gorontalo Utara	80
Kabupaten Tana Tidung	81
Kabupaten Kepulauan Anambas	82
Kabupaten Bangka Barat	83
Kota Gunung Sitoli	84
Kabupaten Solok	85

KATA PENGANTAR

OTONOMI daerah. Istilah ini cukup populer ketika era reformasi mulai bergulir di Indonesia pada 1999. Ini adalah sebuah perubahan besar menyangkut kebijakan pengelolaan pemerintahan yang semula terpusat kemudian diubah menjadi terdesentralisasi. Perubahan itu tercermin dari terbitnya Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada 1999.

Sejak saat itu, daerah memang memiliki hak, kewenangan dan kewajiban dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara baik, mandiri, berkualitas, prudent, transparan dan akuntabel. Lewat otonomi daerah, para pemimpin daerah diharapkan bisa mengelola anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah, sebagian besar pemda memang mengandalkan dana perimbangan hingga 60% dari pemerintah pusat. Dana itu disalurkan dalam bentuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Beberapa daerah mampu mengandalkan sumber pembiayaan sendiri, seperti pendapatan asli daerah (PAD).

Persoalannya, dalam alokasi anggaran untuk pembangunan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selama ini, APBD lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai (37%), sedangkan untuk membiayai program-program pembangunan masih terbatas, belum sesuai dengan kewajiban yang dimandatkan Undang-Undang.

Sebagai contoh, masih banyak daerah yang belum melaksanakan anggaran *mandatory* atau wajib sesuai dengan Undang-Undang, seperti 20% untuk anggaran pendidikan dan 10% untuk anggaran kesehatan. Padahal, daerah-daerah tersebut menghadapi tantangan di sektor pendidikan dan kesehatan, seperti rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni sekolah, dan usia harapan hidup.

Karena itu, efektivitas dan optimalisasi pengelolaan APBD merupakan salah satu instrumen penting bagi Pemda dalam mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Guna memacu efektivitas penggunaan APBD dalam mewujudkan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan pengukuran mengenai kinerja pemerintah daerah dan efektivitas daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Kami menyebut pengukuran ini dengan nama INDEKS KELOLA yang merupakan sebuah metode untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah.

Metode pengukuran INDEKS KELOLA ini disusun oleh para ekonom UGM yaitu Dr. Elan Satriawan, MEC, Dr. Rimawan Pradiptyo, MSC., dan Gumilang Aryo Sahadewo, SE, M.A., PhD. Penghitungan dan pelaporan INDEKS KELOLA tahun 2020 dilakukan oleh tim riset dan data bersama tim analis dan statistician dari Katadata Insight Center.

Proses seleksi awal secara administrasi dilakukan terhadap 508 kabupaten dan kota otonom di seluruh Indonesia. Kemudian, kabupaten dan kota yang lolos seleksi awal dibagi dalam empat kelompok berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan besarnya APBD per kapita. Tujuannya, agar satu daerah dibandingkan dengan daerah lain yang berada dalam kelompok dengan kondisi IPM dan APBD per kapita yang mendekati atau setara.

Setelah dipecah berdasarkan kelompok IPM dan APBD per kapita, pengukuran dilakukan dengan mengacu pada sejumlah indikator dengan angka pembobotan tertentu, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan. Indikator di masing-masing sektor tersebut dikelompokkan dalam dua kategori, yakni ketepatan alokasi APBD berdasarkan kebutuhan pembangunan dan dampak atau *outcome* alokasi APBD bagi pembangunan. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh daerah dalam menjalankan pembangunan di sejumlah sektor juga menjadi pertimbangan.

Melalui metode pengukuran indeks ini, kami dapat melakukan pemetaan dan pemeringkatan daerah berdasarkan kelompok masing-masing dalam mewujudkan agenda pembangunan daerah dan nasional. Dari hasil pemetaan dan pemeringkatan ini, dapat diketahui kabupaten/kota yang berhasil dan efektif mengelola anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan, serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan perekonomian.

Kami berharap hasil pemetaan dan pemeringkatan, serta pencapaian daerah yang dipaparkan dalam laporan ini akan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Laporan ini bisa menjadi salah satu sumber rujukan dan acuan bagi para pejabat berwenang di daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran untuk membangun sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mereka juga bisa saling belajar bagaimana daerah lain memajukan masyarakatnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan indeks ini, sekaligus penyusunan laporannya. Kami ucapkan terima kasih kepada sejumlah lembaga yang telah mempublikasikan data dan informasinya, seperti Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Dalam Negeri. Kami juga berterima kasih kepada para pejabat berwenang di kabupaten/kota yang berkenan memaparkan data, informasi dan terobosan yang mereka lakukan dalam membangun daerahnya.

Jakarta, November 2020

TIM PENYUSUN

KATADATA INSIGHT CENTER

RINGKASAN

PENELITIAN ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan anggaran daerah dalam mencapai sasaran strategis yaitu pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Penilaian efektivitas pengelolaan anggaran daerah terdiri dari tiga komponen yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Komponen administratif meliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan.

Penilaian aspek kuantitatif dibagi menjadi dua komponen yaitu komponen ketepatan alokasi anggaran dan pencapaian pertumbuhan sektoral. Komponen ketepatan menilai keputusan strategis pemerintah daerah dalam penetapan alokasi anggaran untuk sektor tertentu. Komponen pencapaian pertumbuhan sektoral dinilai dengan perubahan keluaran sektoral antar waktu.

Analisis data dimulai dengan pengelompokan 508 kabupaten dan kota otonom di Indonesia ke dalam empat kelompok menurut besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengelompokan ini bertujuan untuk mencegah penilaian yang bias ketika membandingkan daerah yang telah maju dengan daerah yang masih dalam tahap awal pembangunan atau daerah baru dari pemekaran wilayah.

Data untuk pengolahan indeks kelola ini berasal dari masing-masing data kementerian/ lembaga menurut bidangnya. Data selanjutnya juga diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 72 pemenang yang berasal dari 65 daerah. Masing-masing kategori di setiap kelompok menghasilkan 3 daerah pemenang dengan nilai tertinggi.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara baik, mandiri, berkualitas, prudent, transparan, dan akuntabel. Lewat otonomi daerah, para pemimpin daerah diharapkan bisa mengelola anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada akhir tahun 2019 mengeluhkan masalah penggunaan APBD yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai yaitu sebesar 70% (Kemenkeu, 2019). Kategori belanja yang produktif seperti belanja modal nilainya kurang dari 20%.

Selain itu, masih banyak daerah yang belum melaksanakan kewajiban anggaran seperti telah dimandatkan sesuai dengan undang-undang, misalnya amanah anggaran pendidikan yang mengharuskan alokasi 20% dari postur anggaran dan 10% untuk anggaran kesehatan.

Amanat besaran anggaran pendidikan ini secara gamblang tertuang tertuang dalam dua undang-undang yakni UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1. Dua undang-undang ini secara tegas menyebut porsi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari besarnya APBN dan APBD.

Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyebut porsi anggaran kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun anggaran. Dalam undang-undang tersebut, pasal 171 ayat 1 berbunyi: “Besaran anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Pada ayat 2 : “Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”.

Kesuksesan pemerintah daerah dalam membangun daerahnya dapat memberikan berbagai implikasi positif. Pertama, kesuksesan pemerintah daerah dapat memacu pemerintah daerah lain dalam pembangunan daerahnya. Kedua, kesuksesan pembangunan daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional.

Nyatanya, efektivitas dan optimalisasi pengelolaan APBD belum tercapai. Dengan situasi seperti ini, pengelolaan APBD dianggap tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya selain masalah perencanaan yang belum memiliki standar baik, menurut Menteri Keuangan juga disebabkan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil.

Saat ini, pemerintah belum sepenuhnya menjadikan keluaran (*output*) apalagi hasil (*outcome*) sebagai penilaian akhir. Keluaran masih sulit dijadikan sebagai variabel terakhir penilaian di setiap kementerian dan lembaga karena memiliki parameter dan ukuran berbeda. Oleh karena itu, perbandingan keluaran secara cepat membutuhkan usaha dan waktu lebih banyak. Alternatif penilaian yang relatif mudah dilakukan dan hasilnya dapat dipantau dalam waktu riil adalah penggunaan anggaran berdasarkan realisasi penyerapan anggaran.

PERTANYAAN PENELITIAN

Efektivitas penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan penilaian ketepatan penggunaan anggaran dan perbandingan hasil yang diperoleh. Pengelolaan anggaran efektif apabila anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mendasar atau untuk mencapai peningkatan kualitas keluaran sektoral. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi?
2. Kabupaten dan kota manakah yang memiliki penggunaan anggaran yang efektif?

TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan potret efektivitas dan optimalisasi penggunaan APBD untuk pembangunan daerah.
2. Mendorong penggunaan APBD agar sejalan ketentuan undang-undang.
3. Mendorong kompetisi para pemimpin daerah dalam hal pengelolaan APBD sehingga efektif, optimal, berkualitas, dan prudent.
4. Memberikan apresiasi kepada para pemimpin daerah yang efektif menggunakan APBD.
5. Mendorong pemimpin-pemimpin daerah yang berprestasi untuk maju dan bersaing ke pentas nasional.

METODOLOGI

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian meliputi modal fisik, modal manusia, dan teknologi (Acemoglu, 2009; Klenow and Rodríguez-Clare, 1997; Mankiw et al., 1992; Romer, 1989). Pembangunan modal manusia tidak lepas dari pendidikan (Barro, 2001; Schultz, 1961) dan kesehatan (Becker, 2007). Oleh karena itu, pemerintah perlu turut serta dalam penyediaan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan modal manusia masyarakat.

Namun, penetapan program pemerintah daerah beserta anggarannya untuk meningkatkan modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan tidaklah mudah. Pemerintah daerah perlu memiliki kerangka penyusunan kebijakan berbasis bukti dan evaluasi program yang matang (Gertler et al., 2016; White and Raitzer, 2017). Pertama, kerangka ini memungkinkan pemerintah untuk menilai apakah program (*input*) tersebut efektif meningkatkan hasil (*outcome*), bukan sekedar keluaran (*output*). Sebagai contoh, program pelatihan atau sertifikasi guru tidak sekedar menghitung berapa guru yang hadir dalam pelatihan atau guru bersertifikasi (*output*), namun perubahan kualitas mengajar dan capaian pendidikan muridnya (*outcome*).

Kedua, kerangka ini memungkinkan pemerintah untuk menilai apakah program tersebut efektif secara biaya. Ketiga, pemerintah meminimasi *opportunity costs* dari program yang tidak efektif. Jika kerangka ini diterapkan, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai referensi evaluasi program untuk pengembangan modal manusia yang pernah dilakukan (Fryer, Roland G, 2016). Pemerintah daerah dapat berinovasi dengan menerapkan program yang telah teruji efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan masalah di daerahnya masing-masing.

Penelitian ini mengukur efektivitas anggaran dengan kerangka berpikir evaluasi. Secara khusus, pengeluaran pemerintah daerah merupakan input yang krusial untuk berbagai program di suatu bidang. Pengeluaran pemerintah daerah yang tercermin dari berbagai program tidak hanya diharapkan menghasilkan keluaran tetapi juga hasil. Oleh karena itu, indikator yang dipilih untuk pengukuran efektivitas adalah indikator hasil.

PEMILIHAN INDIKATOR

Pemilihan indikator untuk pengukuran efektifitas penggunaan anggaran daerah dalam pencapaian di berbagai bidang di atas memerhatikan tiga kriteria yaitu:

1. Ketersediaan data untuk setiap kabupaten dan kota di Indonesia
2. Ketersediaan data yang berkelanjutan
3. Keterbukaan data bagi publik untuk akuntabilitas dan transparansi pengukuran

Dengan pertimbangan ketiga indikator tersebut, peneliti menggunakan indikator yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan. Tabel 1 merangkum berbagai indikator bidang yang dipilih untuk pengukuran efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Tabel 1. Indikator bidang untuk pengukuran efektivitas penggunaan anggaran daerah

Bidang	Indikator	Sumber
Pendidikan	APBD fungsi pendidikan per kapita	Kementerian Keuangan
	Rasio siswa terhadap guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio siswa terhadap guru bersertifikasi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka partisipasi murni SMP	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan	APBD fungsi kesehatan per kapita	Kementerian Keuangan
	Rasio fasilitas kesehatan per jumlah penduduk	Kementerian Kesehatan
	Rasio SDM kesehatan per jumlah penduduk	Kementerian Kesehatan
	Angka harapan hidup	Badan Pusat Statistik
Ekonomi	APBD fungsi ekonomi per kapita	Kementerian Keuangan
	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita	Badan Pusat Statistik
Kesejahteraan	Persentase penduduk miskin	Badan Pusat Statistik

TAHAP PENGUKURAN

Pengukuran efektivitas penggunaan dana daerah dibagi menjadi dua tahap yaitu pembagian kabupaten dan kota menjadi kelompok dan penilaian efektivitas. Untuk tahap pertama, kabupaten dan kota dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan APBD per kapita dan indeks pembangunan manusia (IPM). Pembagian ini dilakukan karena fase pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berbeda antar daerah. Sebagai contoh, hasil pembangunan daerah hasil pemekaran wilayah secara umum lebih rendah dibandingkan daerah yang telah lama berdiri. Pembagian daerah menjadi 4 kelompok diharapkan menghasilkan perbandingan hasil yang adil dan setara.

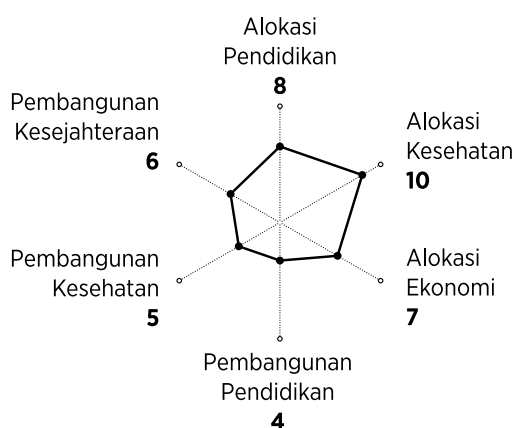
Tabel 2. Pembagian Kelompok Daerah Berdasarkan APBD per Kapita dan IPM

Rata-Rata IPM		Rata-Rata APBD per Kapita
Kelompok 2	Kelompok 1	
APBD per Kapita < Rata-rata IPM > Rata-rata	APBD per Kapita > Rata-rata IPM > Rata-rata	
Kelompok 4	Kelompok 3	
APBD per Kapita < Rata-rata IPM < Rata-rata	APBD per Kapita > Rata-rata IPM > Rata-rata	

Tahap kedua adalah penilaian efektivitas penggunaan dana untuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan di masing-masing kelompok. Tahap penilaian mencakup penilaian administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Pertama, setiap daerah harus memenuhi penilaian administratif dengan meraih opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK. Aspek penilaian kuantitatif didasarkan pada dua aspek. Aspek pertama adalah ketepatan alokasi anggaran daerah terhadap keadaan terkini daerah di setiap bidang. Sebagai contoh, salah satu input pendidikan yang penting adalah rasio guru terhadap siswa (Krueger, 2003, 1999) Rasio guru terhadap siswa berkorelasi positif dengan input pendidikan lain seperti pengeluaran pendidikan, infrastruktur pendidikan, dan kurikulum. Rasio guru yang rendah menjadi indikator rendahnya kualitas dan kuantitas input pendidikan lainnya, yang berimplikasi pada rendahnya pencapaian hasil pendidikan. Pemerintah daerah yang proporsi pengeluaran pendidikan relatif tinggi saat input pendidikan rasio guru terhadap siswa rendah dinilai menggunakan anggaran dengan tepat. Setiap daerah akan mendapatkan nilai dengan rentang 0-10 untuk ketepatan penggunaan anggaran untuk keadaan di setiap bidang.

Aspek penilaian kuantitatif kedua adalah pertumbuhan *outcome* pembangunan di setiap bidang antar tahun. Sebagai contoh, di bidang kesehatan, angka harapan hidup merupakan ukuran hasil pembangunan. Infrastruktur dan tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas mendorong angka harapan hidup yang tinggi. Setiap daerah akan mendapatkan nilai dengan rentang 0-10 bergantung pada pertumbuhan indikator bidang antar tahun. Daerah yang mengalami pertumbuhan angka harapan hidup yang tinggi mendapatkan skor yang lebih tinggi pula. Gambar 1 menjelaskan penilaian kuantitatif di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan untuk suatu daerah hipotetikal.

Grafik Penilaian kuantitatif



Penilaian aspek kualitatif didasarkan pada inovasi-inovasi daerah untuk pembangunan di masing-masing bidang.





KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN

KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KOTA MADIUN

Kota Madiun merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Letak wilayah ini strategis karena menjadi kota transit pada jalur selatan yang menghubungkan kota-kota di pulau Jawa. Di bidang pendidikan, kota Madiun memiliki fasilitas yang lengkap dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, salah satunya keberadaan Politeknik Perkeretaapian Indonesia.

DATA DASAR

Total APBD	1.221.755.866.508
Jumlah Penduduk	177.000
IPM	81
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	29%	10,0
Kesehatan	17%	5,4
Ekonomi	7%	1,3

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	5,3
Kesehatan	3,9
Kesejahteraan	5,1

TELAAH

Kota Madiun mendapat penilaian paling baik untuk indikator ketepatan alokasi APBD fungsi pendidikan pada kelompok 1 karena berhasil mempertahankan APM sebesar 88,7 persen. Jumlah dana APBD yang dialokasikan untuk bidang pendidikan tergolong besar, mencapai 29 persen.

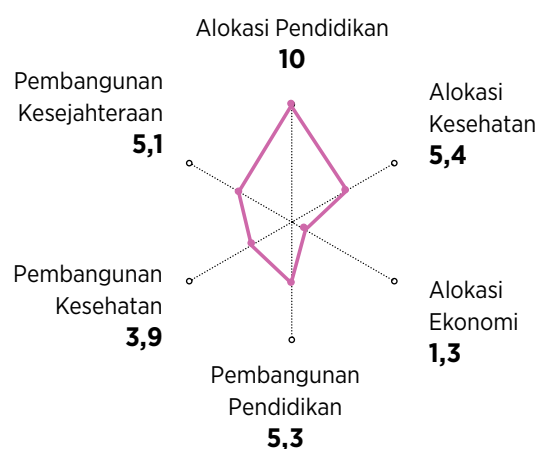
Permasalahan yang masih dihadapi adalah rasio siswa-guru bersertifikasi yang masih tinggi, yaitu 86:1. Sebagai bagian dari program Madiun Pintar, prioritas yang didorong adalah pengembangan kompetensi dan kemampuan profesional guru.



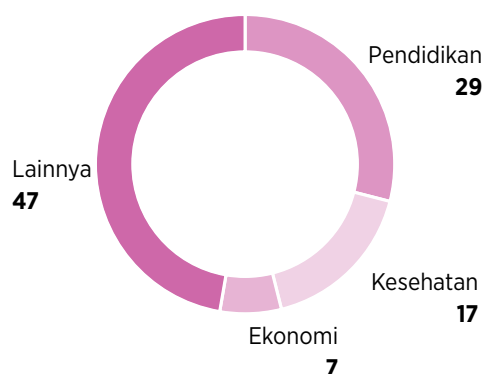
JAWA TIMUR



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KOTA SOLOK

Kota Solok merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah administrasi Kota Solok berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Padang. Sektor UKM, industri, dan agribisnis merupakan sektor-sektor dominan yang menggerakkan perekonomian kota Solok.



DATA DASAR

Total APBD	685.586.446.619
Jumlah Penduduk	69.776
IPM	78
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	29%	9,7
Kesehatan	14%	4,0
Ekonomi	8%	8,2

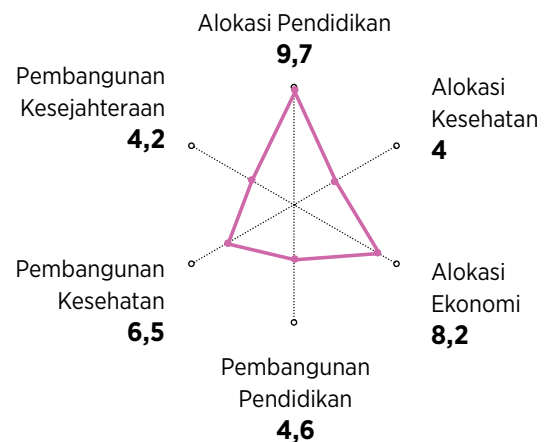
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,6
Kesehatan	6,5
Kesejahteraan	4,2

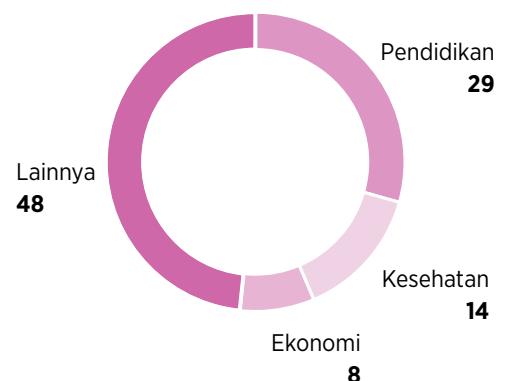
TELAAH

Kota Solok mendapat penilaian baik untuk indikator ketepatan alokasi APBD fungsi pendidikan. Alokasi jumlah anggaran kota ini terbesar kedua pada kelompok 1, yaitu sebesar 29,4 persen. Besarnya alokasi anggaran pendidikan tersebut dinilai tepat karena terdapat penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sebesar 3,3 persen. Angka Partisipasi Murni pada 2018 sebesar 82,4 persen turun menjadi 79,7 persen pada 2019. Meskipun rasio siswa-guru sudah cukup proporsional, kota Solok masih perlu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Rasio siswa-guru bersertifikasi di kota ini masih tinggi yaitu 74:1.

NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KOTA BLITAR

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, wilayah kedua terkecil dengan luas hanya 32,6 km². Secara geografis, kota ini berada di Gunung Kelud dan berjarak 160 Km dari kota Surabaya. Kota ini dikenal dengan sebutan Kota Patria dan Kota Proklamator.

DATA DASAR

Total APBD	988.750.551.568
Jumlah Penduduk	141.000
IPM	79
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	26%	9,2
Kesehatan	24%	5,9
Ekonomi	10%	9,3

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,7
Kesehatan	5,3
Kesejahteraan	5,7

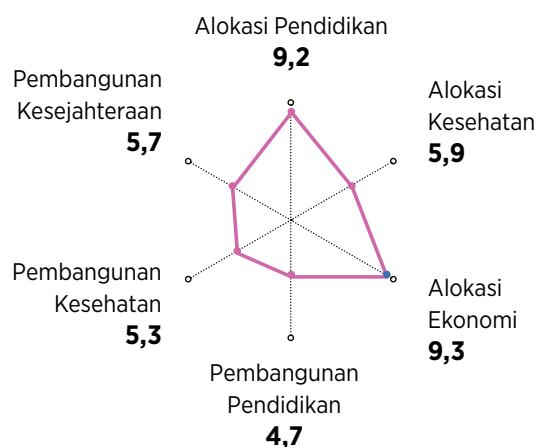
TELAAH

Kota Blitar mendapat penilaian baik untuk indikator ketepatan alokasi fungsi pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, kota ini menggelontorkan dana APBD sebesar 26,4 persen. Kota ini masih mengalami permasalahan pendidikan dengan adanya penurunan APM sebesar 2,7 persen dari 87,9 persen pada 2018 turun menjadi 85,5 persen pada 2019.

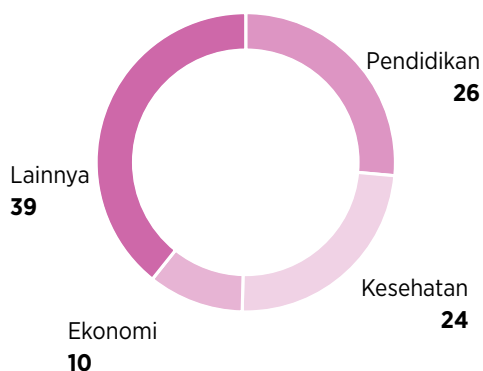
Beberapa program inovasi yang dikembangkan oleh Kota Blitar di antaranya Apresiasi Insentif Bantuan Penunjang Tugas Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS serta meluncurkan aplikasi penunjang pembelajaran online.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KOTA KARANGANYAR

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki sebuah kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Bagian Barat wilayah ini berupa dataran rendah sebagai bagian dari lembah Bengawan Solo sedangkan bagian timur berupa pegunungan sebagai bagian dari Gunung Lawu. Kabupaten Karanganyar terkenal dengan objek wisata Tawangmangu.

DATA DASAR

Total APBD	2.313.588.178.000
Jumlah Penduduk	879.078
IPM	76

Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	38%	10,0
Kesehatan	14%	1,5
Ekonomi	5%	1,8

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

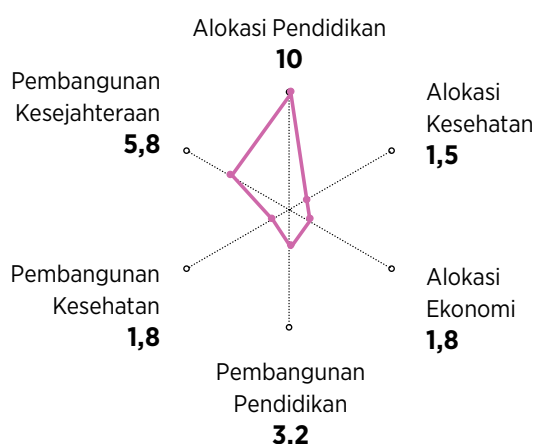
	Nilai
Pendidikan	3,2
Kesehatan	1,8
Kesejahteraan	5,8

TELAAH

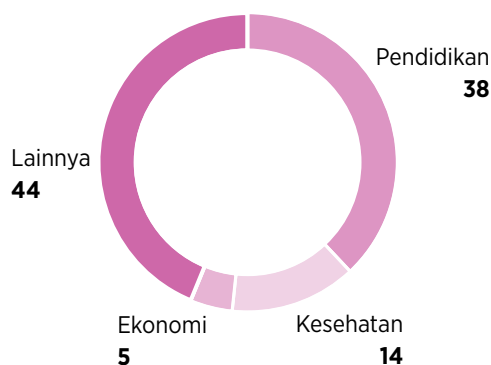
Kabupaten Karanganyar mengalokasikan anggaran yang tinggi untuk fungsi pendidikan, yaitu 38 persen. Kabupaten ini membutuhkan peningkatan pada Angka Partisipasi Murni (APM), dengan adanya penurunan sebesar 2 persen. Angka Partisipasi Murni SMP dari 80,4 persen pada 2018 turun menjadi 82 persen pada 2019. Tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatkan rasio siswa-guru yang saat ini sebesar 18:1.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KOTA AGAM

Kabupaten Agam terletak di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini terletak pada kawasan strategis karena dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Fider Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah, dan Lintas Timur Sumatera. Secara topografis berupa kawasan perbukitan/ pegunungan dan pesisir. Perekonomian kabupaten ini didominasi oleh pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura), terlihat dari kontribusi sebesar 30 persen terhadap PDRB 2019.

DATA DASAR

Total APBD	1.548.789.648.279
Jumlah Penduduk	487.914
IPM	72
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	40%	10,0
Kesehatan	15%	1,3
Ekonomi	5%	1,7

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

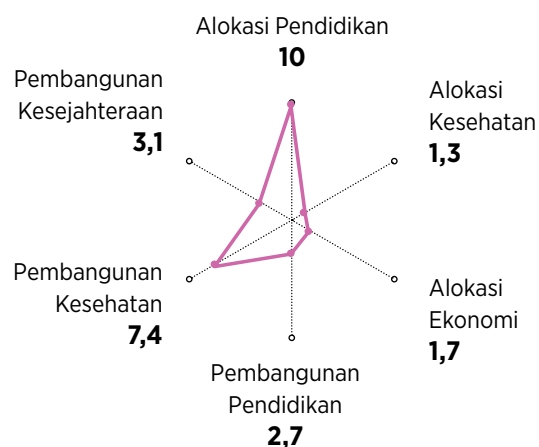
	Nilai
Pendidikan	2,7
Kesehatan	7,4
Kesejahteraan	3,1

TELAAH

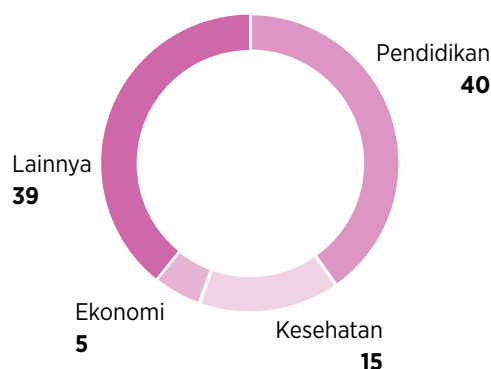
Alokasi anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Agam adalah salah satu yang tertinggi pada kelompok 2, yakni sebesar 40,2 persen. Dengan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, rasio siswa dan guru di wilayah ini sudah cukup proporsional dengan perbandingan 13:1. Namun demikian, kabupaten ini masih mengalami permasalahan pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Pada 2019, kabupaten ini mengalami penurunan APM yang cukup tinggi di kelompoknya yakni sebesar 2,9 persen.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini dibelah dua oleh aliran sungai Brantas menjadi Blitar Utara dan Blitar Selatan. Blitar Utara merupakan dataran rendah yang subur dan beriklim basah sedangkan Blitar Selatan berupa lahan kering. Perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar ditunjang oleh sektor agraris. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi terhadap 32,3 persen PDRB 2019.

DATA DASAR

Total APBD	2.488.790.000.376
Jumlah Penduduk	1.158.000
IPM	71
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	37%	9,8
Kesehatan	17%	1,3
Ekonomi	5%	1,7

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

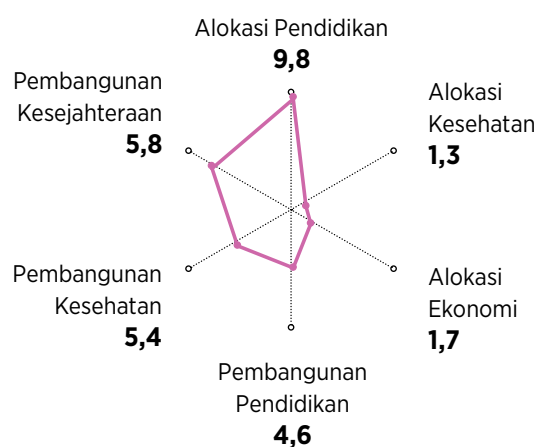
	Nilai
Pendidikan	4,6
Kesehatan	5,4
Kesejahteraan	7,9

TELAAH

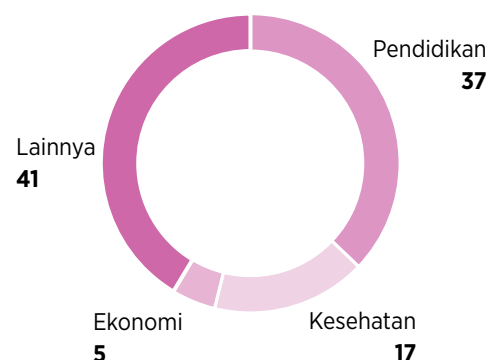
Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 37,1 persen dari total APBD 2019. Alokasi ini dinilai sudah tepat karena dengan jumlah anggaran yang tersedia, pemerintah kabupaten ini mampu mempertahankan Angka Partisipasi Murni. Pada 2019, Angka Partisipasi Murni SMP sebesar 81,6 persen mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 81,2 persen. Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan rasio guru bersertifikasi dan siswa yang masih tinggi yakni 1:79.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

Kabupaten Pulang Pisau terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten tersebut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas pada 2002. Mayoritas masyarakat kabupaten tersebut bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dikarenakan lebih dari separuh luas wilayahnya merupakan hutan. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB 2019 mencapai 35,8 persen.

DATA DASAR

Total APBD	984.260.620.500
Jumlah Penduduk	126.657
IPM	68
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	30%	10,0
Kesehatan	11%	3,3
Ekonomi	7%	3,2

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,9
Kesehatan	1,6
Kesejahteraan	8,7

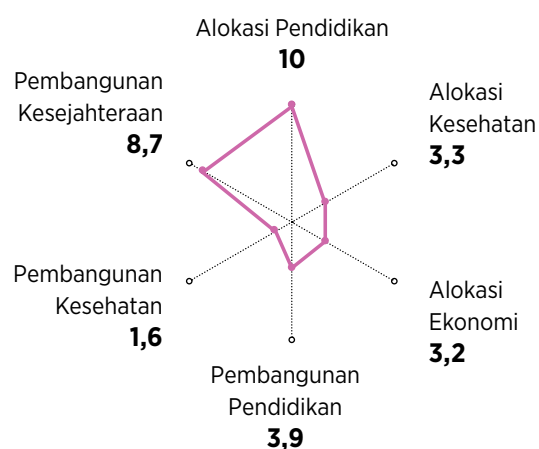
TELAAH

Alokasi anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau salah satu yang tertinggi pada kelompok 3. Kabupaten Pulang Pisau mengalokasikan sebesar 30,1 persen dari total anggaran untuk bidang pendidikan. Besarnya alokasi ini dinilai tepat dengan rasio guru terhadap siswa yang sudah cukup proporsional, yaitu 1:13.

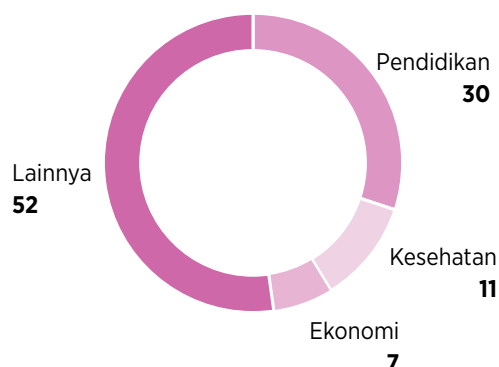
Permasalahan pendidikan yang dihadapi terkait dengan APM yang mengalami penurunan sebesar 2,7 persen. Pada 2019, APM SMP sebesar 71 persen turun dari APM 2018 yang sebesar 73 persen.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada 2000. Kabupaten ini termasuk wilayah perbatasan antar negara karena posisi geografisnya berada di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Mindanao yang terletak di Filipina. Secara topografis, wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagian besar terdiri dari pegunungan dan dikelilingi oleh lautan.

DATA DASAR

Total APBD	901.251.741.394
Jumlah Penduduk	91.599
IPM	69
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	23%	9,7
Kesehatan	17%	5,9
Ekonomi	8%	8,3

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,3
Kesehatan	5,5
Kesejahteraan	1,3

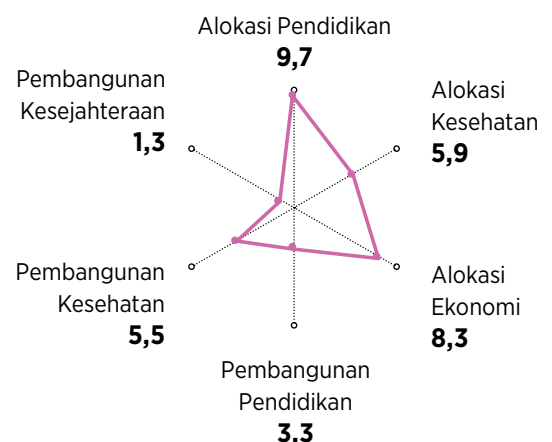
TELAAH

Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki penilaian yang baik dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan Kabupaten ini mengalokasikan sebesar 22,7 persen dari belanja daerah untuk bidang pendidikan.

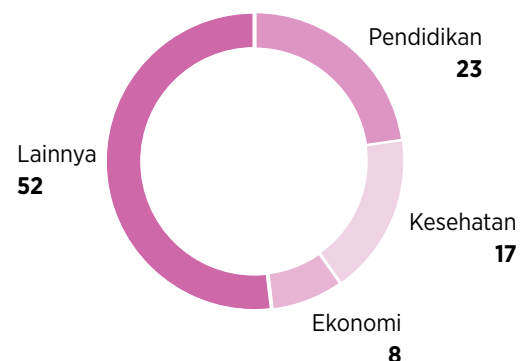
Permasalahan pendidikan penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) yang cukup tinggi sebesar 5,8 persen. APM SMP sebesar 76,3 persen pada 2018 turun menjadi 71,8 persen pada 2019. Dengan rasio guru terhadap siswa yang cukup baik yakni 1:11, pemerintah masih perlu meningkatkan jumlah guru bersertifikasi dengan rasio terhadap siswa.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini terletak di Pulau Buton, pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi. Kabupaten ini memiliki potensi pertambangan yang kaya dan beragam, dengan kegiatan utama penghasil aspal. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian, mencapai 39,8 persen terhadap PDRB 2019.

DATA DASAR

Total APBD	758.472.345.261
Jumlah Penduduk	101.618
IPM	66
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	28%	9,4
Kesehatan	13%	1,0
Ekonomi	6%	1,5

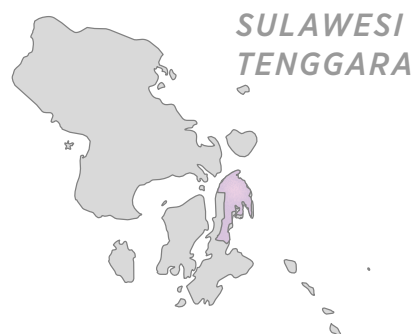
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	5,9
Kesehatan	5,5
Kesejahteraan	4,2

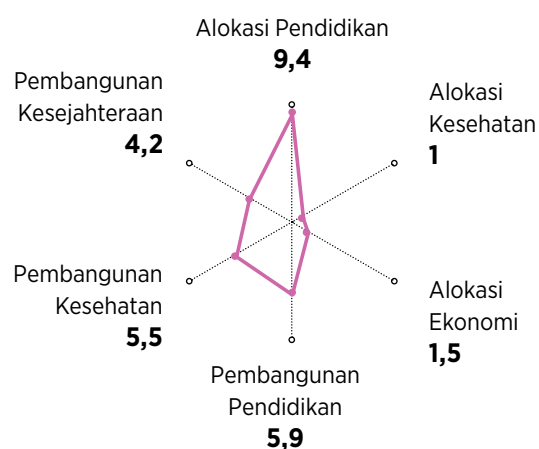
TELAAH

Kabupaten Buton dinilai sudah tepat dalam mengalokasikan APBD untuk fungsi pendidikan. Kota ini mengalokasikan sebesar 28,2 persen dari belanja daerah. Besarnya proporsi tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di kelompok 3.

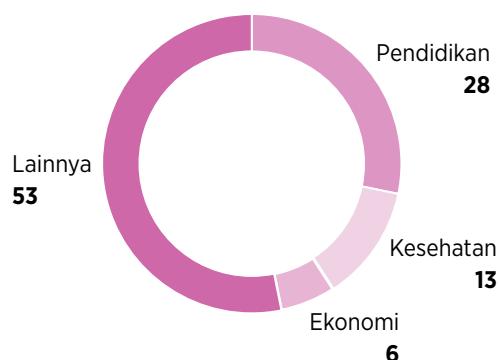
Dengan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih rendah dari rata-rata nasional, alokasi anggaran ini dapat ditujukan untuk mengoptimalkan Angka Partisipasi Murni (APM) yang sudah mencapai 83,8 persen dan rasio guru bersertifikasi dan siswa yang mencapai 1:38 pada tahun 2019.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KOTA GUNUNG SITOLI

Kota Gunungsitoli terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kota tersebut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias pada 2008. Perekonomian kota tersebut ditopang oleh sektor perdagangan (jasa) dengan kontribusi terhadap PDRB 2019 sebesar 25 persen. Kota Gunungsitoli menjadi gerbang utama arus lalu lintas logistik antara Pulau Nias dengan daerah lainnya.

DATA DASAR

Total APBD	900.840.799.374
Jumlah Penduduk	140.927
IPM	69
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

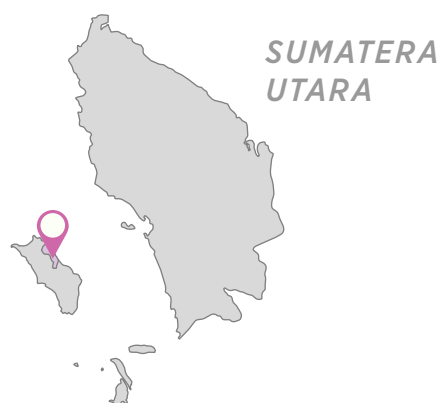
	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	57%	10,0
Kesehatan	5%	2,9
Ekonomi	3%	2,8

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

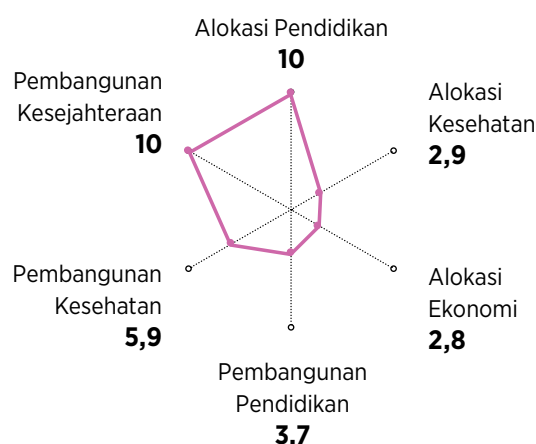
	Nilai
Pendidikan	3,7
Kesehatan	5,9
Kesejahteraan	10,0

TELAAH

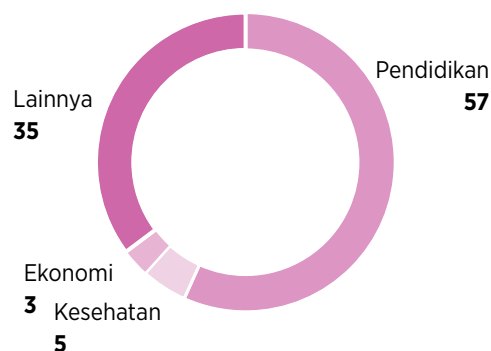
Kota Gunungsitoli mendapat penilaian baik untuk indikator ketepatan alokasi APBD fungsi pendidikan. Jumlah anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah mencapai 56,7 persen, besarnya proporsi tersebut menjadi salah satu yang tertinggi pada kelompok 4. Anggaran ini dapat ditujukan untuk meningkatkan rasio guru dan siswa yang saat ini sebesar 15:1. Anggaran tersebut juga perlu diprioritaskan untuk memperbaiki Angka Partisipasi Murni (APM) yang mengalami penurunan dari 77,8 persen pada 2018 menjadi 76,7 persen pada 2019.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Topografis kabupaten tersebut bervariasi. Di sebelah selatan dataran tinggi, sedangkan sebelah utara dataran rendah. Aktivitas ekonomi utama ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 22,6 persen. Majalengka terkenal sebagai salah satu sentra penghasil padi, jagung, dan bawang merah di Jawa Barat.



DATA DASAR

Total APBD	3.361.968.084.313
Jumlah Penduduk	1.199.300
IPM	68
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	48%	9,6
Kesehatan	12%	1,6
Ekonomi	3%	3,3

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

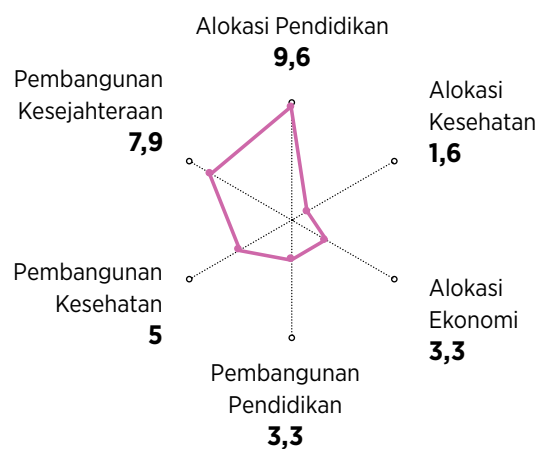
	Nilai
Pendidikan	3,3
Kesehatan	5,0
Kesejahteraan	7,9

TELAAH

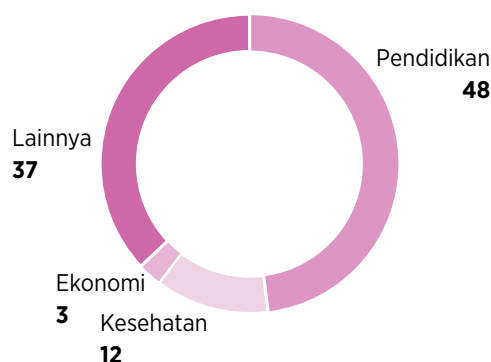
Kabupaten Majalengka mendapat penilaian baik untuk indikator ketepatan alokasi APBD fungsi pendidikan.

Dalam hal kualifikasi tenaga pengajar, proporsi ini dapat ditujukan untuk meningkatkan rasio guru bersertifikasi terhadap siswa yang masih tinggi yaitu 1:65. Kabupaten ini melakukan inovasi untuk mengatasi permasalahan pendidikan melalui penyediaan buku pelajaran secara gratis untuk pemerataan akses pendidikan ke seluruh peserta didik.

NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Bagian utara Kabupaten Blora merupakan rangkaian Pegunungan Kapur Utara sedangkan bagian selatan merupakan perbukitan kapur bagian dari Pegunungan Kendeng. Blora dilalui dua sungai utama yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi. Separuh dari wilayah merupakan kawasan hutan dan memiliki cadangan minyak cukup besar di Blok Cepu.

DATA DASAR

Total APBD	2.215.590.593.677
Jumlah Penduduk	862.110
IPM	69
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	36%	9,0
Kesehatan	16%	8,1
Ekonomi	5%	3,1

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,1
Kesehatan	1,9
Kesejahteraan	6,7

TELAAH

Kabupaten Blora mendapat penilaian baik untuk indikator ketepatan alokasi anggaran fungsi pendidikan. Pemerintah Blora menggelontorkan anggaran sebesar 35,7 persen.

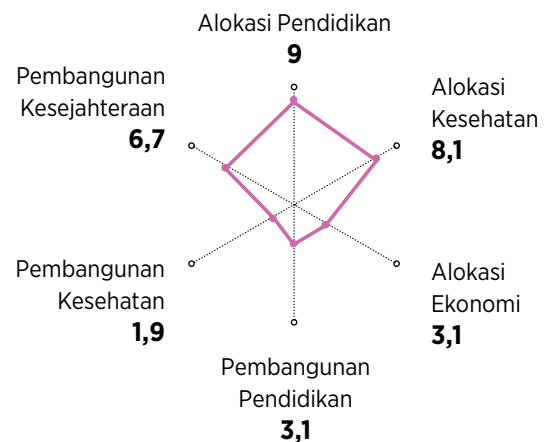
Daerah ini menghadapi tantangan untuk memperbaiki Angka Partisipasi Murni (APM) SMP yang mengalami penurunan dari 76,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2019. Permasalahan lain yang dihadapi adalah untuk meningkatkan rasio guru dan siswa dengan perbandingan saat ini 1:18, juga pada rasio guru bersertifikasi terhadap siswa yang masih tinggi mencapai 1:68.



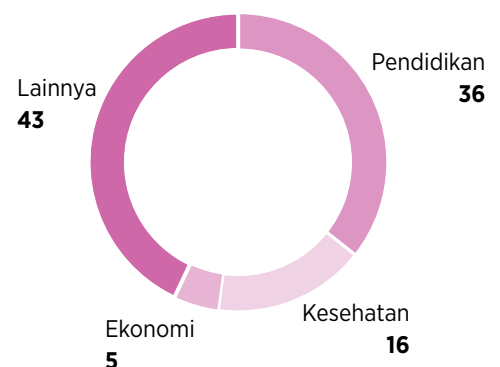
JAWA
TENGAH



NILAI



PROPORSI APBD %





The background is a solid teal color with a complex pattern of lighter teal lines and circles. These elements form a network-like structure, with some lines intersecting at circular nodes. The pattern is more dense on the left side and fades slightly towards the right.

PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN MIMIKA

Kabupaten Mimika yang beribu kota di kota Mimika merupakan bagian dari wilayah Provinsi Papua. Kabupaten Mimika pada awalnya berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Fakfak. Di Kabupaten ini terletak tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia. Meskipun mengalami perlambatan, sektor pertambangan dan penggalian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB 2019 yang mencapai 75,9 persen.

DATA DASAR

Total APBD	3.099.000.000.000
Jumlah Penduduk	215.493
IPM	74
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	18%	3,8
Kesehatan	12%	2,0
Ekonomi	20%	7,9

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	4,8
Kesejahteraan	3,1

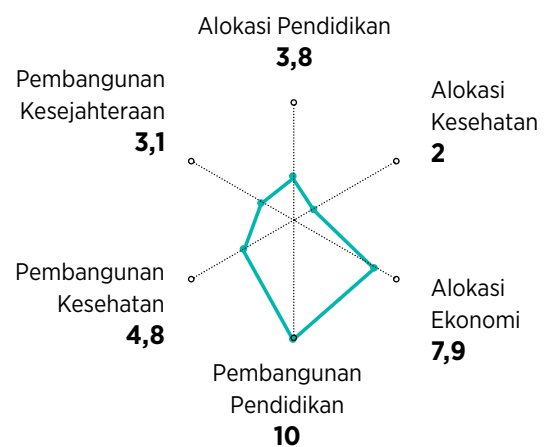
TELAAH

Kabupaten Mimika mendapatkan nilai terbaik pada kategori pembangunan bidang pendidikan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan kabupaten ini mendapat skor sempurna 10. Dengan alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 18,5 persen, Kabupaten Mimika memiliki rata-rata rasio siswa-guru yang cukup proporsional yaitu 18:1.

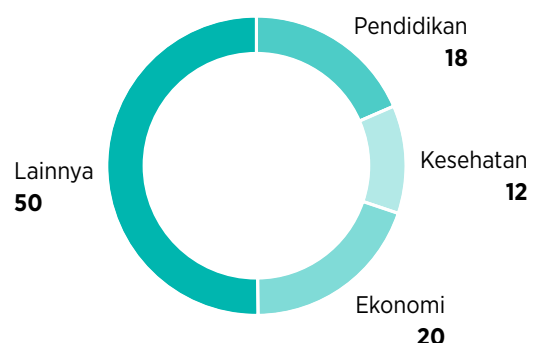
Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) kabupaten ini cukup tinggi yang mencapai 36,2 persen. Tingkat pertumbuhan APM tersebut paling tinggi di Kelompok 1. Angka Partisipasi Murni SMP pada 2018 sebesar 39 persen naik menjadi 53,1 persen pada 2019.



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Wilayah yang beribu kota Sentani ini baru dimekarkan pada tahun 2003. Secara geografis terdiri atas pegunungan dan sungai serta pesisir pantai. Karenanya banyak penduduk asli yang bermata pencaharian dari sumber daya alam. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 18,6 persen terhadap PDRB 2019.

DATA DASAR

Total APBD	1.430.557.360.391
Jumlah Penduduk	128.587
IPM	72
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	20%	3,2
Kesehatan	12%	4,9
Ekonomi	9%	8,1

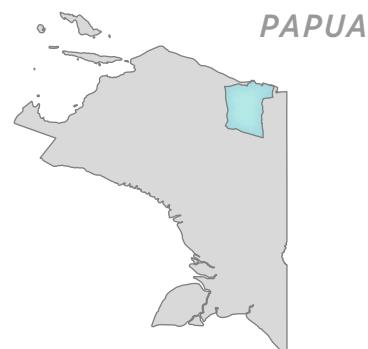
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	6,3
Kesejahteraan	4,5

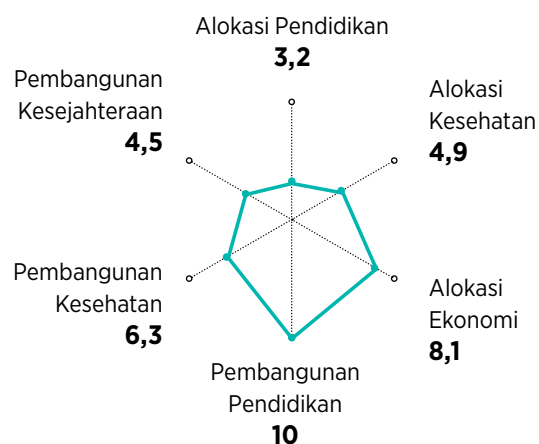
TELAAH

Kabupaten Jayapura mendapat penilaian yang sangat baik dalam hal pembangunan pendidikan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Jayapura mendapat skor sempurna 10. Output dari daerah ini dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) hingga 31,7 persen pada 2019.

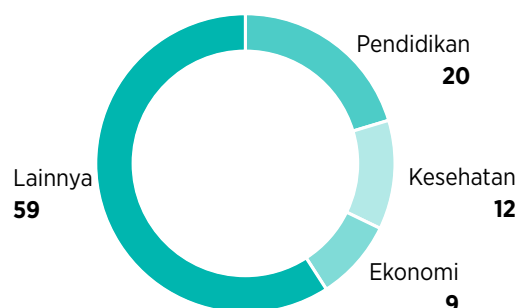
Kabupaten ini mampu mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20,4 persen sesuai dengan ketentuan nasional. Dalam hal perbandingan jumlah antara siswa dan guru sudah tergolong cukup proporsional yaitu 1:17.



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Wilayah ini berupa gugusan pulau yang berada di sebelah utara daratan Pulau Papua dan berseberangan langsung dengan Samudera Pasifik. Posisi kabupaten ini strategis untuk membangun kawasan pariwisata dan perikanan di mana pelabuhan lautnya dapat mengakses langsung negara di kawasan Asia Pasifik dan Australia.

DATA DASAR

Total APBD	1.398.847.885.801
Jumlah Penduduk	148.404
IPM	73
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	18%	3,8
Kesehatan	23%	9,3
Ekonomi	7%	1,6

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

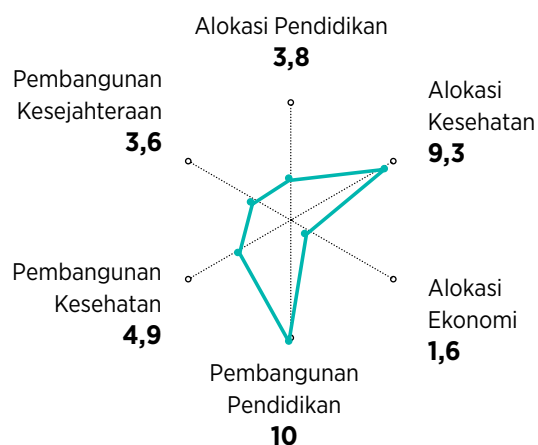
	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	4,9
Kesejahteraan	3,6

TELAAH

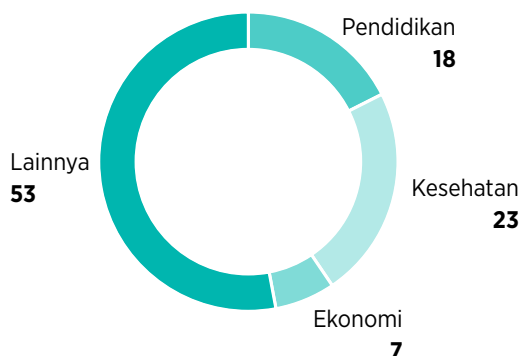
Kabupaten Biak Numfor mencatatkan pembangunan bidang pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain pada kelompok 1. Kabupaten ini mendapatkan skor tertinggi karena dapat menaikkan APM sebesar 31,3 persen. Dengan rasio guru bersertifikasi terhadap siswa yang tergolong cukup baik yaitu 35:1, kabupaten ini masih perlu memperhatikan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan agar dapat bersaing dengan daerah lainnya.



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KOTA JAYAPURA

Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua yang terletak di teluk Jayapura dan menjadi pusat pemukiman terpadat di Papua. Topografis daerah kota ini cukup bervariasi mulai dari daratan yang landai hingga berbukit-bukit dan pegunungan. Berdasarkan sistem perkotaan nasional, kota Jayapura ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pada 2019, kontribusi kota Jayapura dalam perekonomian Provinsi Papua mencapai 17,2 persen.

DATA DASAR

Total APBD	1.369.396.976.434
Jumlah Penduduk	297.775
IPM	80
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	25%	3,5
Kesehatan	10%	3,7
Ekonomi	7%	8,0

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	5,6
Kesejahteraan	2,3

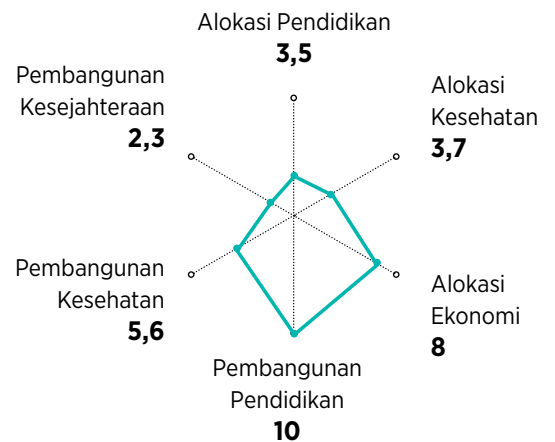
TELAAH

Kota Jayapura mendapatkan nilai terbaik pada kategori pembangunan bidang pendidikan. Daerah ini berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni sebesar 23,1 persen dari 58,5 persen pada 2018 menjadi 72 persen pada 2019.

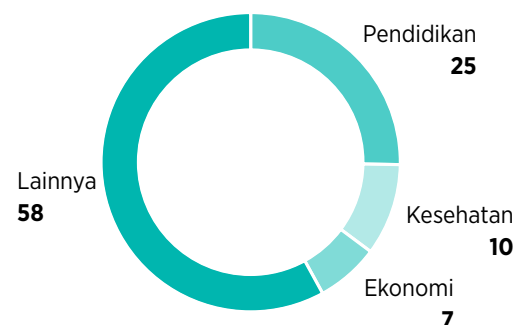
Keberhasilan Kota Jayapura ditunjang oleh alokasi APBD untuk fungsi pendidikan sebesar 25,3 persen, lebih tinggi dari wilayah pada kelompoknya. Kota Jayapura masih perlu meningkatkan rata-rata rasio guru terhadap siswa yang saat ini sebesar 1:19.



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

KABUPATEN MALUKU TENGAH

Kabupaten Maluku Tengah terletak di Provinsi Maluku dan beribu kota di Masohi. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Maluku. Sebagian besar wilayah daratannya berada di Pulau Seram dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Dengan dikelilingi oleh laut yang luas, iklim di wilayah ini berupa iklim laut tropis.



DATA DASAR

Total APBD	1.827.683.912.000
Jumlah Penduduk	372.529
IPM	71
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	34%	7,9
Kesehatan	17%	1,1
Ekonomi	5%	2,0

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

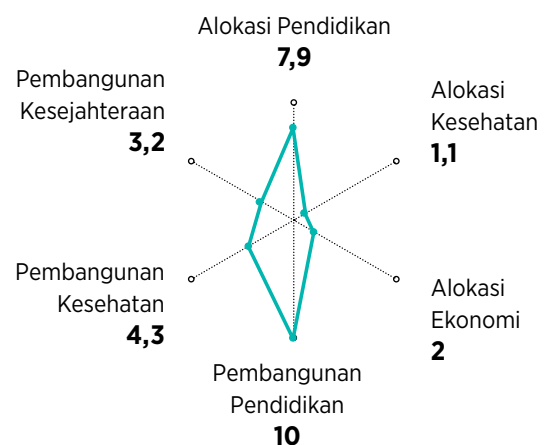
	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	4,3
Kesejahteraan	3,2

TELAAH

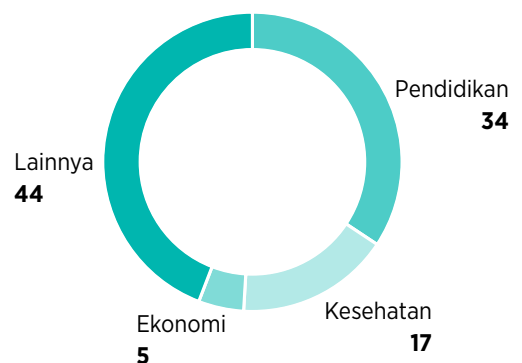
Maluku Tengah menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penilaian yang baik dalam hal pembangunan pendidikan. Keberhasilan kabupaten di bidang pendidikan dicapai dengan pertumbuhan APM sebesar 11,1 persen. Pada 2018, APM kabupaten ini 72,7 persen naik menjadi 80,8 persen pada 2019.

Pencapaian kabupaten ini juga terlihat dari rata-rata rasio siswa-guru yang proporsional yaitu 12:1. Dengan jumlah dana APBD yang berada di bawah rata-rata nasional, Kabupaten Maluku Tengah berhasil mengalokasikan anggaran dana pendidikan sebesar 34,3 persen.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU

Kota Kotamobagu terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini diresmikan pada 2007 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Pertanian padi dan jagung merupakan sumber pendapatan utama penduduk di kota ini. PDRB Kota Kotamobagu paling banyak disumbang oleh sektor jasa.

DATA DASAR

Total APBD	717.574.906.904
Jumlah Penduduk	126.198
IPM	73
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	20%	2,8
Kesehatan	25%	10,0
Ekonomi	5%	2,2

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	7,6
Kesehatan	8,0
Kesejahteraan	5,5

TELAAH

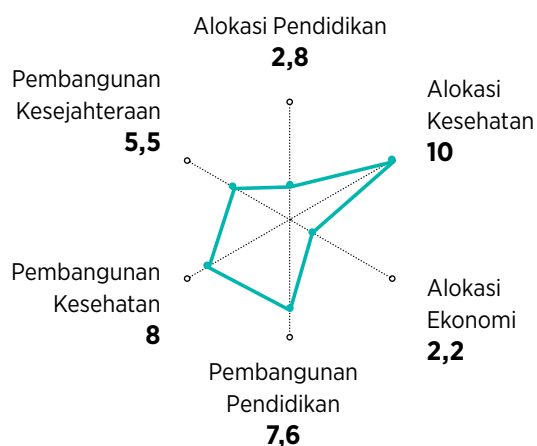
Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan Kota Kotamobagu mendapat skor 7,6 dari skala 1-10. Kota ini mendapatkan salah satu skor tertinggi pada kelompok 2. Anggaran fungsi pendidikan yang digelontorkan sebesar 19,6 persen dari total APBD 2019. Dengan jumlah dana APBD yang berada di bawah rata-rata nasional, Kota Kotamobagu berhasil menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 5,9 persen. Pada 2019, kabupaten ini mencapai 79,4 meningkat dari 75 persen pada tahun sebelumnya. Saat ini rasio guru dan siswa masih tinggi yakni 1:20, artinya satu guru perlu mengajar cukup banyak siswa.



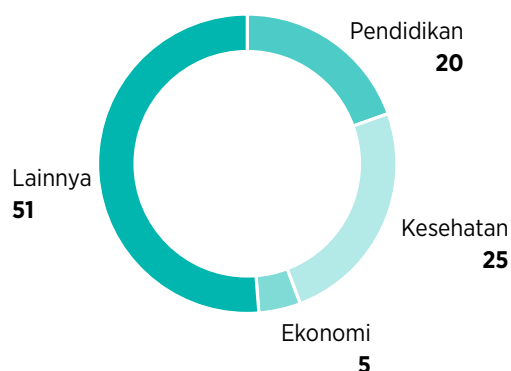
SULAWESI UTARA



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE

Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Wilayah ini terletak di pesisir Teluk Cenderawasih yang merupakan salah satu Taman Laut Nasional terbesar di Indonesia. Dua sektor terbesar yang mendorong perekonomian kabupaten ini adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian, berturut-turut 16,5 dan 18,9 persen dengan potensi emas sebagai bahan tambang utama.

DATA DASAR

Total APBD	1.222.520.819.000
Jumlah Penduduk	147.921
IPM	69
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	17%	8,2
Kesehatan	18%	9,2
Ekonomi	12%	6,2

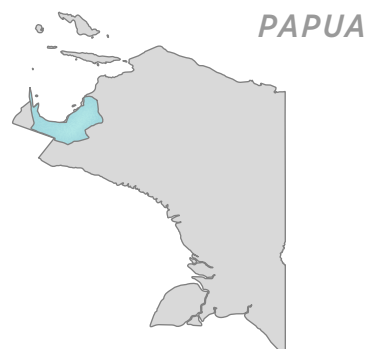
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	4,5
Kesejahteraan	5,2

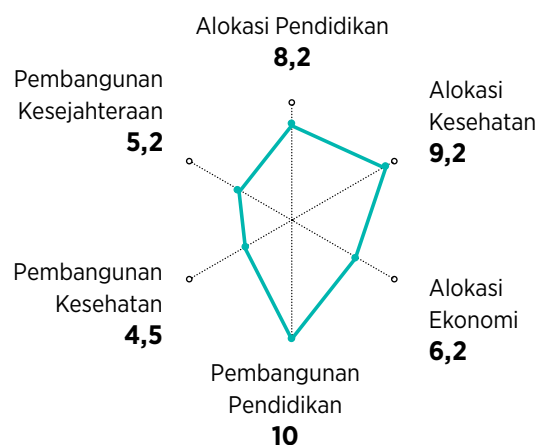
TELAAH

Kabupaten Nabire mendapat nilai terbaik pada kategori pembangunan bidang pendidikan. Nabire mendapat skor sempurna 10 pada kelompok 3. Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran APBD fungsi pendidikan sebesar 17,3 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.

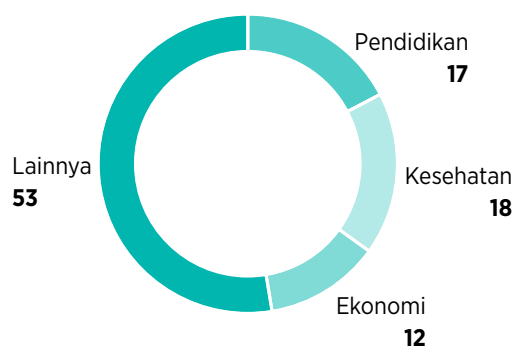
Pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM) kabupaten ini dinilai sangat baik dengan pertumbuhan hingga 47,7 persen dari 2018 ke tahun 2019. Kabupaten Nabire berhasil meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, dari APM sebesar 44,6 persen pada 2018 menjadi 65,9 persen pada 2019.



NILAI

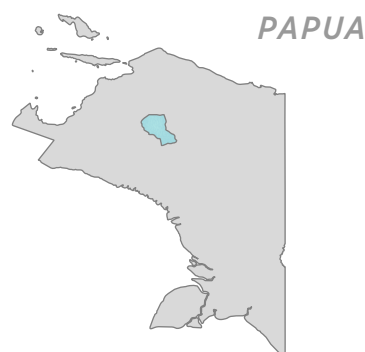


PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN PUNCAK JAYA

Kabupaten Puncak Jaya merupakan kabupaten di Provinsi Papua. Secara geografis kabupaten ini berada di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan dan pegunungan. Sesuai dengan kondisi geografisnya, sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar pada perekonomian.



DATA DASAR

Total APBD	1.454.229.462.884
Jumlah Penduduk	126.113
IPM	48
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	9%	3,9
Kesehatan	12%	1,9
Ekonomi	8%	1,3

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

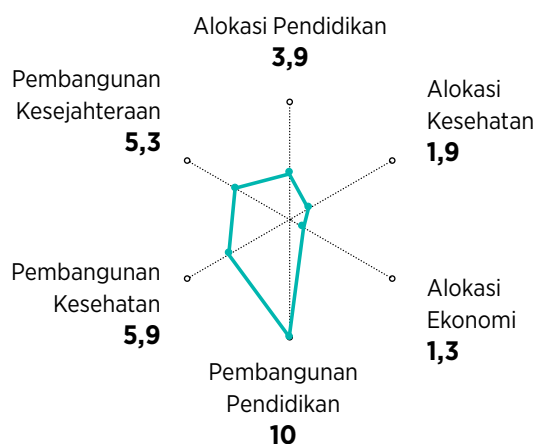
	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	5,9
Kesejahteraan	5,3

TELAAH

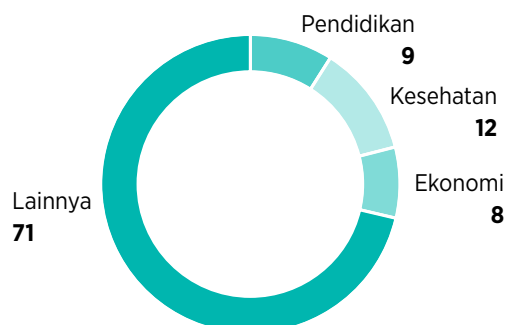
Kabupaten Puncak Jaya mendapat nilai terbaik pada kategori pembangunan bidang pendidikan. Kabupaten ini mendapat skor 10 pada kelompok 3. Kabupaten ini masih mengalami permasalahan pada keterbatasan sarana prasarana dan ketersediaan guru tetap.

Namun, Puncak Jaya dinilai berhasil dalam pembangunan bidang pendidikan karena mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni dengan pencapaian pertumbuhan sebesar 46,7 persen. Pada 2019, kabupaten ini memiliki APM sebesar 38,1 persen naik menjadi 46,7 persen pada 2019.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SARMI

Sarmi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Sarmi merupakan singkatan dari nama suku-suku besar yaitu Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Masyarakat menggantungkan hidup pada potensi alam berupa tanaman pangan dan hortikultura. Komoditas yang menembus pasar luar daerah adalah kakao dan kopra. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 31,9 persen terhadap PDRB tahun 2019.

DATA DASAR

Total APBD	1.126.344.241.160
Jumlah Penduduk	39.406
IPM	63
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

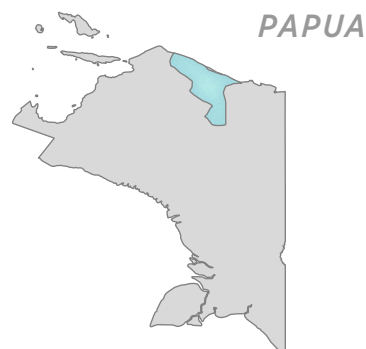
	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	12%	1,4
Kesehatan	10%	1,8
Ekonomi	7%	1,2

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

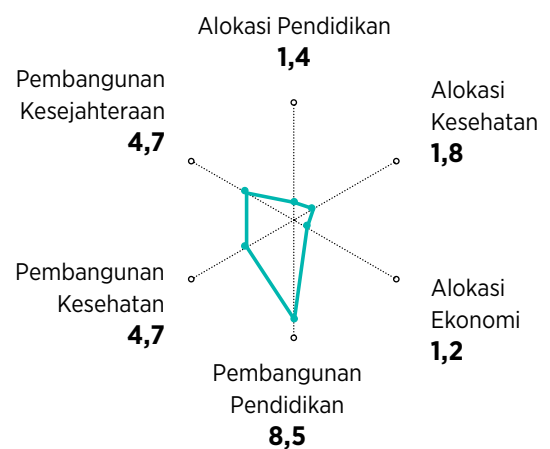
	Nilai
Pendidikan	8,5
Kesehatan	4,7
Kesejahteraan	4,7

TELAAH

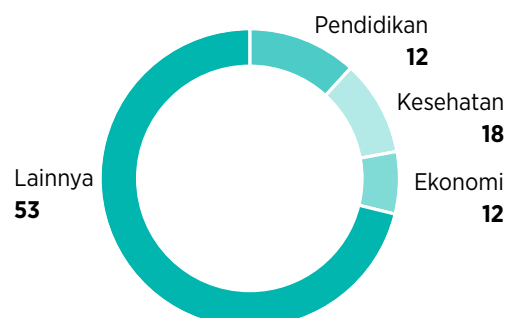
Sebagai Kabupaten dengan IPM berada di bawah rata-rata nasional, Kabupaten Sarmi mendapatkan skor 10 untuk keberhasilan pembangunan pendidikan. Kabupaten ini berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dari 40,9 persen pada 2018 menjadi 49,3 persen pada 2019. Rasio antara guru dan siswa di kabupaten ini juga dinilai cukup proporsional, yakni 1:15. Namun demikian, kabupaten ini masih perlu mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan lebih tinggi agar sesuai dengan ketentuan nasional sebesar 20 persen.



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, beribukotakan Larantuka. Wilayah ini merupakan daerah kepulauan dengan empat pulau besar. Sebagian besar wilayahnya merupakan lautan yang dimanfaatkan sebagai mata pencaharian masyarakat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan sebesar 27,3 terhadap PDRB tahun 2019.



NUSA TENGGARA TIMUR



DATA DASAR

Total APBD	1.139.607.931.400
Jumlah Penduduk	253.818
IPM	64

Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	25%	3,5
Kesehatan	19%	5,3
Ekonomi	5%	2,0

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

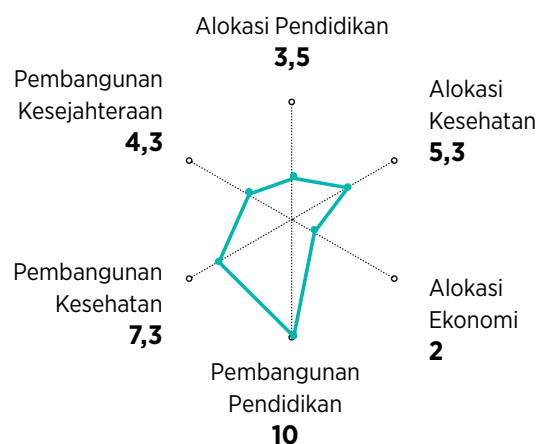
	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	7,3
Kesejahteraan	4,3

TELAAH

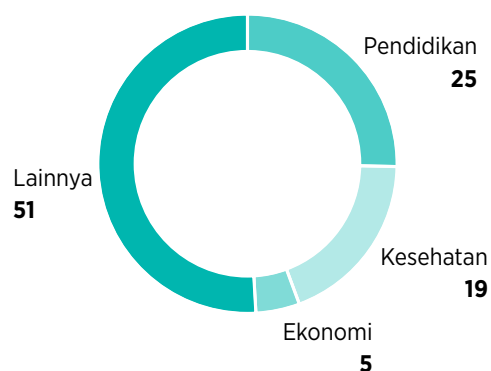
Kabupaten Flores Timur mendapat nilai terbaik pada kategori pembangunan bidang pendidikan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan kabupaten ini mendapat skor sempurna 10 pada kelompok 4.

Output dari daerah ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Flores Timur yang mengalami peningkatan sebesar 15,2 persen. Rata-rata rasio siswa terhadap guru di kabupaten ini juga cukup proporsional yakni 15:1.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terdiri dari tiga pulau besar dan enam pulau kecil. Secara topografis, kabupaten ini bergunung-gunung yang sesuai untuk pengembangan tanaman produksi. Struktur ekonomi pada 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 31 persen terhadap PDRB.

DATA DASAR

Total APBD	1.174.708.333.649
Jumlah Penduduk	204.380
IPM	61
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	20%	4,6
Kesehatan	17%	5,3
Ekonomi	12%	8,6

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	9,5
Kesejahteraan	3,5

TELAAH

Kabupaten Alor mencatatkan pembangunan bidang pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain pada kelompok 4. Seperti Kabupaten Flores Timur, pembangunan bidang Pendidikan Kabupaten Alor mendapat skor 10.

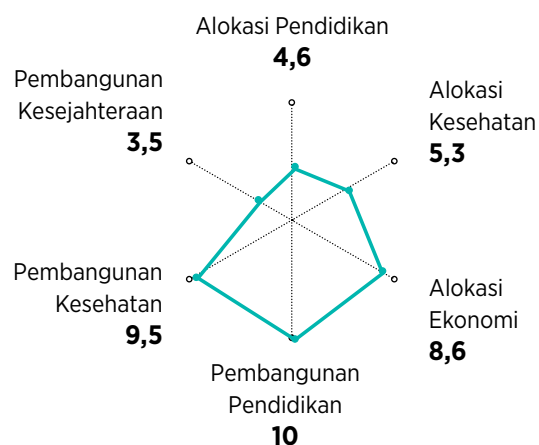
Kabupaten ini berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dengan pertumbuhan hingga 10,7 persen. APM pada 2018 sebesar 72,7 persen berhasil naik menjadi 80,5 persen pada 2019. Rasio guru-siswa Kabupaten Alor juga proporsional dengan perbandingan sebesar 1:10.



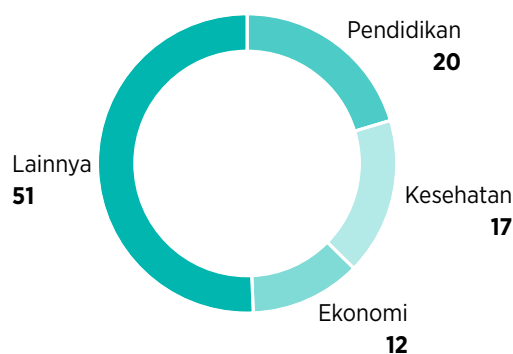
NUSA TENGGARA TIMUR



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian Barat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini merupakan satu-satunya sentra produksi garam di pulau Sulawesi. Kabupaten ini dikenal dengan budidaya ikan bandeng dan pohon lontar sebagai bahan produksi gula merah. Sehingga kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian, pada 2019 mencapai 44,2 persen terhadap PDRB.

DATA DASAR

Total APBD	1.402.923.255.000
Jumlah Penduduk	361.793
IPM	64
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	30%	5,9
Kesehatan	24%	9,0
Ekonomi	4%	2,0

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

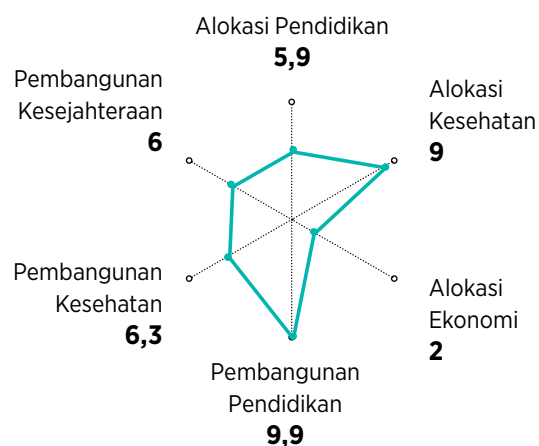
	Nilai
Pendidikan	9,9
Kesehatan	6,3
Kesejahteraan	6,0

TELAAH

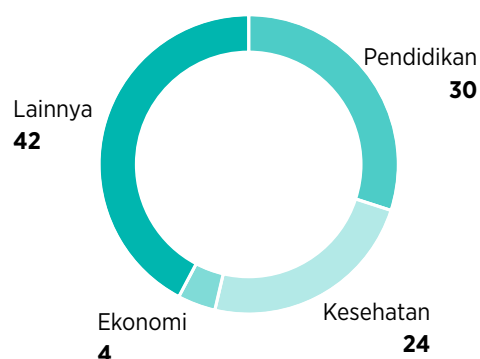
Kabupaten Jeneponto mendapatkan nilai cukup baik pada kategori pembangunan bidang pendidikan. Daerah ini mencatatkan skor hampir sempurna 9,9 dari skala 1-10. Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Jeneponto dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) yang mencapai 10,4 persen. Pada 2019, APM kabupaten ini naik dari 69,9 persen menjadi 77,2 persen. Rata-rata rasio siswa-guru sudah cukup proporsional 12:1 sedangkan rasio guru bersertifikasi terhadap siswa sebesar 1:34.



NILAI



PROPORSI APBD %







KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN

KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KOTA MOJOKERTO

Kota Mojokerto merupakan kota di Provinsi Jawa Timur dan menjadi bagian dari kawasan metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila. Sektor ekonomi yang paling dominan secara kontribusi adalah sektor perdagangan dan industri pengolahan.

DATA DASAR

Total APBD	999.539.581.760
Jumlah Penduduk	128.000
IPM	77,96

Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	22%	2,2
Kesehatan	27%	10,0
Ekonomi	6%	1,6

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,9
Kesehatan	4,6
Kesejahteraan	7,2

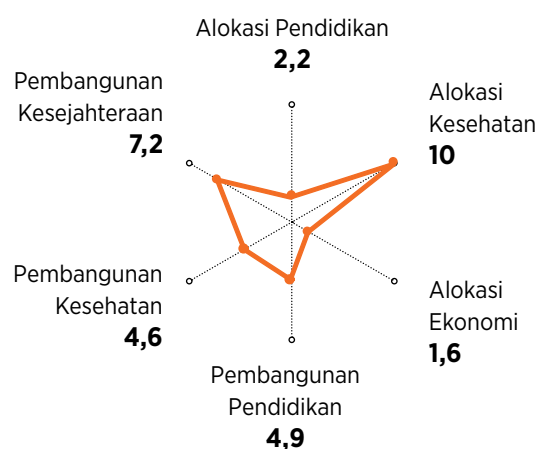
TELAAH

Kota Mojokerto mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 27 persen dari total APBD. Pada 2018, kota ini memiliki 1.367 SDM Kesehatan dengan rasio per jumlah penduduk sebesar 1,07 persen sehingga masih perlu ditingkatkan. Angka harapan hidup Kota Mojokerto sebesar 73, yaitu berada di atas rata-rata nasional.

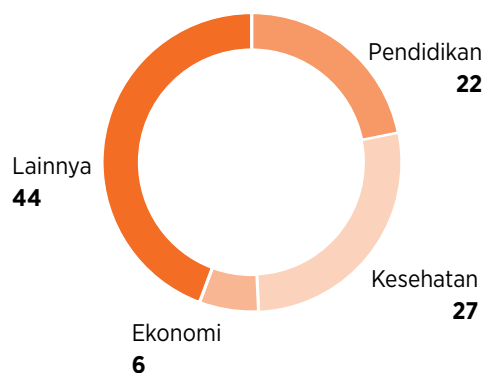
Dinas Kesehatan Kota Mojokerto mengembangkan layanan Gerbang Informasi Terpadu dan Terintegrasi (Gayatri) yang masuk dalam Top 45 Pelayanan Publik Tingkat Nasional. Program ini memanfaatkan 1.625 kader kesehatan untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Kabupaten Biak Numfor merupakan kota di Provinsi Papua. Kabupaten ini merupakan sebuah pulau tersendiri dengan dua pulau utama yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor. Dengan posisi yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, kabupaten ini berhubungan dengan negara-negara kawasan Pasifik, Australia, dan Filipina, sehingga strategis untuk membangun kawasan industri dan pariwisata.

DATA DASAR

Total APBD	1.398.847.885.801
Jumlah Penduduk	148.404
IPM	72,57
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	18%	3,8
Kesehatan	23%	9,3
Ekonomi	7%	1,6

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	4,9
Kesejahteraan	3,6

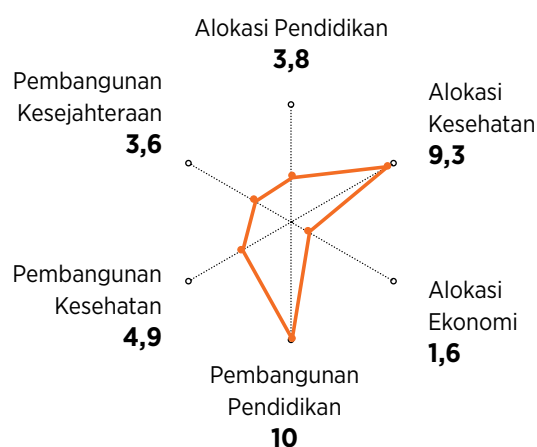
TELAAH

Kabupaten Biak Numfor mendapatkan skor 9,3 karena mampu mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 23% dari total APBD ketika pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan pembangunan. Kabupaten Biak Numfor masih membutuhkan lebih banyak tenaga kesehatan.

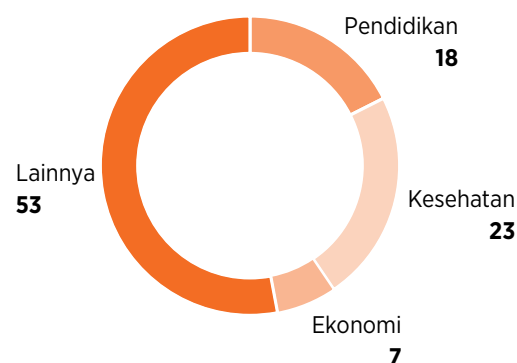
Kabupaten ini mulai mengintegrasikan pelayanan kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan nasional untuk memudahkan pelayanan pasien. Upaya ini dalam rangka mengimplementasikan amanat UU No. 40/2004 dengan memberikan kemudahan pelayanan dan pengelolaan administrasi.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

Kabupaten Aceh Barat merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang terletak di pantai barat dan selatan Pulau Sumatera. Meulaboh merupakan ibukota Aceh Barat yang memiliki potensi pariwisata pantai dan laut. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang PDRB Kabupaten Aceh Barat menurut lapangan usaha dan menjadi titik berat pembangunan ekonomi.

DATA DASAR

Total APBD	1.448.672.742.105
Jumlah Penduduk	205.971
IPM	71,22
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	23%	6,9
Kesehatan	20%	8,7
Ekonomi	7%	1,3

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

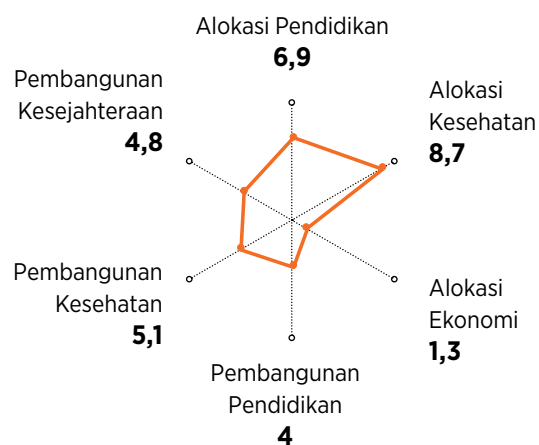
	Nilai
Pendidikan	4,0
Kesehatan	5,1
Kesejahteraan	4,8

TELAAH

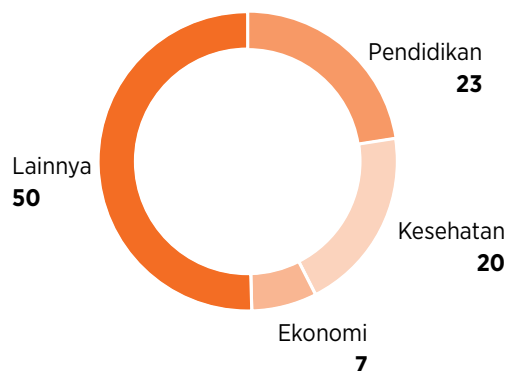
Kabupaten Aceh Barat mendapatkan skor 8.7 karena mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dari total APBD. Rasio jumlah SDM Kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 0.82% atau 1:122. Kondisi ini masih harus ditingkatkan karena artinya 1 SDM Kesehatan masih harus melayani 122 penduduk. Dari sisi program, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat mulai fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat yang bermukim di kawasan terpencil dan daerah tertinggal. Ini dilakukan karena masih ada masyarakat yang terisolir dan kurang mendapat fasilitas yang memadai, teruma masyarakat komunitas adat terpencil yang sulit akses.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KOTA BANJAR

Kota Banjar terletak di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kota Banjar menjadi pintu gerbang utama jalur lintas selatan Jawa Barat. Secara geografis, Kota Banjar memiliki peran strategis dalam kelancaran pasokan barang ke berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota Banjar terkenal dengan daerah pariwisatanya seperti Situ Mustika dan Warung Oemah.

DATA DASAR

Total APBD	856.222.208.368
Jumlah Penduduk	182.820
IPM	71,75

Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	24%	1,6
Kesehatan	25%	10,0
Ekonomi	4%	2,4

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

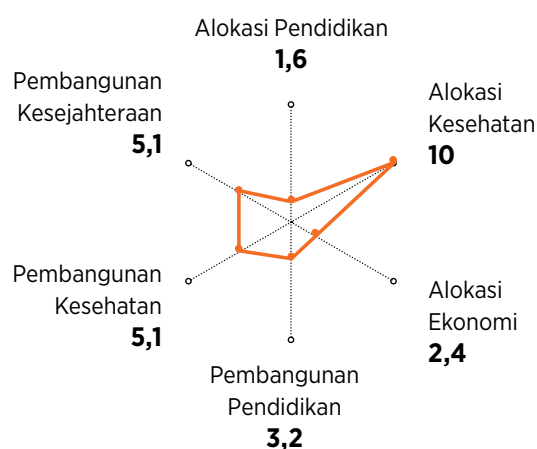
	Nilai
Pendidikan	3,2
Kesehatan	5,1
Kesejahteraan	5,1

TELAAH

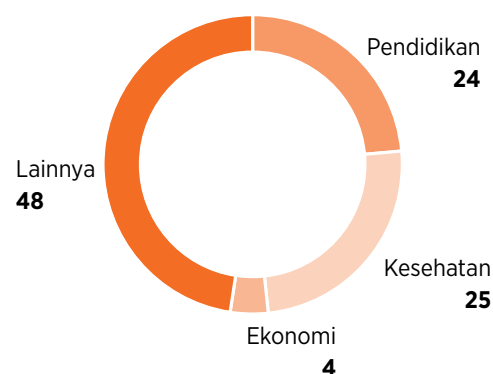
Kota Banjar mengalokasikan APBD untuk bidang kesehatan sebesar 25 persen dan mendapatkan skor 10. Permasalahan kesehatan di Kota Banjar antara lain masih sedikitnya jumlah SDM Kesehatan, yaitu 0,7% atau 1:142. Artinya, 1 SDM Kesehatan masih harus melayani 142 penduduk. Sejak 2005, Walikota Banjar memprakarsai pelayanan kesehatan kepada lanjut usia dengan pembebasan pembayaran pengobatan and pemeriksaan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Fasilitas kesehatan semakin tersebar untuk memudahkan publik dalam mengakses layanan secara memadai.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

Kotamobagu merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow pada 2007. Perekonomian Kotamobagu ditopang oleh beberapa sektor seperti angkutan, komunikasi, dan pertanian dan perkebunan. Salah satu produk unggulan utama adalah kopi yang terkenal sampai ke berbagai daerah.

DATA DASAR

Total APBD	717.574.906.904
Jumlah Penduduk	126.198
IPM	73,22
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	20%	2,8
Kesehatan	25%	10,0
Ekonomi	5%	2,2

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	7,6
Kesehatan	8,0
Kesejahteraan	5,5

TELAAH

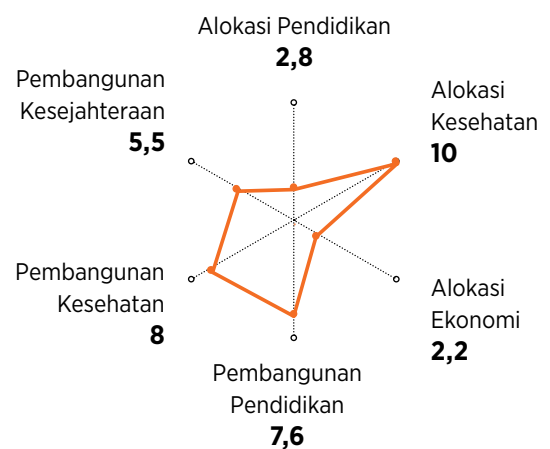
Kota Kotamobagu mengalokasikan 25 persen APBD untuk kesehatan. Kotamobagu mulai melakukan inovasi bidang kesehatan dengan melakukan sistem pendaftaran dan pelayanan kesehatan pada Puskesmas Gogagoman dengan pendaftaran melalui layanan pesan singkat. Selain itu, terdapat program pelayanan Dokumen *Tee in One* bagi ibu bersalin untuk pelayanan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Pemerintah kota juga menerbitkan sertifikat imunisasi dasar lengkap sebagai prasyarat masuk sekolah dasar.



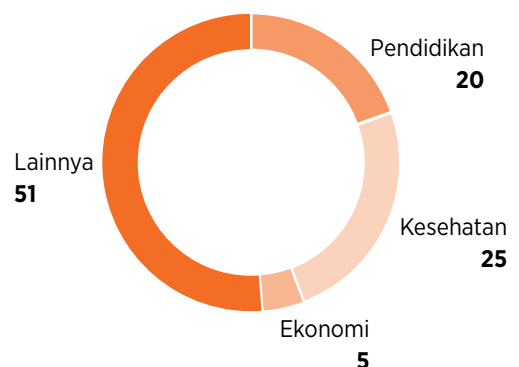
SULAWESI UTARA



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KOTA DUMAI

Kota Dumai terletak di pesisir timur Provinsi Riau dan merupakan kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia. Kota Dumai diresmikan pada 1999 sebagai tindak lanjut dari pemekaran Kabupaten Bengkalis. Sektor utama yang tumbuh pesat di Dumai adalah sektor transportasi, perdagangan, dan industri pengolahan.

DATA DASAR

Total APBD	1.268.884.233.484
Jumlah Penduduk	303.292
IPM	74,64
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	28%	5,3
Kesehatan	24%	9,9
Ekonomi	8%	8,1

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

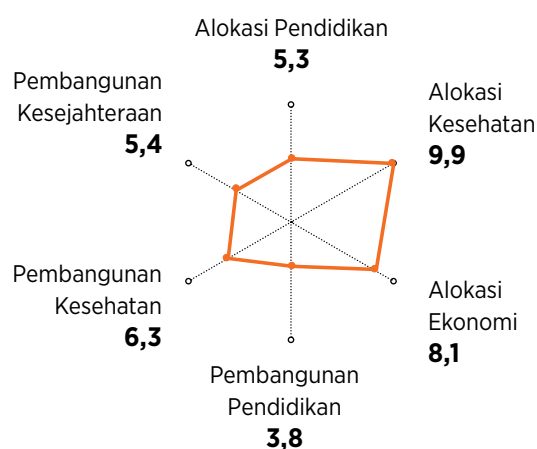
	Nilai
Pendidikan	3,8
Kesehatan	6,3
Kesejahteraan	5,4

TELAAH

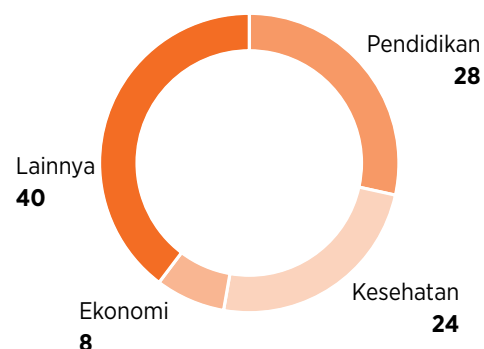
Kota Dumai mendapatkan skor 9,9 karena mengalokasikan APBD bidang kesehatan sebesar 21 persen di saat rasio SDM Kesehatan baru 0,59 persen. Rasio jumlah SDM Kesehatan per jumlah penduduk yaitu 1:168 yang berarti SDM Kesehatan masih harus melayani 168 penduduk. Kota Dumai memiliki program pengembangan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) kewilayahan yang berbasis tim dengan sebutan Program Salam Sehat Dumai Madani. Program ini merupakan terobosan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama komprehensif.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI

Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Maluku Utara dan berada dalam kepulauan Halmahera. Secara geografis, kabupaten ini memiliki letak strategis karena berada di bibir jalur perdagangan Asia Pasifik. Jumlah pulau-pulau kecil yang ada di kabupaten ini berjumlah 33 pulau. Mayoritas penduduk pulau ini merupakan petani dan nelayan.



DATA DASAR

Total APBD	952.876.985.462
Jumlah Penduduk	65.573
IPM	62,38
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	16%	3,3
Kesehatan	20%	10,0
Ekonomi	9%	8,6

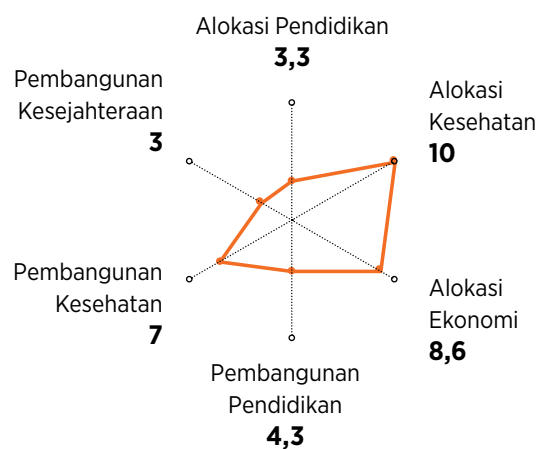
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,3
Kesehatan	7,0
Kesejahteraan	3,0

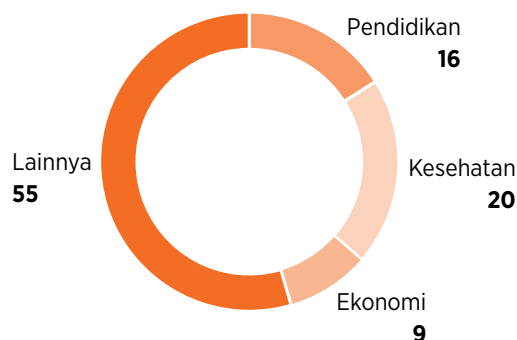
TELAAH

Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan skor 10 dengan alokasi anggaran kesehatan sebesar 20 persen dari total APBD. Dari segi jumlah SDM kesehatan, kabupaten ini memiliki rasio 0,7 persen atau 1:142 penduduk. Dari segi efektifitas penggunaan dana bidang kesehatan, Kabupaten Pulau Morotai dinilai cukup efektif. Dalam tata kelola pemerintahan, Kabupaten Pulau Morotai melakukan inovasi pelayanan berbasis QR Code agar masyarakat desa tidak perlu lagi ke ibu kota kabupaten. Dampaknya, pelayanan bisa lebih terintegrasi dan efisien dari segi waktu dan biaya.

NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kabupaten Boolang Mongondow Utara terletak di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Gorontalo. Potensi wilayah kabupaten ini adalah sektor perdagangan, pertanian, industri dan energi, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Pemasukan daerah dari semen dan gula pasir merupakan pemasukan terbesar.



DATA DASAR

Total APBD	683.374.749.529
Jumlah Penduduk	79.366
IPM	66,91
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	20%	9,0
Kesehatan	20%	9,8
Ekonomi	6%	1,4

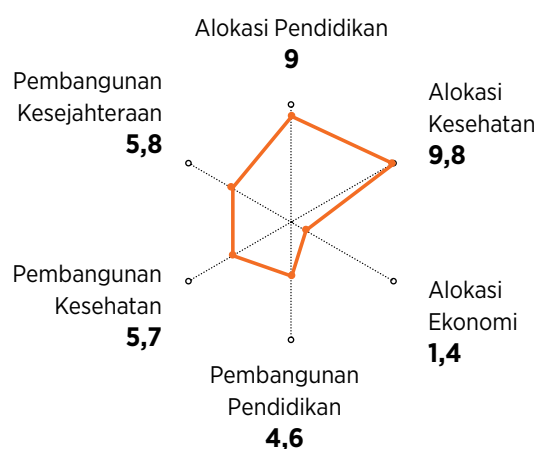
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,6
Kesehatan	5,7
Kesejahteraan	5,8

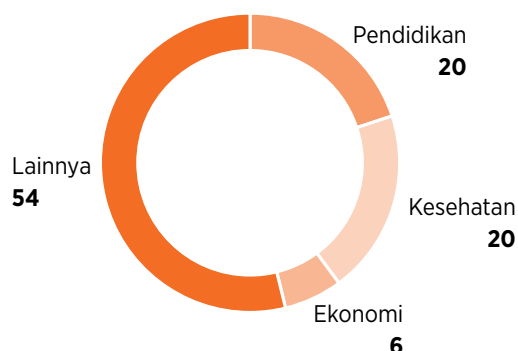
TELAAH

Kabupaten Boolang Mongondow Utara mengalokasikan APBD untuk bidang kesehatan sebesar 20 persen. Alokasi tersebut dinilai tepat karena kabupaten ini masih memiliki permasalahan di bidang kesehatan. Rasio SDM Kesehatan masih rendah yaitu 0,35% atau 1: 289. Untuk mendukung pelayanan kesehatan, kabupaten ini melakukan inovasi aplikasi pendaftaran online Poli Rawat Jlan di Puskesmas Boroko. Pasien tidak lagi perlu antri karena sudah terjadwal secara online.

NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KABUPATEN PANIAI

Kabupaten Paniai merupakan kabupaten yang terletak di jalur pegunungan tengah Provinsi Papua. Fitur geografis khas di kabupaten ini adalah tiga danau yaitu Danau Paniai, Danau Tigi, dan Danau Tage yang terletak di sekitar pusat kota Enarotali. Komoditas utama kabupaten ini adalah tanaman pangan seperti ubi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dari segi kontribusi PDRB, sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang signifikan.

DATA DASAR

Total APBD	1.186.112.073.457
Jumlah Penduduk	173.392
IPM	56,58
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	13%	3,2
Kesehatan	17%	9,8
Ekonomi	6%	3,4

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	1,0
Kesehatan	5,8
Kesejahteraan	4,5

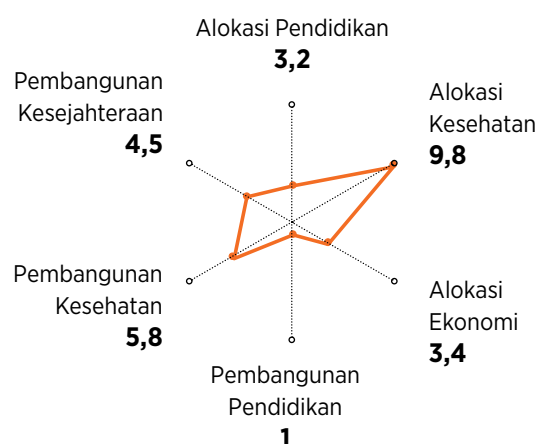
TELAAH

Problem kesehatan di Kabupaten Paniai adalah jumlah SDM kesehatan yang masih sedikit, yaitu sebesar 0.21% atau 1: 482 penduduk. Kabupaten ini mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 17 persen dari total APBD sehingga langkah ini dinilai tepat untuk mengatasi problem kesehatan.

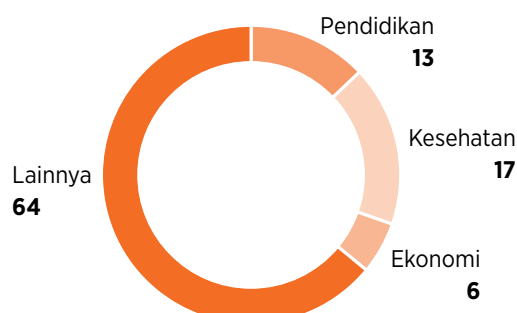
Program kesehatan yang dijalankan adalah dengan Kartu Papua Sehat untuk 100 persen orang asli Papua. Layanan kesehatan terbang untuk merespon kondisi pegunungan, dan layanan kesehatan terapung, dan kaki telanjang menjadi bagian dari inovasi.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KOTA TANJUNG BALAI

Kota Tanjung Balai terletak di tepi Sungai Asahan dan pantai timur Provinsi Sumatera Utara. Sektor yang memiliki peran cukup dominan di kota ini terhadap PDRB adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, pertanian, dan konstruksi.

DATA DASAR

Total APBD	862.006.552.935
Jumlah Penduduk	173.302
IPM	68,51
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	16%	2,9
Kesehatan	31%	10,0
Ekonomi	5%	1,8

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

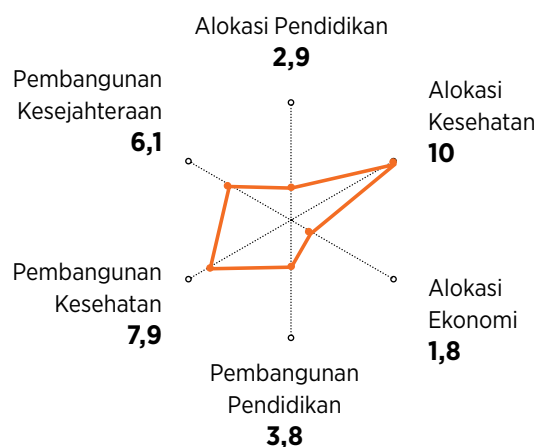
	Nilai
Pendidikan	3,8
Kesehatan	7,9
Kesejahteraan	6,1

TELAAH

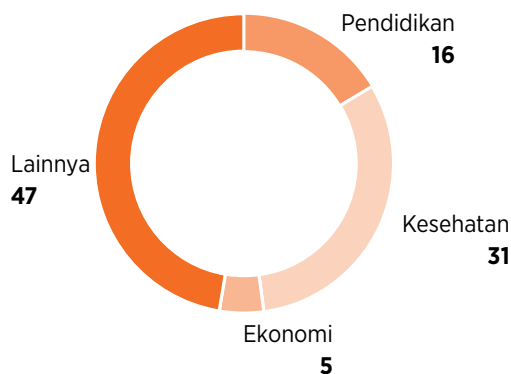
Kota Tanjung Balai mengalokasikan APBD bidang kesehatan sebesar 31 persen. fasilitas kesehatan berupa puskesmas di Tanjung Balai sudah sesuai standar nasional dengan per satu puskesmas melayani 20.876,5 jiwa penduduk. Standar nasional yang ditetapkan adalah satu puskesmas melayani 30.000 penduduk. Namun, dalam Renstra Dinas Kesehatan 2016-2021, salah satu tantangan yang dihadapi adalah sarana dan prasarana puskesmas masih belum sepenuhnya mendukung program kesehatan.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANTAENG

Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi “telapak kaki” Sulawesi. Kabupaten Bantaeng merupakan daerah pantai yang memiliki potensi pengembangan perikanan dan rumput laut. Sebagian besar penduduk Kabupaten Bantaeng bekerja sebagai petani dan mengandalkan sektor pertanian hortikultura. Keunggulan komparatif Bantaeng adalah kesuburan yang tinggi, anatomi ruang yang khas, kultur pendidikan.

DATA DASAR

Total APBD	1.097.764.416.986
Jumlah Penduduk	186.612
IPM	68,30

Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	27%	3,0
Kesehatan	25%	9,1
Ekonomi	7%	8,1

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,8
Kesehatan	5,3
Kesejahteraan	4,8

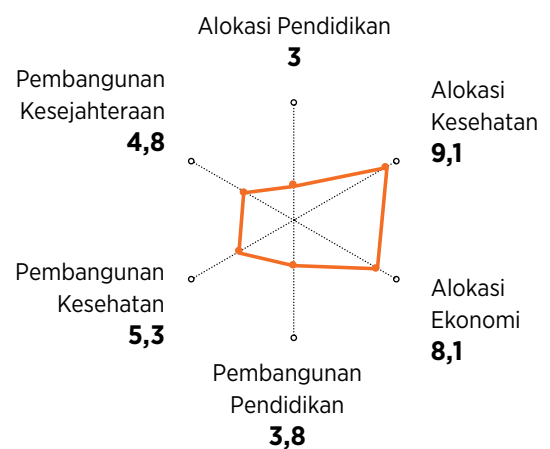
TELAAH

Kabupaten Bantaeng mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 25 persen dari total APBD. Alokasi tersebut menjadi salah satu yang terbaik dalam ketepatan alokasi anggaran kesehatan di kelompok tiga.

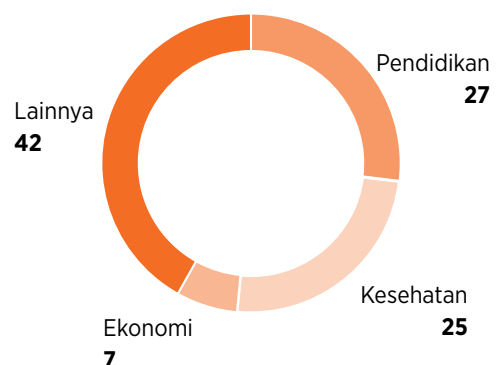
Salah satu misi Kabupaten Bantaeng adalah peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Inovasi program kesehatan yang dilakukan adalah Emergency Service-PSC 119 untuk mengurangi beban kerja puskesmas, terminal darah puskesmas, “SASKIA” Satu Bendera Saru Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak yang melibatkan sumber daya lokal.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SIKKA

Kabupaten Sikka terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Maumere. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan total luas sawah pada 2017 mencapai 2.699 Ha. Sumbangan terbesar untuk PDRB selain dari pertanian adalah kehutanan dan perikanan.

DATA DASAR

Total APBD	1.270.750.000.000
Jumlah Penduduk	318.920
IPM	64,75
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	26%	3,4
Kesehatan	24%	9,0
Ekonomi	6%	1,8

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	7,0
Kesehatan	8,1
Kesejahteraan	4,8

TELAAH

Kabupaten Sikka mengalokasikan APBD untuk bidang kesehatan sebesar 24 persen. Alokasi tersebut dinilai tepat karena kabupaten ini masih memiliki permasalahan kesehatan yaitu minimnya SDM kesehatan.

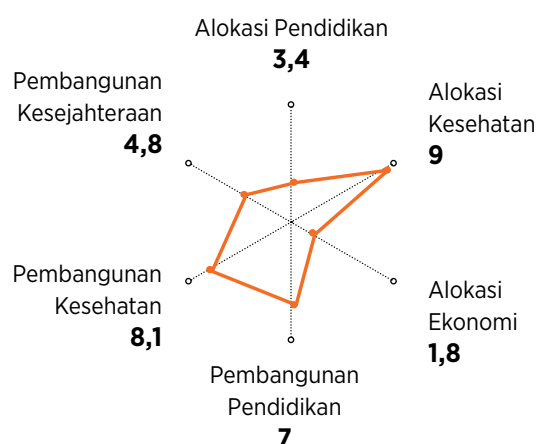
Salah satu capaian Kabupaten Sikka di bidang kesehatan adalah kegiatan untuk menurunkan angka stunting dengan mangedakan program rumah pemulihan untuk pasien stunting. Meskipun belum sampai 0 persen, Kabupaten Sikka berhasil menurunkan angka stunting dari 25 persen menjadi 23 persen.



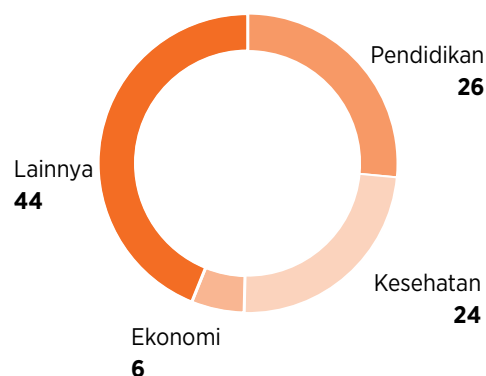
NUSA TENGGARA TIMUR



NILAI



PROPORSI APBD %







PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kabupaten Sumbawa Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ibu kota berada di Taliwang. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa pada 2003. Perekonomian utama Kabupaten Sumbawa Barat ditopang oleh sektor pertambangan, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 75 persen. Hasil tambang utama kabupaten ini adalah emas, tembaga, dan perak.



NUSA TENGGARA BARAT



DATA DASAR

Total APBD	1.091.458.614.210
Jumlah Penduduk	144.707
IPM	71,52
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	23%	5,9
Kesehatan	15%	1,4
Ekonomi	9%	8,5

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

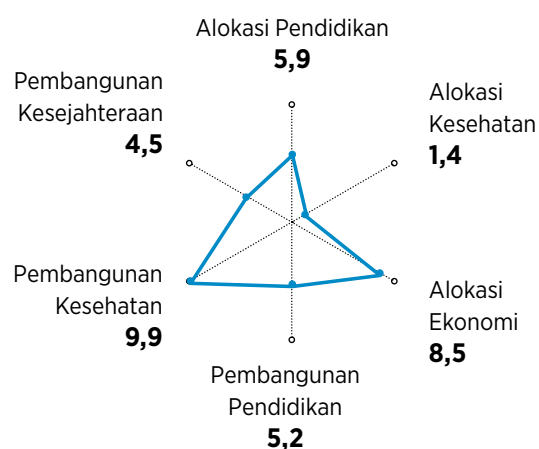
	Nilai
Pendidikan	5,2
Kesehatan	9,9
Kesejahteraan	4,5

TELAAH

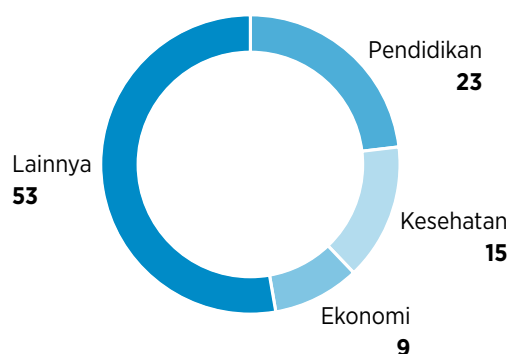
Kabupaten ini merupakan salah satu yang terbaik di kelompok satu karena berhasil menaikkan angka harapan hidup sebesar 0,68 persen; dari 67,34 tahun pada 2018 menjadi 67,8 tahun pada 2019. Dari segi anggaran, kabupaten ini mengalokasikan 15 persen dari total APBD.

Sasaran program yang dilakukan untuk meningkatkan angka harapan hidup adalah dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan pencegahan penyakit, dan meningkatkan tata kelola perencanaan strategis melalui pendekatan teknologi informasi.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Kabupaten Bone Bolango merupakan kabupaten di Provinsi Gorontalo hasil dari pemekaran dari Kabupaten Gorontalo pada 2003. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang paling signifikan dalam menyumbang kontribusi terhadap ekonomi kabupaten ini.



GORONTALO



DATA DASAR

Total APBD	1.043.952.321.277
Jumlah Penduduk	155.950
IPM	69,63

Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	23%	8,1
Kesehatan	18%	8,2
Ekonomi	8%	8,1

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

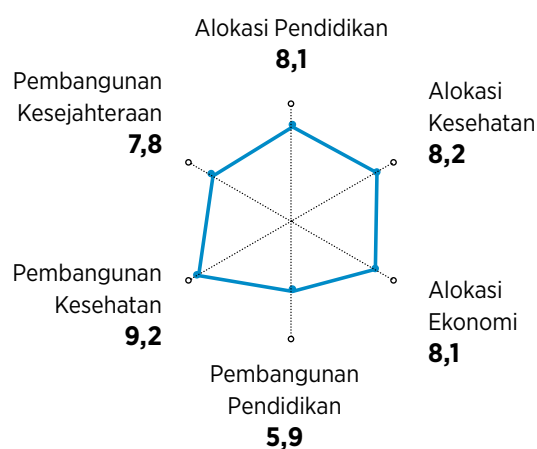
	Nilai
Pendidikan	5,9
Kesehatan	9,2
Kesejahteraan	7,8

TELAAH

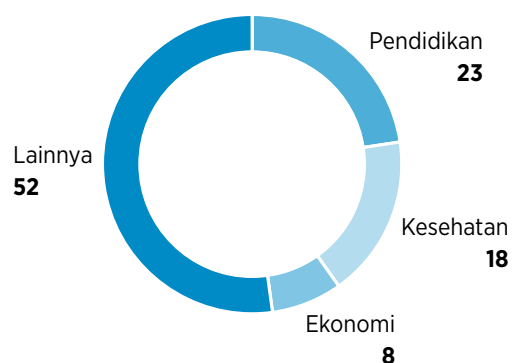
Kabupaten Bone Bolango mencatatkan hasil baik pada pembangunan bidang kesehatan. Daerah ini mampu menaikkan angka harapan hidup sebesar 0,63 persen. Pada 2018, angka harapan hidup di Bone Bolango sebesar 67,95 dan pada 2018 naik menjadi 68,36.

Salah satu program kesehatan yang dilakukan oleh Bone Bolango adalah dengan program Mutiara Berlian untuk memantau ibu hamil dari usia kehamilan 0 bulan sampai melahirkan, didukung dengan perbaikan fasilitas kesehatan di daerah.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN KOTA SIBOLGA

Kabupaten Sibolga merupakan kota di Provinsi Sumatera Utara. Letaknya berada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Sumber perekonomian penduduk bersumber dari hasil perikanan, pariwisata, jasa, perdagangan, dan industri maritim.

DATA DASAR

Total APBD	670.105.520.418
Jumlah Penduduk	87.317
IPM	73,41
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	21%	1,9
Kesehatan	21%	5,4
Ekonomi	11%	9,8

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

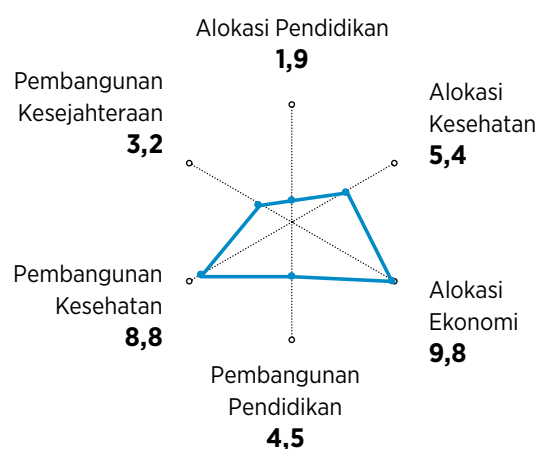
	Nilai
Pendidikan	4,5
Kesehatan	8,8
Kesejahteraan	3,2

TELAAH

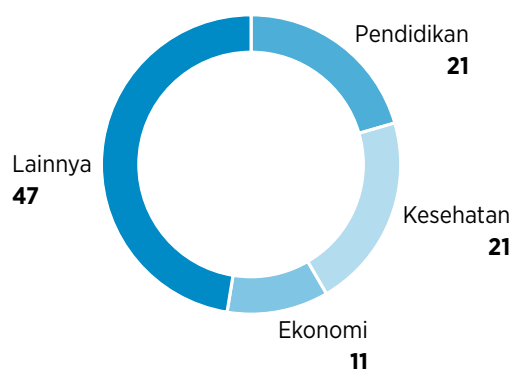
Pembangunan kesehatan Kabupaten Sibolga dinilai berhasil karena kabupaten ini mampu menaikkan angka harapan hidup sebesar 0,59 persen. Pada 2018, angka harapan hidup di Sibolga 68,36 dan pada 2019 naik menjadi 68,77. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan ini juga didukung oleh alokasi anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 21 persen dari total APBD. Jumlah SDM kesehatan di Kabupaten ini pada 2018 sebanyak 989 orang atau 1.13% dari jumlah penduduk.



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN KOTA KUPANG

Kota Kupang merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di bagian barat Pulau Timor, Kota Kupang merupakan kota terbesar di Pulau Timor yang terbagi menjadi enam kecamatan dan 51 kelurahan. Perekonomian kota ini ditopang oleh sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan, dan transportasi dan pergudangan.

DATA DASAR

Total APBD	1.219.597.664.120
Jumlah Penduduk	423.800
IPM	79,55
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	31%	5,7
Kesehatan	16%	1,0
Ekonomi	5%	1,6

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,3
Kesehatan	10,0
Kesejahteraan	5,4

TELAAH

Kota Kupang mampu menaikkan angka harapan hidup sebesar 0,68 persen. Pada 2018, angka harapan hidup di Kota Kupang 68,9 dan pada 2019 naik menjadi 69,37.

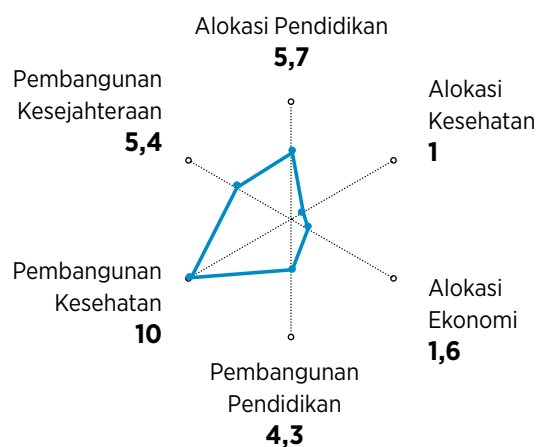
Kota Kupang melakukan inovasi kesehatan melalui pengembangan program brigade Kupang sehat (BKS) untuk memudahkan akses layanan kesehatan yang membutuhkan layanan *emergency*. Program ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian indikator program kuci seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kasus gizi buruk.



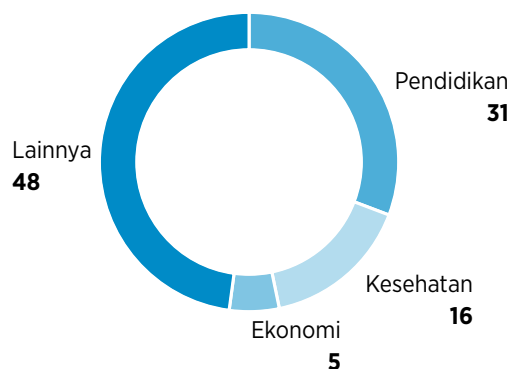
NUSA TENGGARA TIMUR



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN KOTA SORONG

Kota Sorong merupakan kota perantara untuk menuju berbagai wilayah di Papua Barat. Daerah ini terkenal dengan banyaknya kawasan wisata pantai yang indah. Satu gugusan pulau yang mendunia adalah Raja Ampat. Kota Sorong merupakan kota yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Papua.

DATA DASAR

Total APBD	947.674.749.413
Jumlah Penduduk	247.084
IPM	77,98
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	22%	3,8
Kesehatan	21%	9,1
Ekonomi	5%	1,7

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	5,3
Kesehatan	9,7
Kesejahteraan	4,5

TELAAH

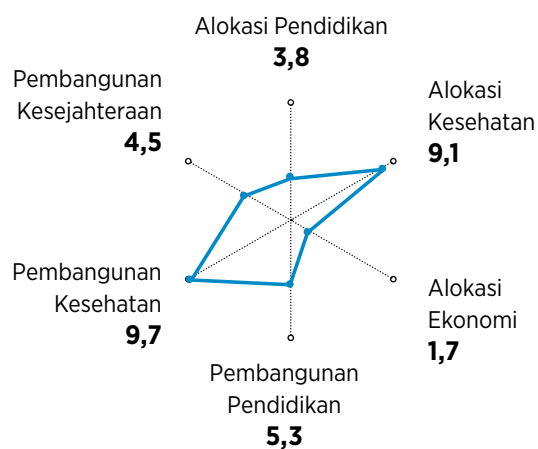
Kabupaten Morowali mampu meningkatkan kualitas pembangunan di bidang kesehatan dengan menaikkan angka harapan hidup sebesar 0,66 persen. Kabupaten ini mampu meningkatkan angka harapan hidup dari 70 menjadi 70,46. Alokasi anggaran kesehatan di Kabupaten Morowali tergolong baik yakni sebesar 21 persen dari total APBD.



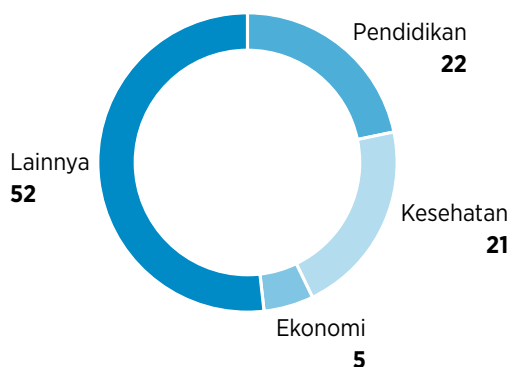
PAPUA BARAT



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk aslinya suku Bugis. Kabupaten ini dipandang sebagai sentra penghasil beras di Sulawesi Selatan. Perekonomian kabupaten ini ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.



DATA DASAR

Total APBD	1.301.538.282.000
Jumlah Penduduk	299.123
IPM	71,05
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	33%	8,5
Kesehatan	19%	8,6
Ekonomi	4%	2,1

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

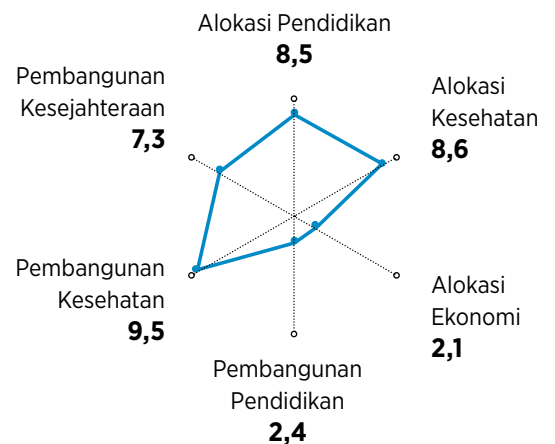
	Nilai
Pendidikan	2,4
Kesehatan	9,5
Kesejahteraan	7,3

TELAAH

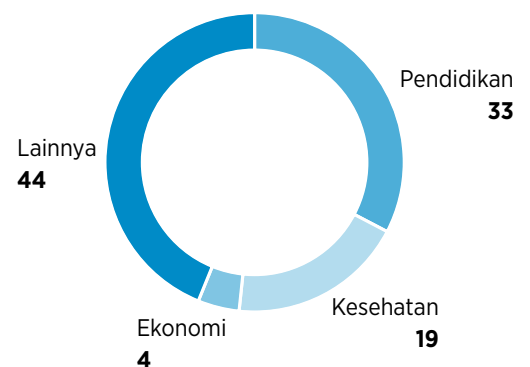
Kabupaten Sidenreng Rappang mampu meningkatkan kualitas pembangunan di bidang kesehatan. Kabupaten ini berhasil menaikkan angka harapan hidup dari 69,15 pada 2018 menjadi 69,59 pada 2019 dengan peningkatan sebesar 0,63 persen. Kondisi ini ditunjang oleh proporsi APBD kesehatan sebesar 19 persen.

Kabupaten ini melakukan inovasi di bidang layanan publik kesehatan melalui program “Jurus Sang Pendekar” (Jaga Ibu Hamil Bersama bidan Desa, Suami, dan Ibu Mertua dalam penanganan Anemia/Kurang Zat Besi) di Poskesdes Desa Mojong.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SABU RAIJUA

Kabupaten Sabu Raijua masuk dalam wilayah Provinsi NusaTenggara Timur. Dalam setahun, kondisi alam wilayah ini sering mengalami musim kemarau panjang. Kondisi permukaan wilayah ini sebagian besar terdiri dari bukit-bukit kapur. Menurut kondisi wilayahnya, kepulauan ini masih banyak mengalami isolasi fisik karena kurangnya dukungan infrastruktur.

DATA DASAR

Total APBD	766.597.697.167
Jumlah Penduduk	94.406
IPM	56,66

Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	19%	6,3
Kesehatan	13%	1,3
Ekonomi	7%	1,4

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	5,5
Kesehatan	10,0
Kesejahteraan	4,9

TELAAH

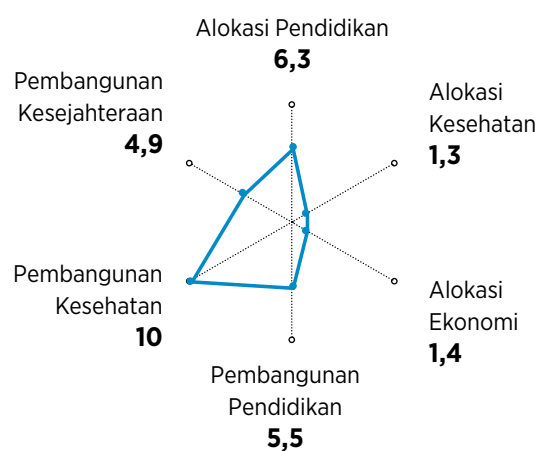
Kabupaten Sabu Raijua mencatatkan hasil baik pada pembangunan di bidang kesehatan. Daerah ini mampu menaikkan angka harapan hidup lebih besar dari daerah lain di kelompok tiga dengan pertumbuhan sebesar 1,17 persen. Meskipun angka harapan hidup masih di bawah rata-rata nasional, kabupaten ini mampu meningkatkan angka harapan hidup dari 59,53 persen pada 2018 menjadi 60,23 persen pada 2019.



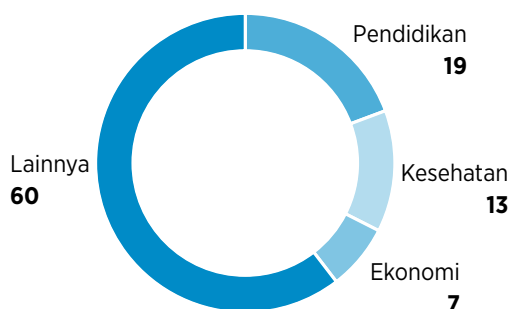
NUSA TENGGARA TIMUR



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN ASMAT

Kabupaten Asmat terletak di Provinsi Papua dengan ibukota berada di Agats. Di wilayah ini masih memerlukan peningkatan layanan transportasi sebagai penghubung antar distrik. Mayoritas suku di kabupaten ini adalah Suku Asmat. Kabupaten Asmat terkenal dengan objek wisata alam dan budaya, salah satunya Taman Nasional Lorentz.

DATA DASAR

Total APBD	1.733.155.793.439
Jumlah Penduduk	95.606
IPM	50,37
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	13%	3,5
Kesehatan	17%	9,1
Ekonomi	14%	10,0

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

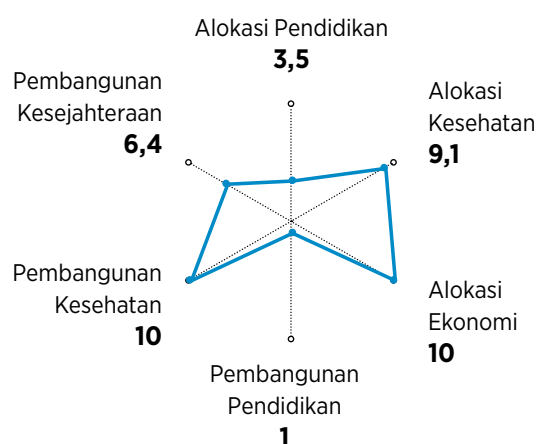
	Nilai
Pendidikan	1,0
Kesehatan	10,0
Kesejahteraan	6,4

TELAAH

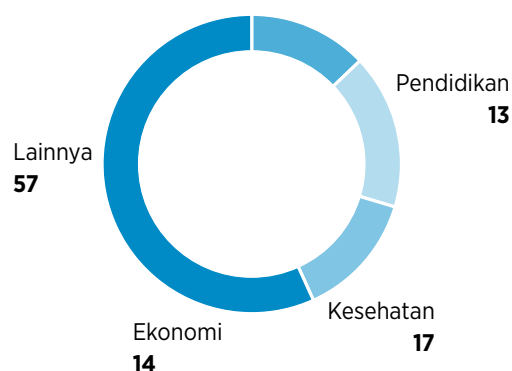
Kabupaten Asmat mencatatkan hasil baik pada pembangunan di bidang kesehatan. Meskipun angka harapan hidup masih di bawah rata-rata nasional, kabupaten ini mampu menaikannya sebesar 1.14 persen. Pada 2018, angka harapan hidup di Kabupaten Asmat 56,88 dan pada 2019 naik menjadi 57,53 persen. Kabupaten Asmat masih memerlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat, terutama dari gizi anak dan jumlah tenaga medis.



NILAI



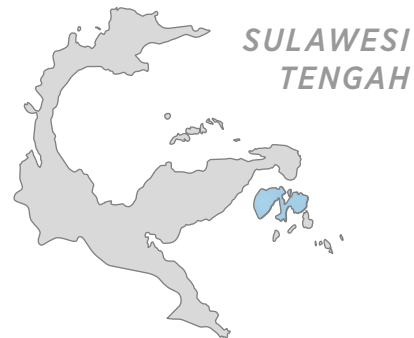
PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Kabupaten Banggai Kepulauan berada di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribukotakan Salakan. Laut merupakan penopang aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah ini. Banggai Kepulauan terdiri dari gugusan dan rangkaian pulau yang dikelilingi lautan. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai pada 1999.



DATA DASAR

Total APBD	944.417.709.709
Jumlah Penduduk	117.630
IPM	65,13
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	21%	6,4
Kesehatan	17%	5,7
Ekonomi	6%	1,3

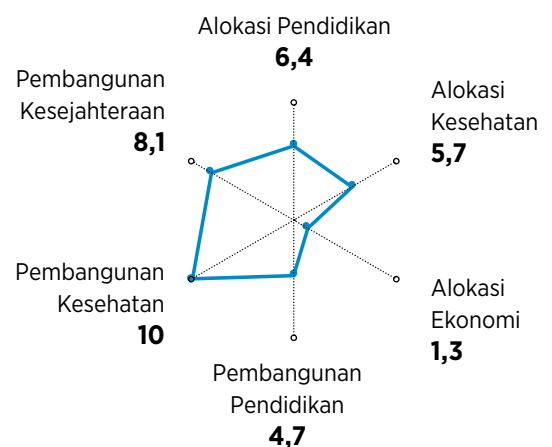
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,7
Kesehatan	10,0
Kesejahteraan	8,1

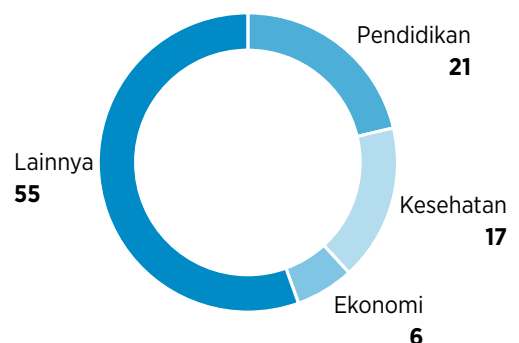
TELAAH

Kabupaten Banggai Kepulauan mampu meningkatkan kualitas pembangunan di bidang kesehatan. Meskipun angka harapan hidup masih di bawah rata-rata nasional, kabupaten ini mampu meningkatkan angka harapan hidup dari 65,12 pada 2018 menjadi 65,71 pada 2019. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan di Banggai Kepulauan tergolong baik yakni sebesar 17 persen dari total APBD.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO

Kabupaten Pohuwato merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo, Kota ini terletak di ujung barat Provinsi Gorontalo. Modal perekonomian kabupaten ini adalah hasil jagung yang berada di sepanjang jalan trans-Sulawesi dan perikanan Sekitar 40 persen jagung di Provinsi Gorontalo disumbang oleh Pohuwato. Hutan masih mendominasi dengan luas lahan 70 persen dari wilayah kabupaten.

DATA DASAR

Total APBD	1.019.424.561.119
Jumlah Penduduk	154.714
IPM	65,27
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	22%	3,7
Kesehatan	21%	5,6
Ekonomi	9%	8,3

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,8
Kesehatan	10,0
Kesejahteraan	7,7

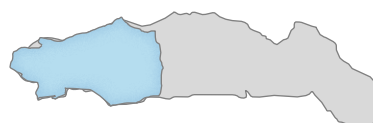
TELAAH

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pohuwato dinilai berhasil karena kabupaten ini mampu menaikkan angka harapan hidup sebesar 0.91 persen. Pada 2018, angka harapan hidup di Pohuwato 63,25 dan pada 2019 naik menjadi 63,83.

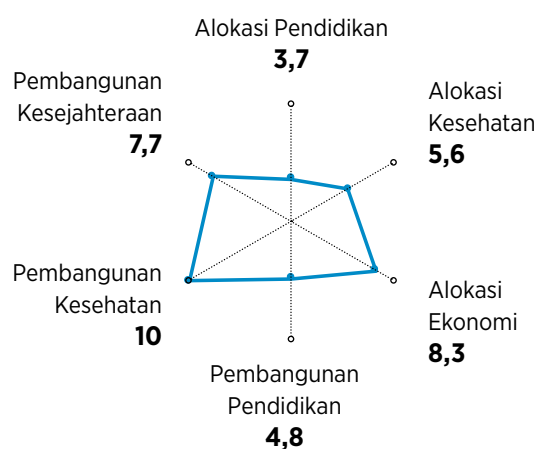
Pahuwato memiliki kegiatan utama kesehatan dari segi pelayanan kesehatan gratis, pelayanan ibu hamil, pelayanan gizi, pelayanan anak stunting, dan distribusi bantuan ikan segar dan buah kepada ibu hamil dan anak stunting. Progam ini menjadi bagian dari inovasi "GEMA PANUA", upaya mendekatkan pelayanan ke desa-desa terpencil.



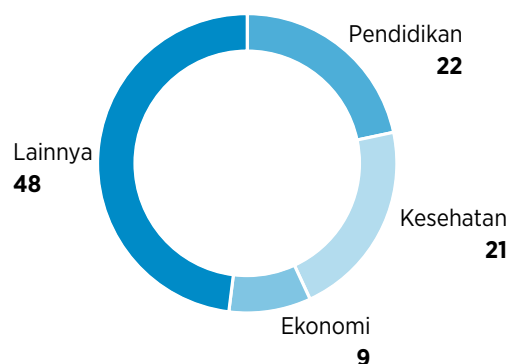
GORONTALO



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TOLI TOLI

Kabupaten Tolitoli terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dengan ketinggian antara ketinggian antara 0-2500 Mdpl. Kabupaten Tolitoli sebelumnya bernama Kabupaten Buol ToliToli lalu melakukan pemekaran daerah pada 1999. Perekonomian di kabupaten ini ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

DATA DASAR

Total APBD	1.196.627.039.923
Jumlah Penduduk	233.410
IPM	65,42
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

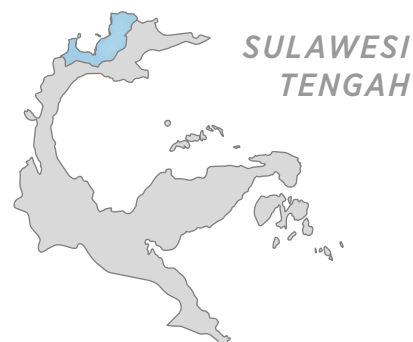
	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	23%	3,6
Kesehatan	23%	5,8
Ekonomi	9%	8,3

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

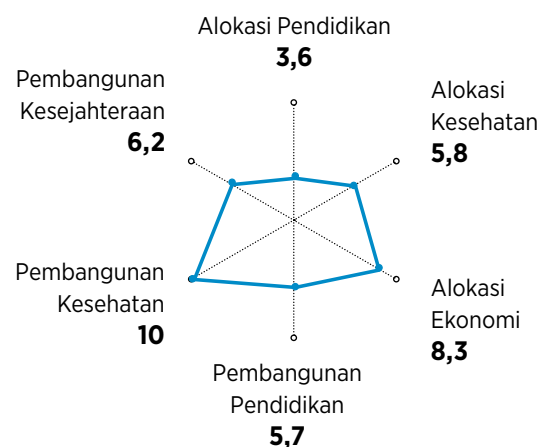
	Nilai
Pendidikan	5,7
Kesehatan	10,0
Kesejahteraan	6,2

TELAAH

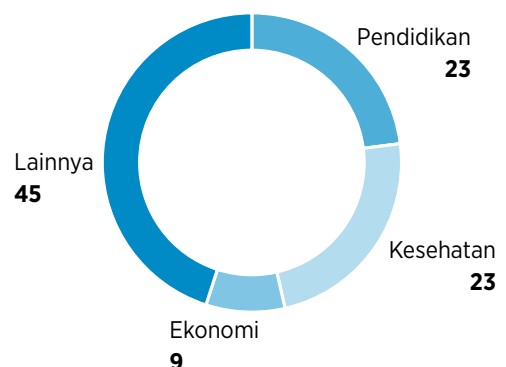
Kabupaten Tolitoli mampu meningkatkan kualitas pembangunan di bidang kesehatan. Kabupaten ini mampu meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0,91 persen. Pada 2018, angka harapan hidup di Tolitoli 64,71 dan pada 2019 naik menjadi 65,30 persen. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan di Kabupaten Tolitoli tergolong baik yakni sebesar 23 persen dari total APBD.



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BUOL

Kabupaten Buol terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari segi geografis, wilayahnya terdiri atas pantai, dataran rendah, bukit, hingga gunung. Penggunaan lahan pada Kabupaten ini didominasi untuk hutan rakyat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang paling besar berkontribusi terhadap PDRB yakni sebesar 46,24 persen.



DATA DASAR

Total APBD	1.025.557.658.357
Jumlah Penduduk	158.790
IPM	67,69
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	25%	3,4
Kesehatan	18%	8,2
Ekonomi	10%	8,4

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

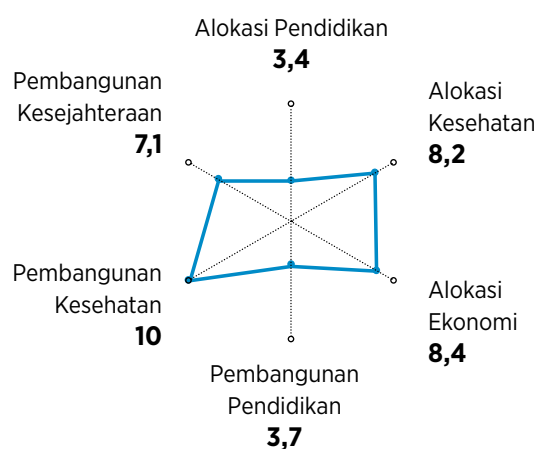
	Nilai
Pendidikan	3,7
Kesehatan	10,0
Kesejahteraan	7,1

TELAAH

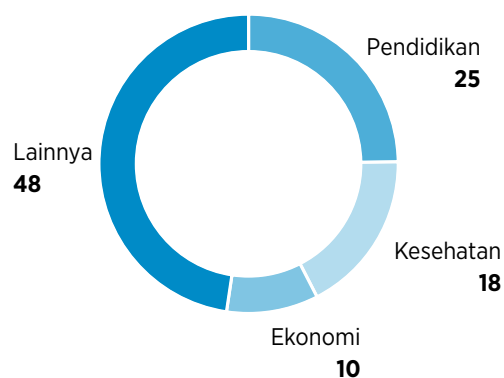
Kabupaten Buol mencatatkan hasil baik pada pembangunan di bidang kesehatan persen. Daerah ini mampu menaikkan angka harapan hidup lebih besar dari daerah lain di kelompoknya, yakni sebesar 0,85 persen.

Kabupaten Buol mampu meningkatkan usia harapan hidup dari 67,59 pada 2018 menjadi 68,17 pada 2019. Kondisi ini ditunjang oleh proporsi APBD untuk kesehatan yakni sebesar 18 persen.

NILAI



PROPORSI APBD %







KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI

KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN KONAWE

Kabupaten Konawe terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota berada di Unahaa. Dilihat dari struktur perekonomiannya, aktivitas terbesar berfokus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 28 persen. Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan produksi 60 persen dari kebutuhan beras di Sulawesi Tenggara.

DATA DASAR

Total APBD	1.732.186.426.686
Jumlah Penduduk	249.010
IPM	71
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	22%	1,1
Kesehatan	16%	8,4
Ekonomi	11%	10,0

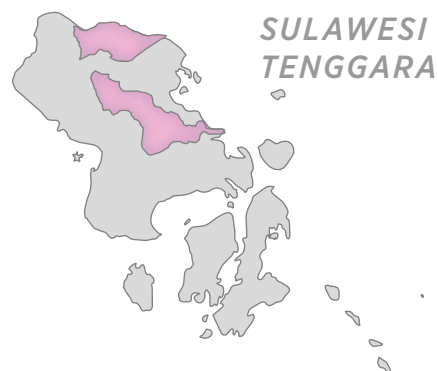
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,9
Kesehatan	5,9
Kesejahteraan	8,5

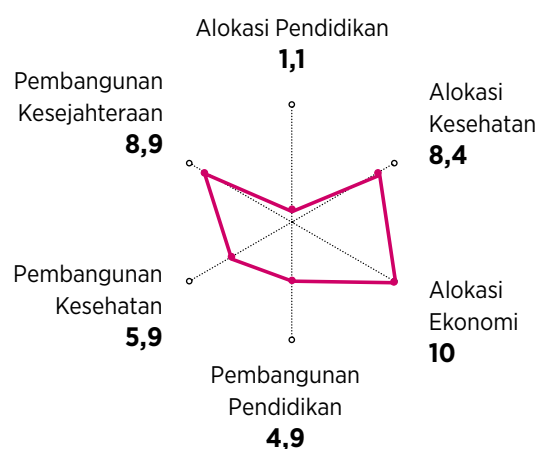
TELAAH

Kabupaten Konawe mengalokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya pada kelompok 1. Proporsi ABPB per kapita untuk fungsi tersebut pada 2019 sebesar 11,4 persen.

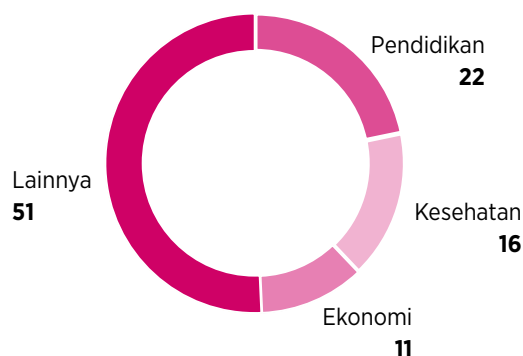
Tantangan ekonomi yang dihadapi Konawe tercermin dari besarnya PDRB per kapita pada 2018, yakni Rp 8 juta. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapitanya yang sebesar Rp 21,8 juta. Strategi yang dilakukan konawe untuk pembangunan masyarakat adalah dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan, kemandirian, dan integratif.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN MOROWALI

Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Poso. Secara geografis, Kabupaten Morowali memiliki 132 desa yang berbatasan dengan pantai, 14 desa di aliran sungai/lembah, 29 desa di lereng/perbukitan, dan 65 desa di daratan.

DATA DASAR

Total APBD	1.362.823.069.625
Jumlah Penduduk	119.290
IPM	72
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	19%	3,7
Kesehatan	18%	5,0
Ekonomi	11%	9,9

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	5,6
Kesehatan	8,0
Kesejahteraan	5,7

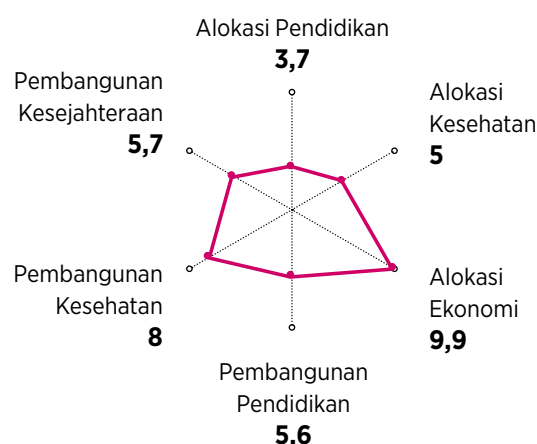
TELAAH

Kabupaten Morowali mendapatkan penilaian yang baik terkait ketepatan alokasi APBD fungsi ekonomi. Pemerintah Kabupaten Morowali mengalokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah lain pada kelompok 1. Pada 2019 proporsi APBD per kapita untuk fungsi tersebut sebesar 11,4 persen.

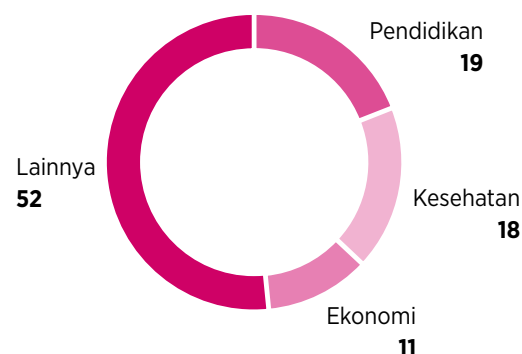
Adapun besarnya tantangan ekonomi yang dihadapi kota tersebut tergambarkan dari PDRB per kapita pada 2018, yakni sebesar Rp 20,3 juta, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB pada kelompoknya yang sebesar Rp 21,8 juta.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KOTA SIBOLGA

Kota Sibolga merupakan kota di Provinsi Sumatera Utara. Letaknya berada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Sumber perekonomian penduduk bersumber dari hasil perikanan, pariwisata, jasa, perdagangan, dan industri maritim.

DATA DASAR

Total APBD	670.105.520.418
Jumlah Penduduk	87.317
IPM	73
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	21%	1,9
Kesehatan	21%	5,4
Ekonomi	11%	9,8

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,5
Kesehatan	8,8
Kesejahteraan	3,2

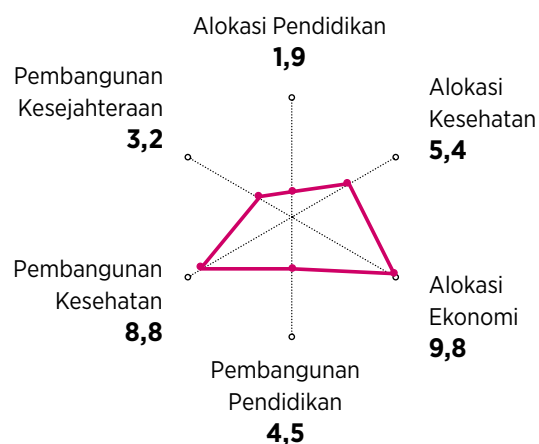
TELAAH

Kota Sibolga dinilai tepat dalam mengalokasikan APBD untuk fungsi ekonomi. Pemerintah Kota Sibolga menggelontorkan anggaran yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya pada kluster 1. Proporsi APBD per kapita untuk bidang tersebut sebesar 11 persen.

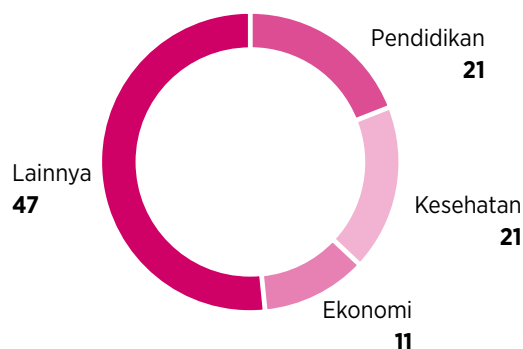
Adapun beratnya tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kota Sibolga tergambar dari besarnya PDRB per kapita pada 2018, yakni Rp 5 juta, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapita pada kelompok 1, sebesar Rp 21,8 juta.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN BANTUL

Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten ini terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kawasan dengan jumlah penduduk terpadat di DIY ini dikenal dengan berbagai daya tarik wisatanya, di antaranya Hutan Pinus Pengger dan Hutan Pinus Mangunan Dlingo.

DATA DASAR

Total APBD	2.383.358.028.670
Jumlah Penduduk	1.006.692
IPM	80
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	31%	8,8
Kesehatan	18%	8,3
Ekonomi	22%	10,0

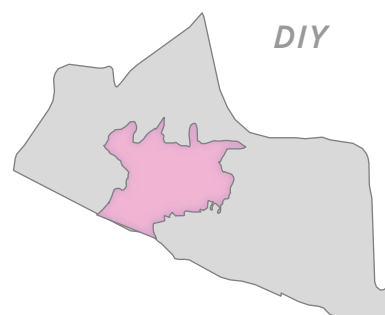
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	5,2
Kesehatan	3,4
Kesejahteraan	5,3

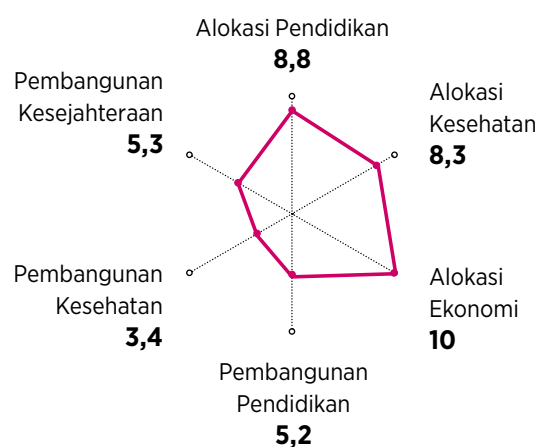
TELAAH

Kabupaten Bantul mendapatkan penilaian yang baik terkait ketepatan alokasi APBD fungsi ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah lain pada kelompok 2. Pada 2019 proporsi APBD per kapita untuk fungsi tersebut sebesar 21,7 persen.

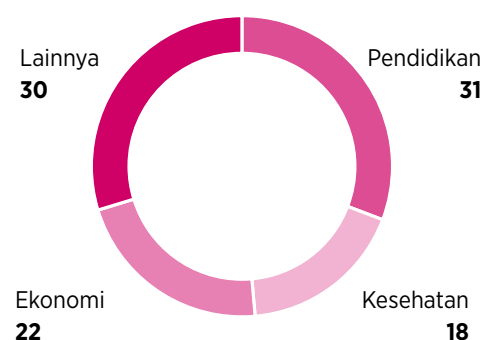
Adapun besarnya tantangan ekonomi yang dihadapi kota tersebut tergambarkan dari PDRB per kapita pada 2018, yakni sebesar Rp 24,4 juta, lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB pada kelompoknya yang sebesar Rp 42,5 juta.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KOTA SALATIGA

Kota Salatiga merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah-tengah Kabupaten Semarang. Secara geografis, kota ini dikelilingi oleh gunung Merbabu, Gunung Gajah dan Gunung Telomoyo. Pertumbuhan ekonomi kota ini ditopang oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 31 persen terhadap PDRB tahun 2019.

DATA DASAR

Total APBD	949.291.338.000
Jumlah Penduduk	191.571
IPM	83

Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	23%	2,3
Kesehatan	26%	5,7
Ekonomi	18%	9,5

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,3
Kesehatan	3,3
Kesejahteraan	4,0

TELAAH

Kota Salatiga dinilai tepat dalam mengalokasikan APBD untuk fungsi ekonomi. Pemerintah Kota Salatiga menggelontorkan anggaran yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya pada kelompok 2. Proporsi APBD per kapita untuk bidang tersebut sebesar 18 persen.

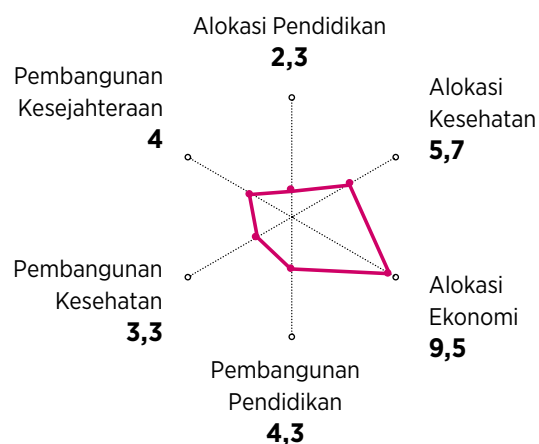
Adapun beratnya tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kota Salatiga tergambar dari besarnya PDRB per kapita pada 2018, yakni Rp 12,3 juta, lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapita pada kelompoknya, sebesar Rp 42,5 juta.



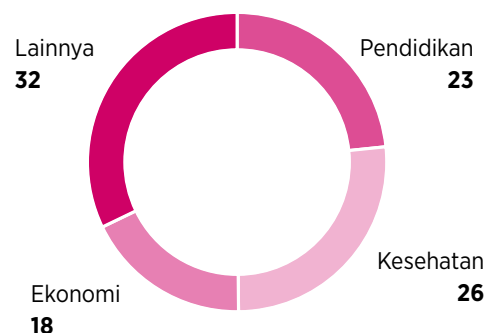
JAWA TENGAH



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Di kabupaten ini terdapat suku terasing, yaitu suku Talang Mamak yang menghuni hutan-hutan di Provinsi Riau. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah ini, yakni sebesar 29 persen terhadap PDRB 2019. Perkebunan menjadi sektor penyumbang paling dominan terutama dengan komoditi karet dan kelapa sawitnya.

DATA DASAR

Total APBD	1.338.383.677.161
Jumlah Penduduk	433.934
IPM	70
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	21%	4,0
Kesehatan	13%	1,7
Ekonomi	15%	9,1

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,1
Kesehatan	5,6
Kesejahteraan	5,3

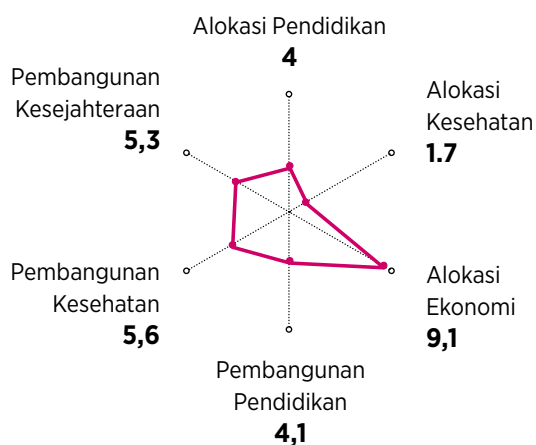
TELAAH

Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan penilaian yang baik pada ketepatan alokasi APBD fungsi ekonomi. Pada 2019 proporsi APBD per kapita untuk fungsi tersebut sebesar 15,2 persen.

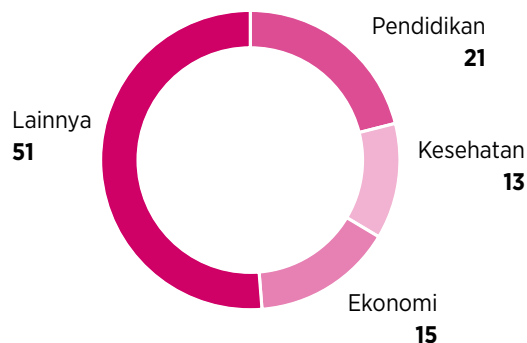
Tantangan ekonomi yang dihadapi kota tersebut tergambar dari PDRB per kapita pada 2018, yakni sebesar Rp 40,4 juta, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB pada kelompoknya yang sebesar Rp 42,5 juta.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN ASMAT

Kabupaten Asmat terletak di Provinsi Papua, dengan ibukota berada di Agats. Di wilayah ini masih memerlukan sarana transportasi sebagai penghubung antar distrik. Mayoritas suku di kabupaten ini adalah Asmat. Pada 2019, sektor konstruksi menyumbangkan PDRB terbesar yakni mencapai 32,2 persen. Kabupaten Asmat terkenal dengan objek wisata alam dan budaya, salah satunya Taman Nasional Lorentz.

DATA DASAR

Total APBD	1.733.155.793.439
Jumlah Penduduk	95.606
IPM	50
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	13%	3,5
Kesehatan	17%	9,1
Ekonomi	14%	10,0

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	1,0
Kesehatan	10,0
Kesejahteraan	6,4

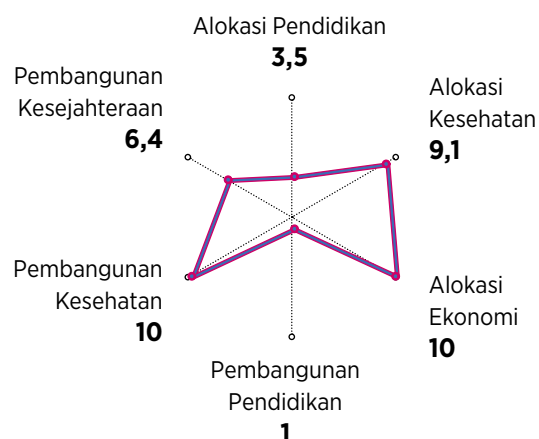
TELAAH

Kabupaten Asmat mendapatkan penilaian baik pada ketepatan alokasi APBD fungsi ekonomi. Pemerintah Kabupaten Asmat mengalokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya pada kelompok 3. Proporsi APBD per kapita untuk fungsi tersebut pada 2019 sebesar 13,6 persen.

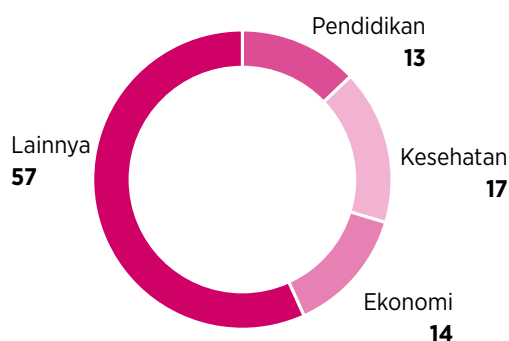
Sementara tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Asmat tercermin dari besarnya PDRB per kapita pada 2018, yakni Rp 2,3 juta. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapitanya yang sebesar Rp 3,7 juta.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Kabupaten Aceh Barat Daya yang disingkat Abdyta merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada 2002 silam. Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh ini sejak dahulu dikenal sebagai salah satu kawasan pusat perdagangan terbesar. Pada 2019, sektor perdagangan berperan menunjang kegiatan ekonomi sebesar 17,6 persen terhadap PDRB.

DATA DASAR

Total APBD	1.080.992.278.221
Jumlah Penduduk	148.111
IPM	67
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	21%	8,6
Kesehatan	16%	8,7
Ekonomi	12%	9,5

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	2,7
Kesehatan	4,8
Kesejahteraan	7,9

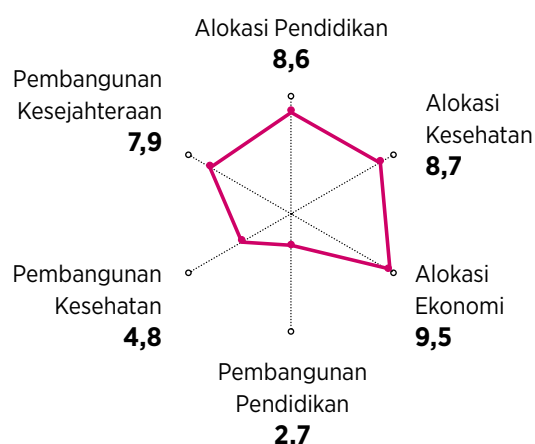
TELAAH

Kabupaten Aceh Barat Daya mendapatkan penilaian baik pada ketepatan alokasi APBD fungsi ekonomi. Pemerintah Kabupaten ini mengalokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya pada kelompok 3. Proporsi APBD per kapita untuk fungsi tersebut pada 2019 sebesar 12,3 persen.

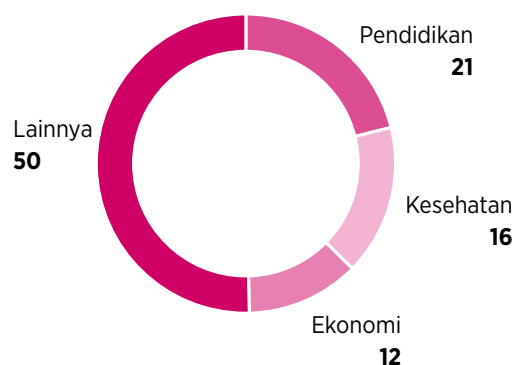
Dalam menghadapi tantangan ekonomi, kabupaten ini mengalokasikan anggaran relatif tinggi, yakni sebesar Rp 3,6 juta, hampir sama dengan rata-rata PDRB per kapita di dalam kelompoknya sebesar Rp 3,7 juta.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN SUPIORI

Kabupaten Supiori yang berada di Provinsi Papua. Prasarana perhubungan di wilayah ini cukup memadai, semua distrik dapat dicapai melalui jalur darat. Secara topografis, daerah ini pada umumnya bergunung-gunung dan pada bagian tertentu landai tersebar di sepanjang pesisir pantai. Pada tahun 2019, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu sebesar 31,9 persen.

DATA DASAR

Total APBD	803.875.879.946
Jumlah Penduduk	20.018
IPM	62
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	12%	3,5
Kesehatan	13%	4,0
Ekonomi	12%	9,4

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,9
Kesehatan	5,1
Kesejahteraan	5,0

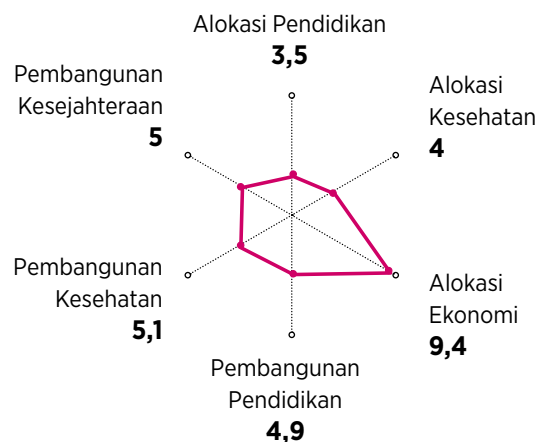
TELAAH

Kabupaten Supiori dinilai tepat dalam mengalokasikan APBD untuk fungsi ekonomi. Kabupaten ini menggelontorkan anggaran yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lainnya pada kluster 3. Proporsi APBD per kapita untuk bidang tersebut sebesar 11,6 persen.

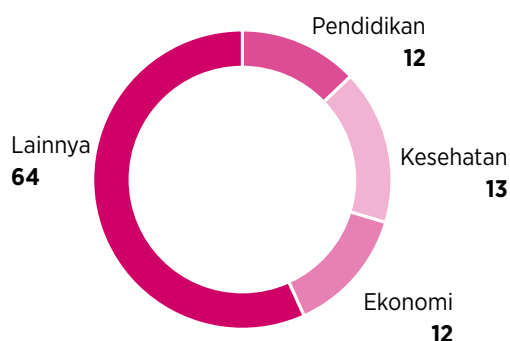
Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Supiori tergambar dari besarnya PDRB per kapita pada 2018, yakni Rp 0,95 juta, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapita pada kelompok 3, sebesar Rp 3,7 juta.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN WAY KANAN

Kabupaten Way Kanan tertelak di Provinsi Lampung dengan ibu kota Blambangan Umpu. Secara topografis, wilayah ini dibagi menjadi dua yaitu daerah topografis berbukit dan daerah river basin sehingga memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Sektor pertanian masih mendominasi pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 35,2 persen terhadap PDRB 2019.

DATA DASAR

Total APBD	1.471.006.549.525
Jumlah Penduduk	446.113
IPM	67
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	28%	8,8
Kesehatan	16%	8,7
Ekonomi	22%	10,9

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,7
Kesehatan	4,8
Kesejahteraan	5,0

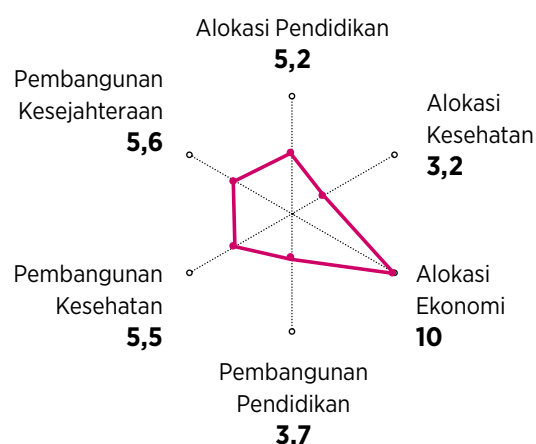
TELAAH

Kabupaten Way Kanan mendapatkan penilaian baik pada ketepatan alokasi APBD fungsi ekonomi. Pemerintah wilayah ini mengalokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya pada kelompok 4. Proporsi APBD per kapita untuk fungsi tersebut pada 2019 sebesar 27,5 persen.

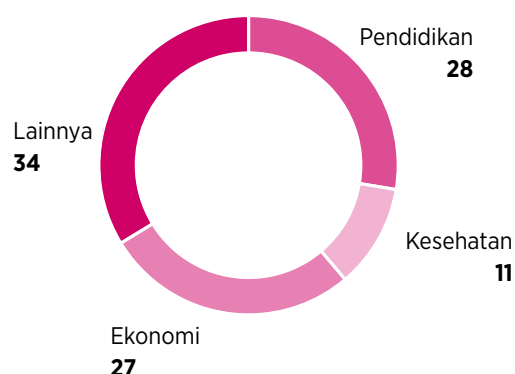
Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Way Kanan tercermin dari besarnya PDRB per kapita pada 2018, yakni Rp 13,2 juta. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB pada kelompok 4 yang sebesar Rp 17,3 juta.



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN ALOR

Kabupaten Alor merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini terdiri dari tiga pulau besar dan enam pulau kecil. Secara geografis, kabupaten ini bergunung-gunung yang sesuai untuk pengembangan tanaman produksi. Struktur ekonomi pada 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 31 persen terhadap PDRB.

DATA DASAR

Total APBD	1.174.708.333.649
Jumlah Penduduk	204.380
IPM	61
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	20%	4,6
Kesehatan	17%	5,3
Ekonomi	12%	8,6

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	10,0
Kesehatan	9,5
Kesejahteraan	3,5

TELAAH

Kabupaten Alor dinilai tepat dalam mengalokasikan APBD untuk fungsi ekonomi. Pemerintah wilayah ini menggelontorkan anggaran yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lainnya pada kluster 4. Proporsi APBD per kapita untuk bidang tersebut sebesar 12 persen.

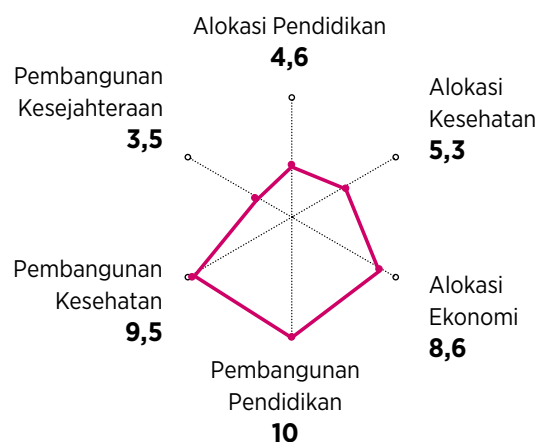
Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Alor tergambar dari besarnya PDRB per kapita pada 2018, yakni Rp 2,8 juta, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapita pada kelompoknya, sebesar Rp 17,3 juta.



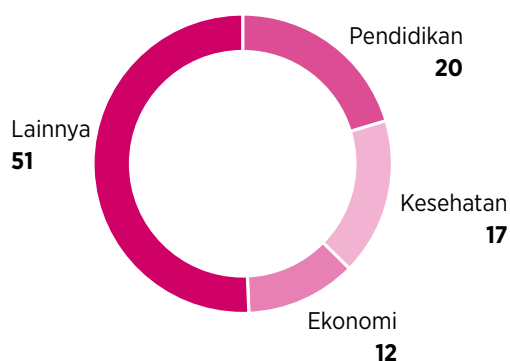
NUSA TENGGARA TIMUR



NILAI



PROPORSI APBD %



KETEPATAN ALOKASI APBD BIDANG EKONOMI KABUPATEN BUOL

Kabupaten Buol terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari segi geografis, wilayahnya terdiri atas pantai, dataran rendah, bukit, hingga gunung. Penggunaan lahan pada kabupaten ini kebanyakan untuk hutan rakyat.



DATA DASAR

Total APBD	1.025.557.658.357
Jumlah Penduduk	158.790
IPM	68
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	25%	3,4
Kesehatan	18%	8,2
Ekonomi	10%	8,4

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

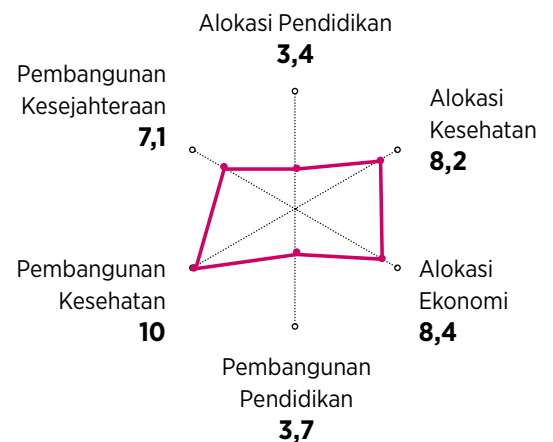
	Nilai
Pendidikan	3,7
Kesehatan	10,0
Kesejahteraan	7,1

TELAAH

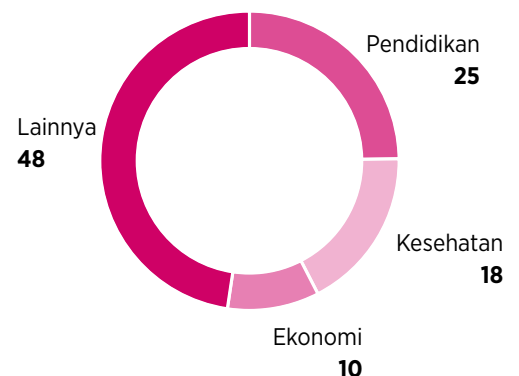
Kabupaten Buol dinilai tepat dalam mengalokasikan APBD untuk fungsi ekonomi. Pemerintah wilayah ini menggelontorkan anggaran yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya pada kluster 4. Proporsi APBD per kapita untuk bidang tersebut sebesar 9,9 persen.

Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Buol tergambar dari besarnya PDRB per kapita pada 2018, yakni Rp 5,5 juta, lebih rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapita pada kelompok 4, sebesar Rp 17,3 juta.

NILAI



PROPORSI APBD %





A nighttime photograph of a city skyline, heavily tinted with a green color. The image shows several tall skyscrapers, some of which are brightly lit with white lights, contrasting with the dark green background. The buildings are densely packed, and the overall scene conveys a sense of urban development and modern architecture.

PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN

PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KABUPATEN BADUNG

Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang terlatak di Provinsi Bali. Kabupaten ini terkenal sebagai objek pariwisata yang meliputi kawasan Kuta dan Nusa Dua. Industri pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian. Penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan perdagangan merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Badung.

DATA DASAR

Total APBD	7.941.248.633.403
Jumlah Penduduk	656.900
IPM	81,59

Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	21%	1,5
Kesehatan	14%	1,5
Ekonomi	4%	3,5

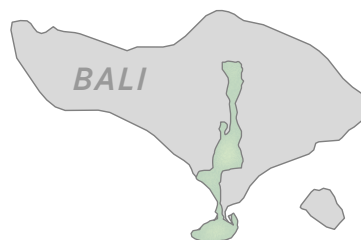
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,1
Kesehatan	5,9
Kesejahteraan	9,6

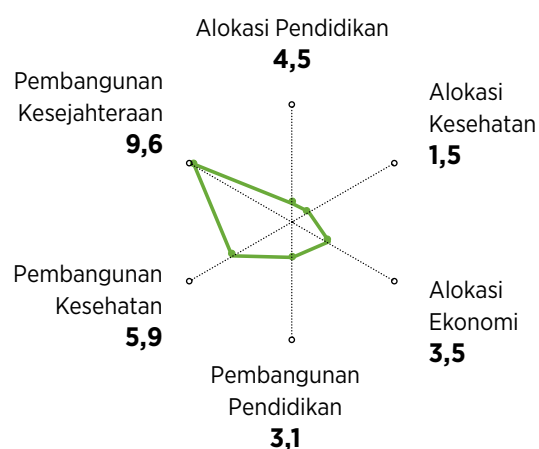
TELAAH

Kabupaten Badung mendapatkan penilaian baik pada pembangunan bidang kesejahteraan. Kabupaten tersebut memiliki nilai laju persentase penurunan penduduk miskin tercepat sebesar 10.1 persen pada periode 2018-2019 dari 1.98 persen menjadi 1,78 persen.

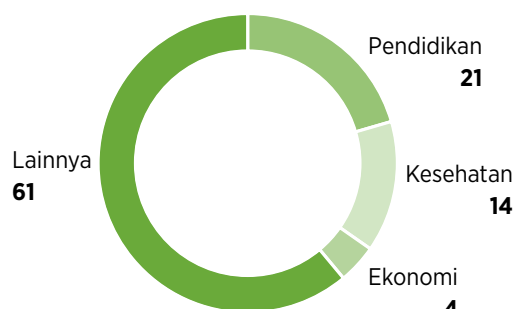
Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan selain menggunakan anggaran APBD juga memaksimalkan APBDes. Bagi desa yang masih memiliki rumah tangga sasaran, 5 persen anggaran harus digelontorkan. Jenis program yang dilakukan seperti bantuan pangan non tunai untuk program penganggulan fakir miskin.



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KOTA BONTANG

Kota Bontang merupakan kota yang terletak di bagian tengah Provinsi Kalimantan Timur dan berada di pesisir pantai timur. Wilayah laut kota ini lebih luas dari wilayah darat, menjadikan produksi perikanan didominasi oleh perikanan laut. Gas alam cair menjadi komoditi utama yang menopang perekonomian Kota Bontang.

DATA DASAR

Total APBD	1.451.230.694.044
Jumlah Penduduk	174.206
IPM	80,09
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	22%	8,3
Kesehatan	16%	1,0
Ekonomi	6%	3,2

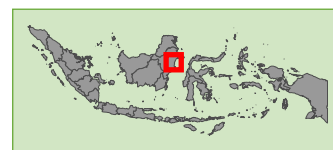
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	5,5
Kesehatan	5,3
Kesejahteraan	9,3

TELAAH

Kabupaten Bontang mampu menurunkan angka kemiskinan lebih besar dari daerah lain di kelompok satu. Kabupaten ini mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,64 persen pada 2018-2019 dari 4,67 persen menjadi 4,22 persen.

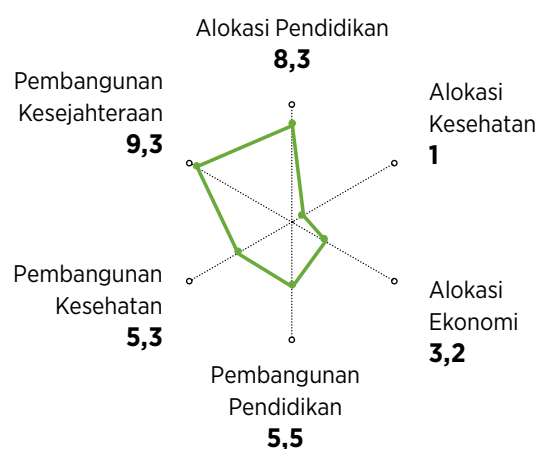
Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas dalam RPJMD 2016-2021 Kota Bontang. Beberapa program yang direalisasi seperti pemberian seragam gratis bagi pelajar, jaminan kesehatan daerah melalui subsidi bersumber APBD, penataan kawasan kumuh, bantuan bagi UMKM, dan peralatan usaha bagi nelayan.



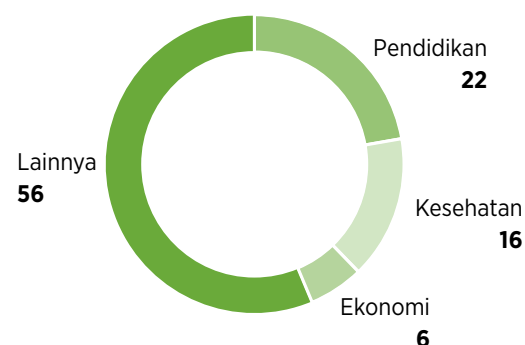
KALIMANTAN TIMUR



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KABUPATEN MALINAU

Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang dikenal dengan sebutan “Bumi Intimung”. Kabuapten ini dikenal dengan keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang memiliki luas 1,36 juta hektar. Malinau merupakan daerah yang dicanangkan menjadi daerah penyuplai kebutuhan pangan untuk rencana Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

DATA DASAR

Total APBD	1.438.139.314.367
Jumlah Penduduk	87.032
IPM	72,06
Kelompok	1
Jumlah daerah dalam kelompok	50

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	18%	4,5
Kesehatan	16%	3,0
Ekonomi	5%	2,3

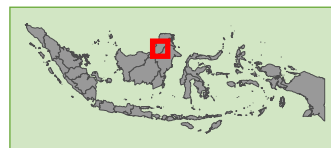
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,9
Kesehatan	1,5
Kesejahteraan	9,1

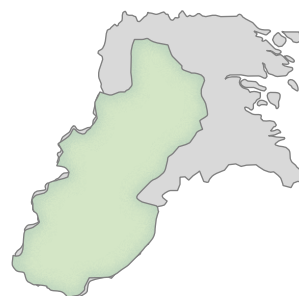
TELAAH

Kabupaten Malinau mendapatkan penilaian baik pada pembangunan bidang kesejahteraan dan mendapatkan skor 9,1 dari skala 1-10. Kabupaten tersebut memiliki nilai laju persentase penurunan penduduk miskin tercepat sebesar 9,37 persen pada periode 2018-2019 dari 7,68 persen menjadi 6,96 persen.

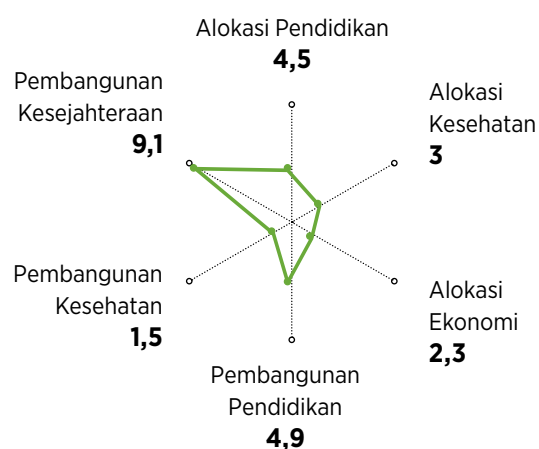
Bidang yang masih memiliki nilai rendah di kabupaten ini adalah pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga pemerintah daerah perlu mengupayakan untuk menggelontorkan dana lebih untuk hal tersebut.



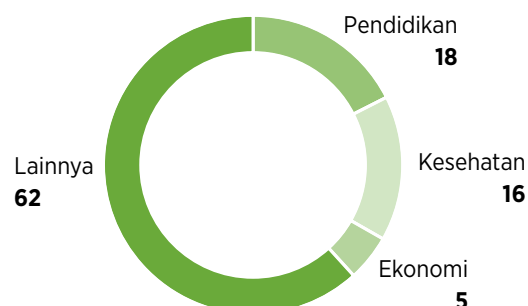
KALIMANTAN UTARA



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KABUPATEN BELITUNG

Kabupaten Belitung merupakan pulau yang bagian dari Provinsi Bangka Belitung yang memiliki ibu kota di Tanjung Pandan. Kabupaten Belitung terkenal dengan hasil bumi berupa galian bahan tambang timah. Selain itu, Belitung menghasilkan komoditas lada, sawit, dan hasil laut. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan negeri “Laskar Pelangi”.

DATA DASAR

Total APBD	1.117.515.681.000
Jumlah Penduduk	186.155
IPM	72,46
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	24%	3,4
Kesehatan	21%	7,0
Ekonomi	9%	8,3

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	1,8
Kesehatan	6,8
Kesejahteraan	10,0

TELAAH

Kabupaten Belitung mencatatkan hasil baik pada pembangunan bidang kesejahteraan. Daerah ini mendapatkan skor 9,4 karena mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 16,79 persen. Pada 2018, angka kemiskinan di kabupaten ini sebesar 7,56 persen dan turun menjadi 6,29 persen pada 2019.

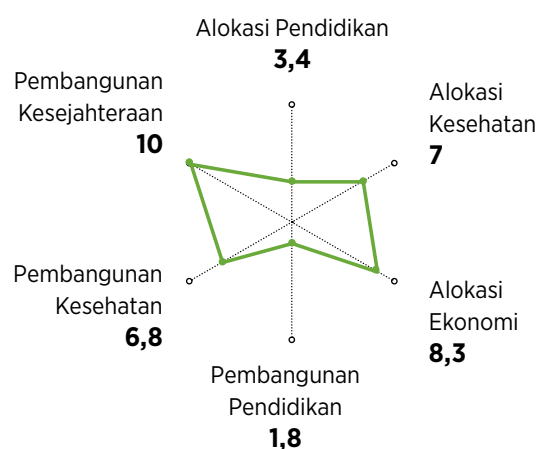
Pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Belitung ditopang dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata yang menyerap tenaga kerja.



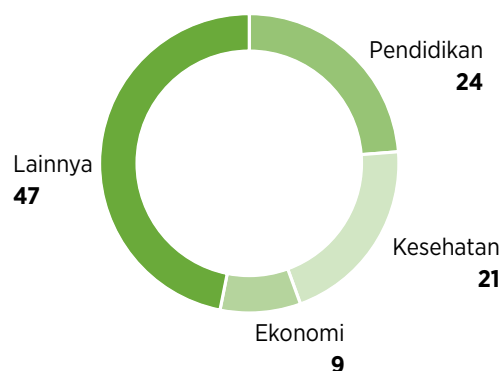
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KABUPATEN BANGGAI

Kabupaten Banggai merupakan kabupaten di Sulawesi Tengah dengan ibu kota terletak di Luwuk. Potensi kabupaten ini berupa sumber daya alam seperti hasil laut, hasil bumi, dan pertambangan nikel dan gas.

DATA DASAR

Total APBD	2.035.738.850.267
Jumlah Penduduk	371.320
IPM	70,36
Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	25%	3,7
Kesehatan	19%	8,4
Ekonomi	7%	8,1

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	6,7
Kesehatan	6,7
Kesejahteraan	10,0

TELAAH

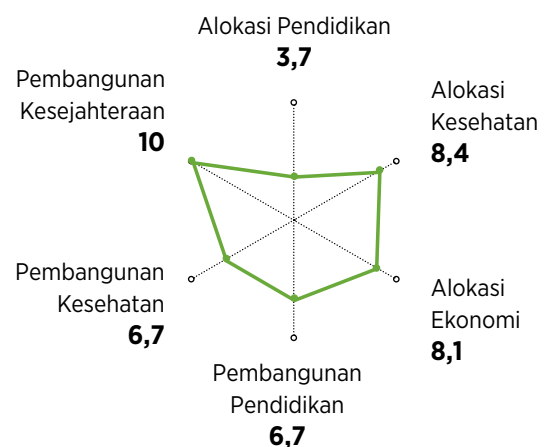
Kabupaten Banggai mencatatkan hasil baik pada pembangunan bidang kesejahteraan. Daerah ini menjadi salah satu kabupaten yang paling tinggi dalam laju penurunan angka kemiskinan. Kabupaten Banggai mendapatkan skor 10 dari skala 1-10 karena mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 14,47 persen. Pada 2018, angka kemiskinan Kabupaten Banggai sebesar 9,12 persen dan pada 2019 turun menjadi 7,8 persen.



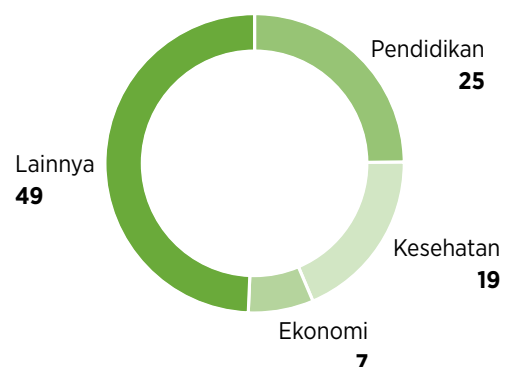
SULAWESI TENGAH



NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KOTA PANGKAL PINANG

Kota Pangkal Pinang merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang merupakan pusat pemerintahan, pusat aktivitas bisnis dan perdagangan, juga sentra industri di Bangka Belitung. Kantor pusat PT. Timah Tbk terletak di Pangkal Pinang.



KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DATA DASAR

Total APBD	866.679.890.318
Jumlah Penduduk	208.520
IPM	77,97

Kelompok	2
Jumlah daerah dalam kelompok	190

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	22%	2,0
Kesehatan	17%	7,9
Ekonomi	5%	1,8

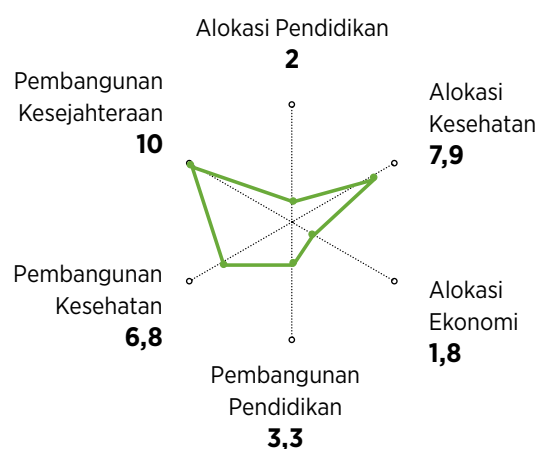
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,3
Kesehatan	6,8
Kesejahteraan	10,0

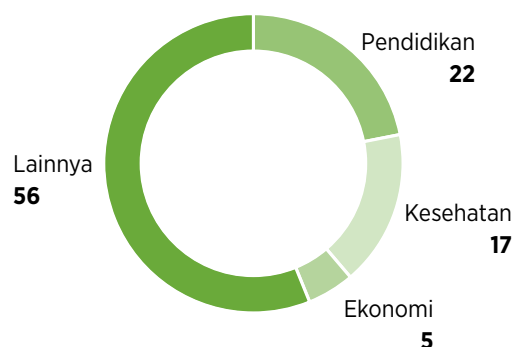
TELAAH

Kota Pangkal Pinang mencatatkan hasil baik pada pembangunan bidang kesejahteraan. Daerah ini menjadi salah satu kabupaten yang paling tinggi dalam menurunkan laju angka kemiskinan. Kota Pangkal Pinang mendapatkan skor 10 dari skala 1-10 karena mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 12,12 persen. Pada 2018, angka kemiskinan Kota Pangkal Pinang sebesar 4,95 persen dan pada 2019 turun menjadi 4,25 persen.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN

KABUPATEN GORONTALO UTARA

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan dataran renda yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini merupakan hasil dari pemekaran ketiga dari Kabupaten Gorontalo. Pada sebelah utara, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi.



GORONTALO



DATA DASAR

Total APBD	801.512.205.885
Jumlah Penduduk	111.693
IPM	64,52

Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	21%	8,4
Kesehatan	16%	5,4
Ekonomi	9%	8,5

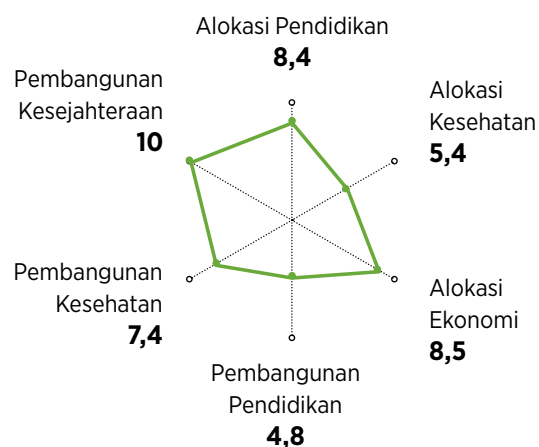
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	4,8
Kesehatan	7,4
Kesejahteraan	10,0

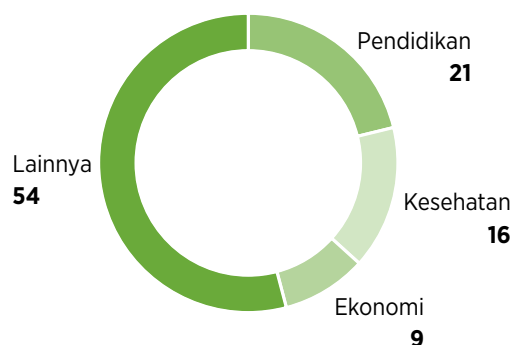
TELAAH

Kabupaten Gorontalo utara mencatatkan hasil baik pada pembangunan bidang kesejahteraan. Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan skor 10 dari skala 1-10 karena mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 8,57 persen. Pada 2018, angka kemiskinan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 18,54 persen dan pada 2019 turun menjadi 16,95 persen. Ini merupakan tingkat kemiskinan terendah semenjak kabupaten Gorontalo Utara berdiri. Sinkronisasi program dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah menjadi alasan keberhasilan ini.

NILAI



PROPORSI APBD %

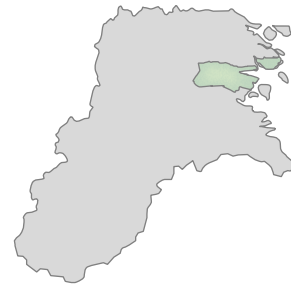


PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KABUPATEN TANA TIDUNG

Kabupaten Tana Tidung terletak di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan hasil dari pemekaran 2 wilayah yaitu Kecamatan ESAYAP, Sesayap Hilir, dan Tanah Lia. Perekonomian Kabupaten Tana Tidung mengandalkan potensi sumber daya alam seperti hasil hutan dan sumber daya mineral batu bara. Kontribusi sektor primer seperti pertanian dan sektor pengalihan/pertambangan masih menjadi sumber ekonomi utama.



KALIMANTAN UTARA



DATA DASAR

Total APBD	749.489.393.591
Jumlah Penduduk	26.892
IPM	67,79
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	18%	7,5
Kesehatan	10%	4,5
Ekonomi	3%	4,2

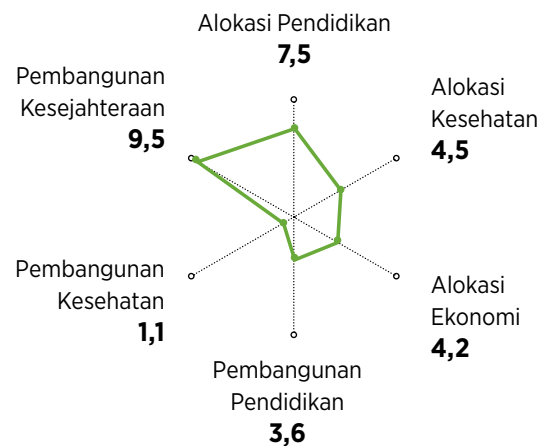
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,6
Kesehatan	1,1
Kesejahteraan	9,5

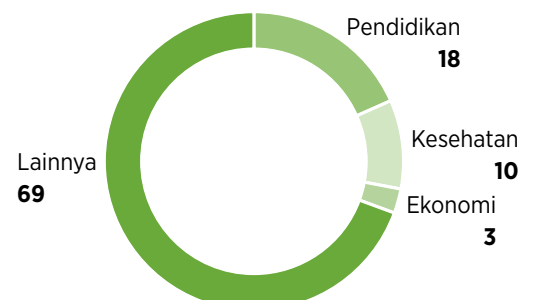
TELAAH

Kabupaten Tana Tidung mencatatkan hasil baik pada pembangunan bidang kesejahteraan. Daerah ini menjadi salah satu kabupaten yang paling tinggi dalam menurunkan laju angka kemiskinan. Kabupaten Tana Tidung mendapatkan skor 9,5 dari skala 1-10 karena mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 7,08 persen. Pada 2018, angka kemiskinan Kabupaten Tana Tidung sebesar 5,08 persen dan pada 2019 turun menjadi 4,72 persen.

NILAI



PROPORSI APBD %



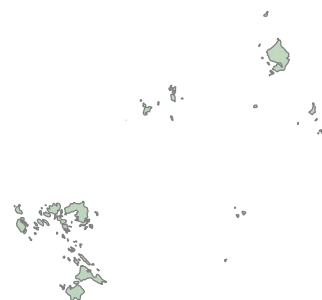
PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Provinsi Kepulauan Riau dengan ibu kota terletak di Tarempa hasil dari pemekaran Kabupaten Natuna pada 2008. Usaha Miko Kecil (UKM) mendominasi aktivitas ekonomi.



KEPULAUAN RIAU



DATA DASAR

Total APBD	1.212.979.436.188
Jumlah Penduduk	41.927
IPM	68,48
Kelompok	3
Jumlah daerah dalam kelompok	97

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	20%	7,3
Kesehatan	17%	7,9
Ekonomi	9%	6,5

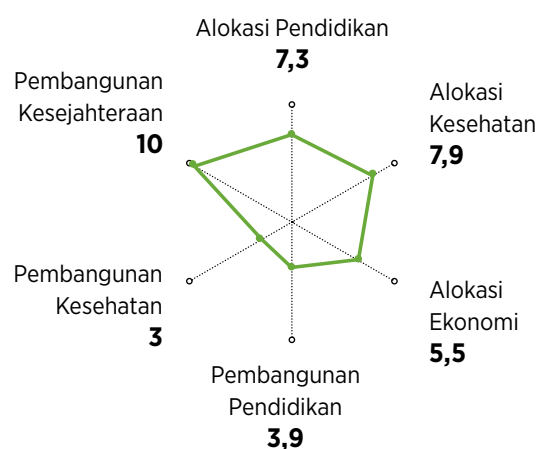
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,9
Kesehatan	3,0
Kesejahteraan	9,5

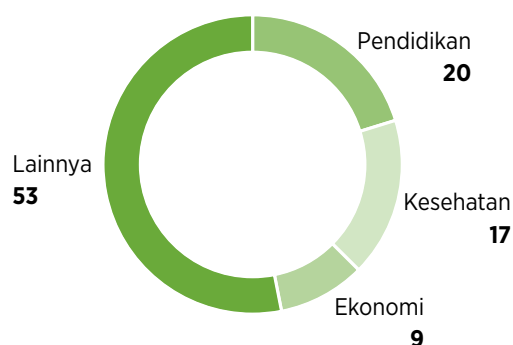
TELAAH

Kabupaten Kepulauan Anambas mencatatkan hasil baik pada pembangunan bidang kesejahteraan. Daerah ini menjadi salah satu kabupaten yang paling tinggi dalam menurunkan laju angka kemiskinan. Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan skor 9,5 dari skala 1-10 karena mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 7,07 persen. Pada 2018, angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 6,93 persen dan pada 2019 turun menjadi 6,44 persen.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KABUPATEN BANGKA BARAT

Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Letak kabupaten ini strategis karena menjadi pintu gerbang keluar masuk penumpang dan barang antara Pulau Bangka dan Pulau Sumatera. Sektor yang paling berkontribusi terhadap perekonomian adalah industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan penggalian.



KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DATA DASAR

Total APBD	962.836.023.934
Jumlah Penduduk	209.011
IPM	69,05
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	30%	5,7
Kesehatan	15%	4,9
Ekonomi	4%	2,0

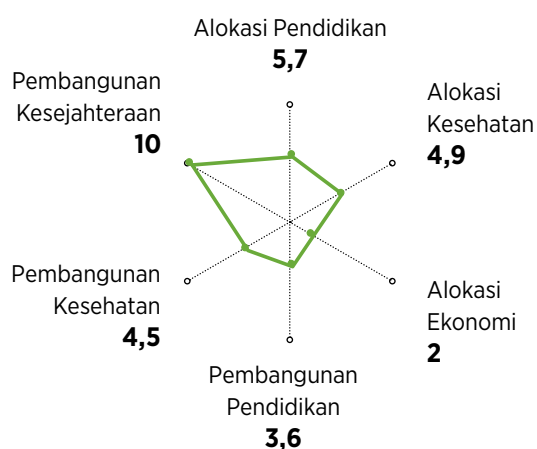
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,6
Kesehatan	4,5
Kesejahteraan	10,0

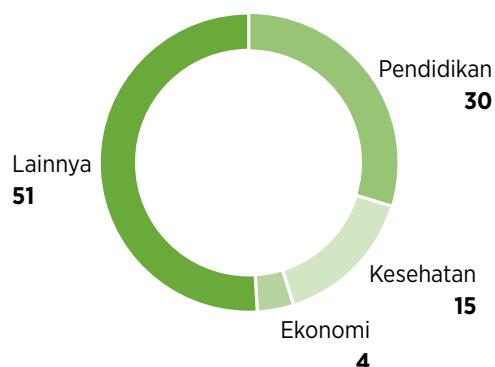
TELAAH

Kabupaten Bangka Barat mendapatkan penilaian baik pada pembangunan bidang kesejahteraan dan mendapatkan skor 10 dari skala 1-10. Kabupaten tersebut memiliki nilai laju persentase penurunan penduduk miskin tercepat sebesar 12,46 persen pada periode 2018-2019, dari 3,05 persen menjadi 2,67 persen. Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terkecil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi alasan capaian ini.

NILAI



PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KOTA GUNUNG SITOLI

Kota Gunungsitoli merupakan ibu kota dari Kabupaten Nias di Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota tertua dan terbesar di Kepulauan Nias. Sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, dan pertanian memegang peranan penting bagi perekonomian kota ini.

DATA DASAR

Total APBD	900.840.799.374
Jumlah Penduduk	140.927
IPM	69,30
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	57%	10,0
Kesehatan	5%	2,9
Ekonomi	3%	2,8

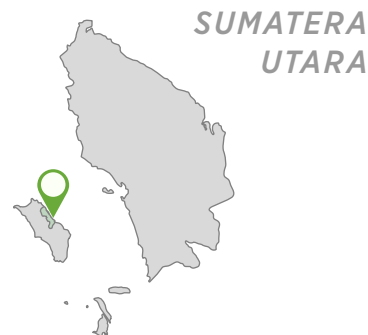
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	3,7
Kesehatan	5,9
Kesejahteraan	10,0

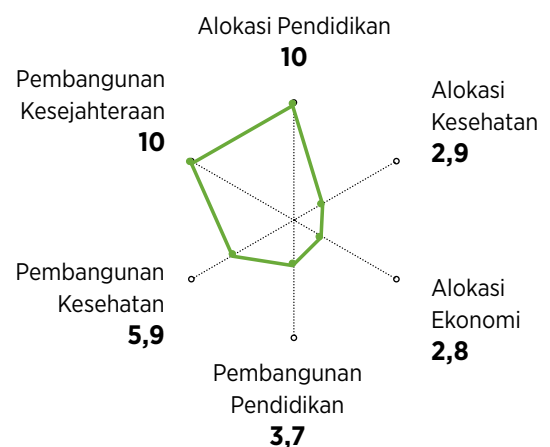
TELAAH

Kota Gunungsitoli mendapatkan penilaian baik pada pembangunan bidang kesejahteraan dan mendapatkan skor 10 dari skala 1-10. Kota tersebut memiliki nilai laju persentase penurunan penduduk miskin tercepat sebesar 11,98 persen pada periode 2018-2019, dari 18,44 persen menjadi 16,23 persen.

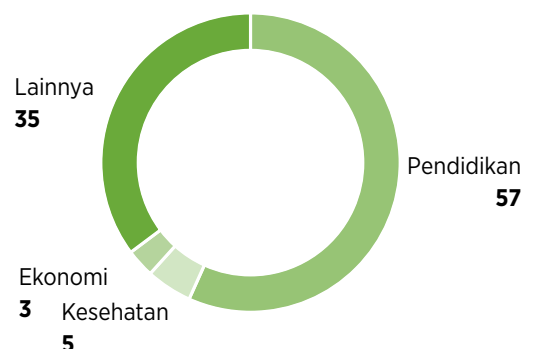
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di kota ini.



NILAI

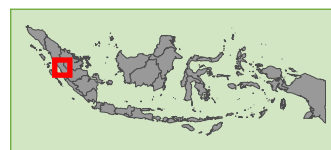


PROPORSI APBD %



PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN KABUPATEN SOLOK

Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Barat. Sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi juga menopang perekonomian di kabupaten ini.



DATA DASAR

Total APBD	1.281.764.456.645
Jumlah Penduduk	371.105
IPM	69,08
Kelompok	4
Jumlah daerah dalam kelompok	171

INDIKATOR

KETEPATAN ALOKASI APBD

	Proporsi (%)	Nilai
Pendidikan	37%	8,8
Kesehatan	13%	1,3
Ekonomi	6%	1,2

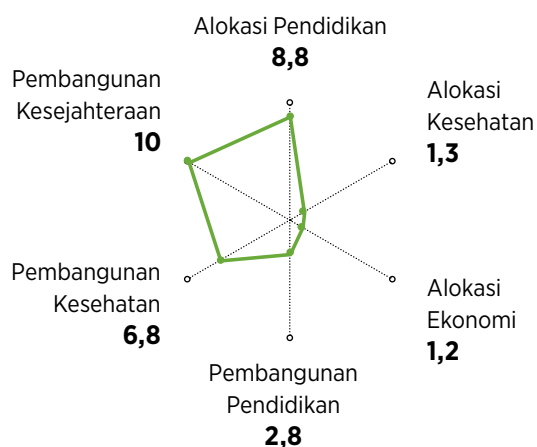
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

	Nilai
Pendidikan	2,8
Kesehatan	6,8
Kesejahteraan	10,0

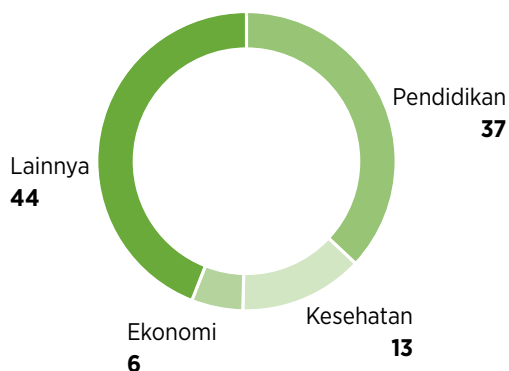
TELAAH

Kabupaten Solok mencatatkan hasil baik pada pembangunan bidang kesejahteraan. Daerah ini menjadi salah satu kabupaten yang paling tinggi dalam menurunkan laju angka kemiskinan. Kabupaten Solok mendapatkan skor 10 dari skala 1-10 karena mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 10,14 persen. Pada 2018, angka kemiskinan Kabupaten Solok sebesar 8,88 persen dan pada 2019 turun menjadi 7,98 persen. Meski demikian, Kabupaten Solok masih memerlukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

NILAI



PROPORSI APBD %



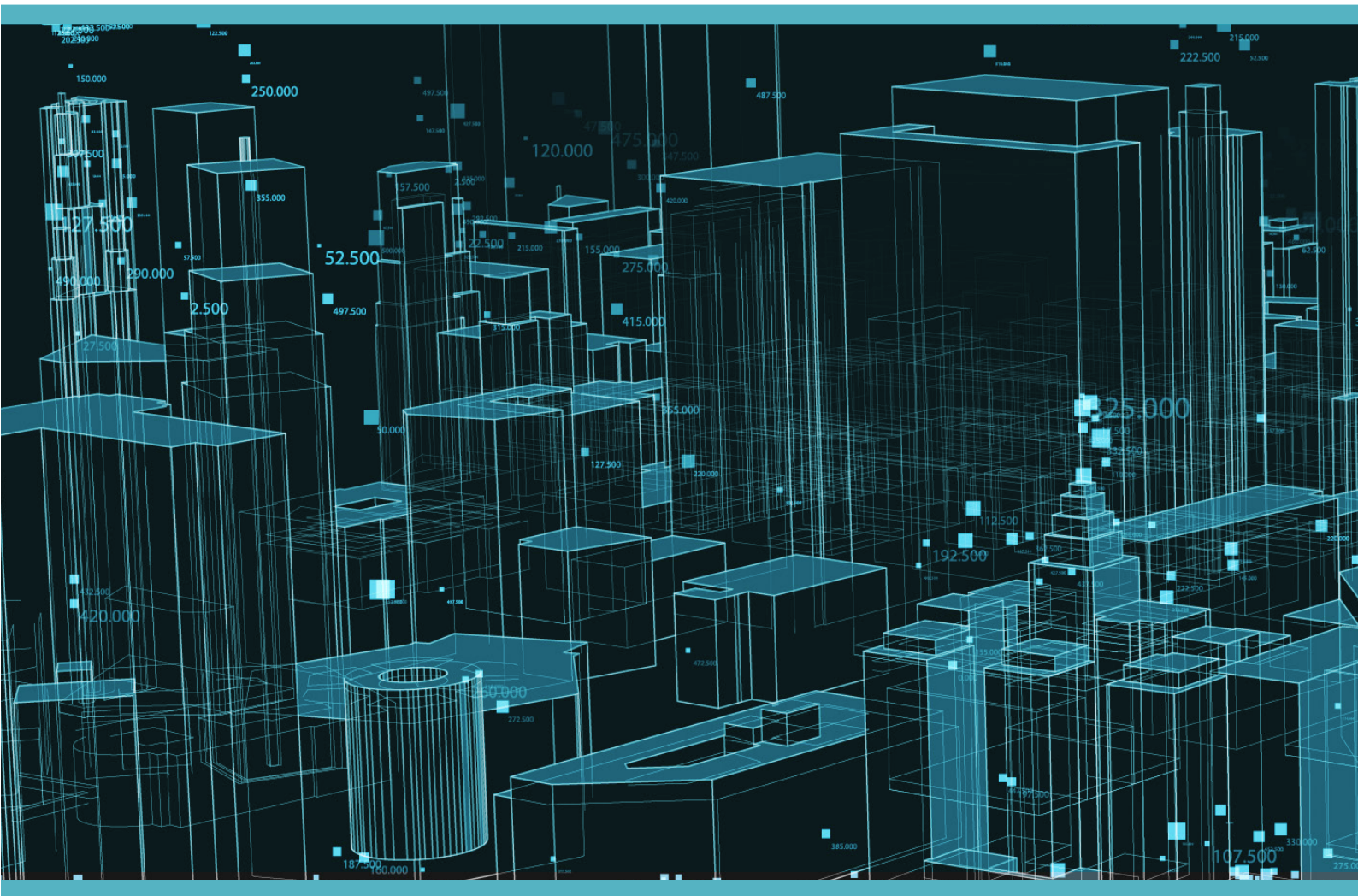
REFERENSI

- Acemoglu, D., 2009. Introduction to modern economic growth. Princeton University Press.
- Barro, R.J., 2001. Human Capital and Growth. Am. Econ. Rev. <https://doi.org/10.2307/2677725>
- Becker, G.S., 2007. Health as human capital: synthesis and extensions. Oxf. Econ. Pap. 59, 379. <https://doi.org/10.1093/oxep/gpm020>
- Fryer, Roland G, J., 2016. The Production of Human Capital in Developed Countries: Evidence from 196 Randomized Field Experiments. Handb. F. Exp. <https://doi.org/10.3386/w22130>
- Gertler, P.J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L.B., Vermeersch, C.M.J., 2016. Impact evaluation in practice. The World Bank.
- Kementerian Keuangan, 2019. Ini 'Catatan' Menkeu Terhadap Pengelolaan APBD yang Kurang Optimal. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-catatan-menkeu-terhadap-pengelolaan-apbd-yang-kurang-optimal/>
- Klenow, P.J., Rodríguez-Clare, A., 1997. Economic growth: A review essay. J. Monet. Econ. 40, 597-617. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(97\)00050-0](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(97)00050-0)
- Krueger, A.B., 2003. Economic Considerations and Class Size. Econ. J. 113, F34-F63.
- Krueger, A.B., 1999. Experimental Estimates of Education Production Functions. Q. J. Econ.
- Mankiw, N.G., Romer, D., Weil, D.N., 1992. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Q. J. Econ. 107, 407-437. <https://doi.org/10.2307/2118477>
- Romer, P., 1989. Human Capital and Growth: Theory and Evidence. Cambridge, MA. <https://doi.org/10.3386/w3173>
- Schultz, T.W., 1961. Investment in Human Capital. Am. Econ. Rev. <https://doi.org/10.2307/1818907>
- White, H., Raitzer, D.A., 2017. Impact Evaluation of Development Interventions: A Practical Guide. Manila.



KATADATA INSIGHT CENTER (KIC)

adalah unit bisnis dari Katadata, dengan spesialisasi riset dan data analisis. KIC menyajikan ulasan mendalam untuk membantu Anda dalam membuat keputusan bisnis. KIC didukung oleh tim yang berpengalaman dalam pembuatan dan penulisan produk-produk riset berkualitas dalam beragam bentuk, seperti ulasan berita secara mendalam dan eksklusif (news insight & inside story), analisis data (data analytics) dan buku yang selalu menjadi acuan pemberitaan media massa.



 **katadata.co.id**

Rukan Permata Senayan Blok D 31
Jalan Tentara Pelajar, RT.1/RW.7, Grogol Utara,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Telepon: +6221 5794 0835 | Email: info@katadata.co.id | Website: kic.katadata.co.id